



**PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN  
DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR  
KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2000-2015**

**SKRIPSI**

Oleh

**Magdalena Yuli Purwati  
NIM 120210302096**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN  
DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR  
KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2000-2015**

**SKRIPSI**

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1  
(S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah dan mencapai  
gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

**Magdalena Yuli Purwati  
NIM 120210302096**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

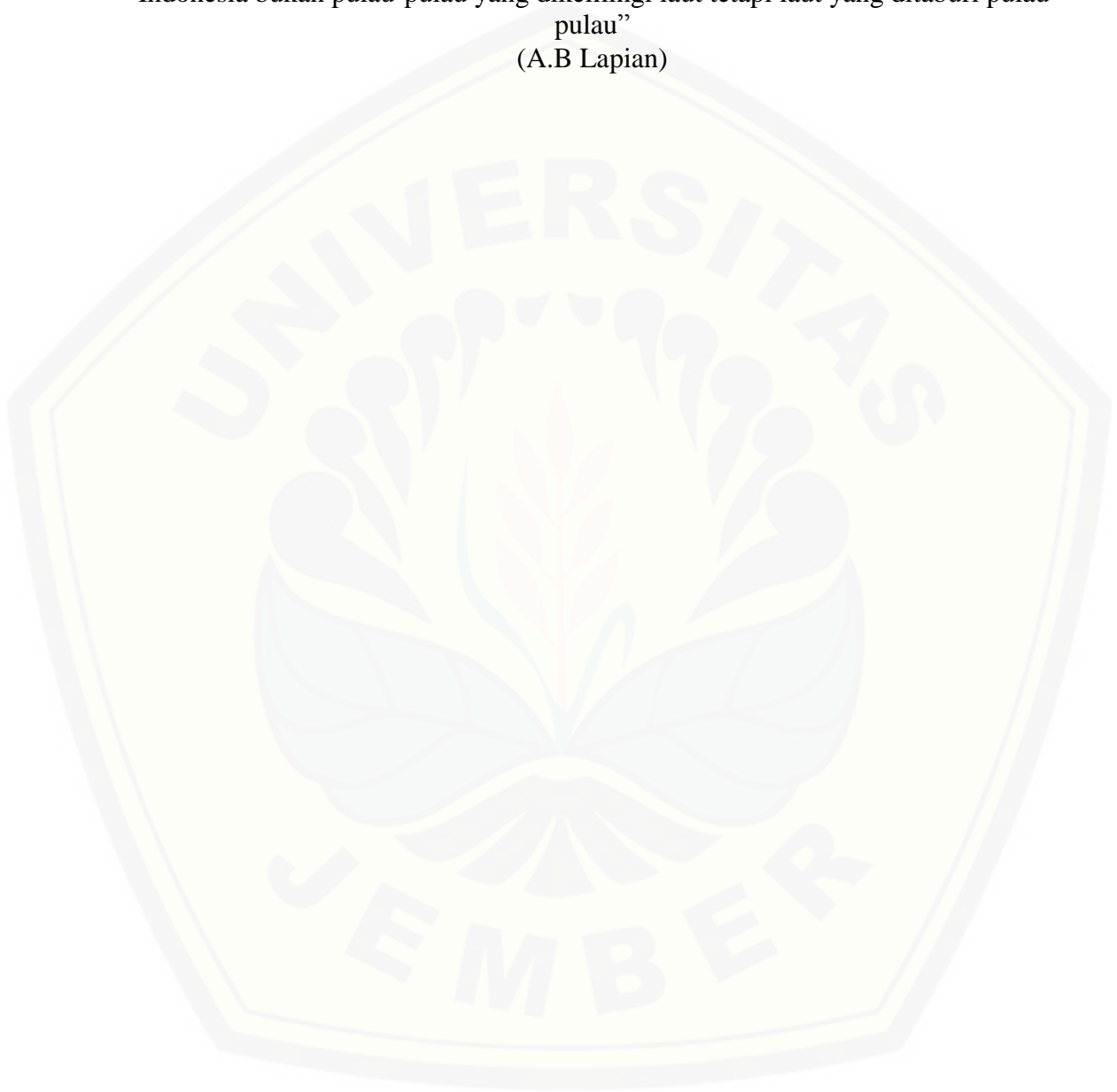
## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk

1. Ibunda Darmaning, yang telah memberikan kasih sayang tulus dan doa di setiap langkahku, memberikan bimbingan, perlindungan dan semangat dalam menjalani hidup demi keberhasilanku;
2. Adikku Filomina Dwi Cahyarini, yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan dan doa untuk bisa segera menyelesaikan skripsi ini;
3. Kakakku Joe Syaputra, yang memberikan motivasi dan dukungan yang senantiasa menyertai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Teman-temanku semua yang selalu memberikan motivasi dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini;
5. Guru-guruku terhormat di TK Santa Theresia, SD Katolik Santo Ignatius Muncar, SMP Katolik Sint Yoseph, SMA Negeri 1 Cluring dan para Dosen terhormat di Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
6. Almater Universitas Jember, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Sejarah.

**MOTTO**

“Indonesia bukan pulau-pulau yang dikelilingi laut tetapi laut yang ditaburi pulau-pulau”  
(A.B Lopian)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

nama : Magdalena Yuli Purwati

NIM : 120210302096

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Desember 2016

Yang menyatakan,

Magdalena Yuli Purwati  
NIM 120210302096

**SKRIPSI**

**PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN  
DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR  
KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2000-2015**

Oleh

Magdalena Yuli Purwati  
NIM 120210302096

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sugiyanto, M.Hum.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Marjono, M.Hum.

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada :

hari : Jumat

tanggal : 16 Desember 2016

tempat : Gedung 1 FKIP Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Sugiyanto, M.Hum.  
NIP19570220 198503 1 003

Drs. Marjono, M.Hum.  
NIP 19600422 198802 1 001

Anggota 1,

Anggota 2,

Drs. Sumarjono, M.Si.  
NIP19580823 198702 1 001

Drs. Kayan Swastika, M.Si.  
NIP 19670210 200212 1 002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Prof. Drs. Dafik, M.Sc.,Ph.D  
NIP 19680802 199303 1 004

## RINGKASAN

**Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015;** Magdalena Yuli Purwati, 120210302096; 2016: xii+167 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Desa Kedungrejo merupakan suatu kawasan pesisir pantai. Mayoritas masyarakatnya bekerja dalam bidang perikanan sebagai nelayan. Kondisi masyarakat nelayan Kedungrejo sangat sederhana terlihat dari cara penangkapan ikan yang masih tradisional serta hasil pendapatan yang tidak seimbang dengan potensi sumber daya yang ada. Kehidupan nelayan yang masih sederhana disebabkan oleh beberapa hal yaitu, faktor keterbatasan pendidikan, kurangnya kesempatan untuk mengakses dan menguasai teknologi modern serta tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Untuk meningkatkan taraf kehidupan nelayan pemerintah menerapkan kebijakan modernisasi serta menetapkan kebijakan Otonomi Daerah No 22 Tahun 1999 tentang pengelolaan sumber daya alam yang dikelola pemerintah daerah sesuai potensi yang dimiliki setiap daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi terkait dengan penerapan kebijakan pemerintah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana kondisi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi menjelang tahun 2000?; (2) apa saja faktor-faktor penyebab perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2015?; (3) bagaimana bentuk perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2015?; dan (4) bagaimana sikap masyarakat nelayan terhadap perubahan sosial ekonomi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi



tahun 2000-2015?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah: (1) Heuristik yakni pengumpulan data melalui beberapa tahap diantaranya observasi, wawancara dengan narasumber yang dianggap paling mengerti terkait penelitian yang dilakukan, (2) kritik sejarah, yakni mengkritik sumber-sumber yang didapat melalui sumber primer (responden) dan sumber sekunder (buku, laporan-laporan, dan monografi), (3) interpretasi yakni dengan mengkaitkan informasi-informasi yang didapat dari hasil penelitian, (4) historiografi, yakni penulisan sejarah. Analisa data tentang perubahan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat menggunakan deskriptif analisis.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kondisi sosial ekonomi nelayan Desa Kedungrejo mengalami perubahan yang dapat dilihat dari tingkat pendapatan. Sejak adanya modernisasi dan pengelolaan sumber daya alam perikanan masyarakat nelayan mendapat bantuan dari pemerintah berupa alat tangkap modern dan kapal membantu nelayan dalam meningkatkan perolehan hasil tangkapan ikan yang membuat pendapatan nelayan meningkat. Selain itu aktivitas nelayan dengan penggunaan alat tangkap ikan, cara produksi hasil tangkapan ikan yang berkembang serta modal usaha perikanan mempengaruhi perubahan kondisi kehidupan nelayan Desa Kedungrejo Muncar.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perubahan dalam masyarakat nelayan dari kondisi sosial ekonominya seperti rumah nelayan dan pendidikan. Kondisi rumah nelayan yang sebelumnya berupa rumbai disepanjang pesisir Desa Kedungrejo Muncar kini sudah permanen terbuat dari batu bata dan dialiri arus listrik, sedangkan pendidikan masyarakat nelayan kini semakin maju, tidak ada nelayan yang buta huruf nelayan semakin memahami pentingnya pendidikan. Pola pemikiran nelayan yang semakin berkembang, nelayan Kedungrejo juga mengembangkan cara produksi yang awalnya hanya pengasinan, penepungan, dan pemindangan, kini menggunakan pengepresan/ cold storage melihat kualitas ikan yang sangat cepat busuk jika tidak cepat dikelola.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph.D, selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof.Drs. Dafik, M.Sc.Ph.D, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sukidin, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS Universitas Negeri Jember;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah;
5. Drs.Sugiyanto, M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama ini, serta selalu mengingatkan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Drs. Marjono, M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini;
7. Dr. Sumardi, M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberi pengarahan dan saran dari awal kuliah sampai selesai;
8. Dosen-dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan selama perkuliahan;
9. Ibunda Darmaning dan adikku Filomina Dwi cahyarini yang selalu memberikan doa serta dukungan yang senantiasa menyertai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

10. Kakakku Riza Zulmi, yang memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan dan doa untuk bisa segera menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-temanku di Perumahan Gumuk Kerang yang sudah seperti keluarga kedua di Jember yang memberi motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabatku yang senasib seperjuangan Evita Feby, Yessyca Yunitasari, Hajar Riza Asyiyah, Nur Ma'rifa, Dwi sulistiyoningsih, Delima Lorensia Elok, Mustika Zahro, Noviah Iffatun Nisa;
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan.

Jember, Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PRAKATA.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Penegasan Pengertian Judul .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.6 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB 4. KONDISI MASYARAKAT NELAYAN DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI MENJELANG TAHUN 2000 .....</b>	<b>27</b>
<b>4.1 Keadaan Geografis Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar.....</b>	<b>27</b>
<b>4.2 Keadaan Demografis Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar....</b>	<b>30</b>
<b>4.3 Kondisi Sosial Ekonomi Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar</b>	<b>33</b>

<b>BAB 5. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR TAHUN 2000-2015</b> .....	38
<b>5.1 Faktor Internal</b> .....	39
5.1.1 Pertumbuhan Penduduk .....	39
<b>5.2 Faktor Eskternal</b> .....	41
5.2.1 Kebijakan Pemerintah .....	41
5.2.2 Teknologi Penangkapan Ikan .....	53
<b>BAB 6. BENTUK PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR TAHUN 2000-2015</b> .....	58
<b>6.1 Bentuk Perubahan Sosial Ekonomi Nelayan Kedungrejo</b> .....	58
6.1.1 Tingkat Pendapatan .....	58
6.1.2 Tingkat Pendidikan .....	61
6.1.3 Pengolahan dan Pemasaran .....	63
<b>BAB 7. SIKAP MASYARAKAT NELAYAN TERHADAP PERUBAHAN DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI</b> .....	69
<b>BAB 8. PENUTUP</b> .....	73
<b>8.1 Kesimpulan</b> .....	73
<b>8.2 Saran</b> .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	83

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
A. LAMPIRAN A. MATRIKS PENELITIAN .....	83
B. LAMPIRAN B. PEDOMAN WAWANCARA .....	84
C. LAMPIRAN C. PROFIL INFORMAN .....	86
D. LAMPIRAN D.PETA KABUPATEN BANYUWANGI & MUNCAR .....	103
E. LAMPIRAN E. GAMBAR PENELITIAN.....	107
F. LAMPIRAN F. SURAT-SURAT .....	113
G. LAMPIRAN G.UNDANG-UNDANG .....	117

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah sebuah negara maritim, karena memiliki lautan yang lebih luas dari pada daratannya. Indonesia memiliki pantai sepanjang 91.181 km, serta memiliki pulau-pulau kecil sebanyak 17.504 buah pulau. Wilayah perairan laut Indonesia seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> yang meliputi Perairan Kepulauan seluas 2,8 juta km<sup>2</sup>, Perairan Teritorial seluas 0,3 juta km<sup>2</sup> dan Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2,7 juta km di huni oleh berbagai jenis ikan dan biota perairan lainnya. Berdasarkan data resmi Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, potensi sumber daya laut Indonesia diperkirakan sebesar 6.408 juta ton pertahun, yang terdiri dari 1.165 juta ton pertahun ikan pelangis besar (ikan tuna, cakalang, tenggiri, marlin), 3.605 juta ton pertahun ikan pelangis kecil (ikan kembung, tembang, layang, selar, teri dan sebagainya). Sebanyak 0,145 juta ton per tahun ikan demersil (katamba, bambangan, kerapu, beronang, dan sebagainya), dan 0.128 juta ton per tahun udang dan cumi-cumi (Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia, 2013:35).

Salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar adalah Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi memiliki panjang pantai ± 282 km, areal tambak seluas 1.361 Ha, areal kolam ikan seluas 284,53 Ha dan panjang sungai ± 735 km. Disamping itu Kabupaten Banyuwangi memiliki 3 pelabuhan ikan yaitu di Desa Kedungrejo Muncar, Desa SumberagungPancer, dan Grajagan yang mayoritas penduduknya adalah nelayan. Pengelolaan 3 pelabuhan tersebut berada langsung dibawah pengawasan pemerintah daerah. Desa Kedungrejo di Kecamatan Muncar merupakan penyumbang utama hasil perikanan tangkap di Kabupaten Banyuwangi yaitu 80% sekitar 25.120 ton/tahun sedangkan





Pancer dan Grajagan sekitar 12.670 ton/tahun (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi, 2012:35).

Desa Kedungrejo sebagai pemasok perikanan tangkap terbesar di Kecamatan Muncar, mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Para nelayan tersebut mayoritas nelayan pendatang atau migran yang berasal dari berbagai pesisir di beberapa daerah seperti: Probolinggo, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, dan Madura. Komunitas masyarakat yang orientasi hidupnya melaut maka kehidupan sosial ekonomi serta pranata-pranata sosial melembaga dengan sendirinya beradaptasi dengan lingkungan yang berupa laut.

Sebelum tahun 2000, kehidupan nelayan Desa Kedungrejo tidak ada kemajuan (sederhana), sumberdaya ekonomi nelayan tergantung sepenuhnya pada potensi laut. Usaha memenuhi kebutuhan rumah tangga umumnya bertumpu pada penangkapan ikan. Usaha selain menangkap ikan sangat terbatas sehingga ketika musim paceklik penghasilan nelayan akan berkurang. Upaya untuk memperoleh hasil tangkapan yang memadai sering terhambat oleh teknologi alat tangkap yang masih bersifat tradisional. Kehidupan nelayan yang masih sederhana disebabkan oleh beberapa hal yaitu, faktor keterbatasan pendidikan, kurangnya kesempatan untuk mengakses dan menguasai teknologi modern serta tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya (Wawancara Pak Sahlam, Tanggal 3 Maret 2016).

Pada upaya meningkatkan taraf kehidupan nelayan pemerintah menerapkan kebijakan modernisasi pada masa Orde Baru dimulai tahun 1970 mengenalkan alat tangkap ikan nelayan. Kebijakan yang menitikberatkan pada produktifitas telah mendorong perairan pesisir Jawa Timur berada dalam situasi siap tangkap. Akibat modernisasi justru menyebabkan persaingan antar nelayan tradisional dengan nelayan pengguna mini trawl. Nelayan Kedungrejo yang masih menggunakan alat tangkap ikan tradisional berupa serok, jala tebar, kail dan berbagai perangkat yang dirancang untuk menangkap ikan, kalah bersaing dengan nelayan pendatang yang menggunakan alat tangkap modern. Konflik masyarakat pesisir khususnya di Desa Kedungrejo

terjadi akibat beroperasinya jaring Purse seine milik nelayan pendatang, yang dalam operasinya bergerak tanpa menghiraukan posisi alat tangkap tradisional. Hal ini telah menimbulkan perebutan daerah tangkap antar kelompok nelayan. Untuk menengahi permasalahan yang dihadapi nelayan pemerintah menetapkan Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999. Pemerintah memiliki tujuan agar kelautan dan perikanan dapat bermanfaat semaksimal mungkin bagi rakyatnya, untuk itu ranah kelautan sepatutnya mendapatkan kebijakan tepat karena berperan besar selain sebagai pertahanan negara, juga menunjang perekonomian negara. Berdasarkan UU No. 3 tahun 2004 tentang desentralisasi pemerintah, kebijakan pusat harus dilimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah setingkat provinsi, berlanjut ke kabupaten, dan diserahkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diberikan terkait dengan kemaritiman, wujudnya dapat diterapkan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masing-masing daerah (Permen Kelautan dan Perikanan No 32/PERMEN-KP/2014).

Menjelang tahun 2000 kebijakan perikanan lebih mengarah pada kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Program pemberdayaan masyarakat pesisir bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakatnya dan pendayagunaan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan kebijaksanaan pembangunan daerah baik secara regional maupun nasional, maka prioritas pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banyuwangi dititik beratkan pada upaya optimalisasi intensitas pengelolaan sumberdaya kelautan dan pengembangan budidaya perikanan sesuai dengan potensi unggulan dimasing-masing wilayah kecamatan. Pengendalian kegiatan penangkapan ikan tetap dilakukan di area yang sudah mengalami padat tangkap dan mengembangkan kegiatan penangkapan ikan di wilayah-wilayah yang cukup potensial (samudera Indonesia) melalui peningkatan kemampuan armada perikanan ke daerah ZEEI (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi, 2013:46).

Keadaan ini dapat menimbulkan adanya perubahan dalam masyarakat nelayan dari segi sosial ekonomi maupun budaya. Dilihat dari perubahan sosial ekonomi, masyarakat kini mulai bisa meningkatkan kesejahteraannya diberbagai aspek kehidupan, seperti tempat tinggal dan pendidikan. Perubahan sosial juga tidak terlepas dari adanya pengaruh budaya. Perubahan sosial budaya suatu komunitas sangat dipengaruhi oleh sejauhmana tingkat kemampuan masyarakat membangun hubungan sosial dengan komunitas lain. Apabila hubungan sosial masyarakat terbangun maka akan terjadi pengenalan budaya luar. Faktor budaya yang dapat diterima suatu masyarakat terutama menyangkut unsur budaya kebendaan, seperti alat yang digunakan dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang menerimanya. Tingkat penerimaan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat penerimanya. Perubahan ini tentunya memiliki pengaruh positif dan negatif dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai daerah pesisir. Dengan adanya undang-undang tentang kebijakan otonomi daerah yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya masyarakat nelayan Desa Kedungrejo. Peneliti ingin mengkaji daerah pesisir yang menitik beratkan pada perubahan kehidupan masyarakat nelayan, dengan judul “Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015.

## **1.2 Penegasan Pengertian Judul**

Penegasan pengertian judul bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memandang perlu memberikan pengertian judul skripsi. Pada hal ini, penulis memandang penegasan judul dari sudut pandang definisi konseptual dan definisi operasional berkaitan dengan judul penelitian.

Perubahan adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang telah berganti akibat adanya interaksi yang dilakukan antar masyarakat (Departemen Pendidikan Nasional,

2005:920). Menurut Syani (1995:83) perubahan merupakan suatu keadaan dalam masyarakat yang mengalami gerak peralihan akibat adanya hubungan timbal balik sebab akibat yang saling berkesinambungan dalam tata kehidupan masyarakat. Secara konseptual, menurut Susanto (1999:166) mengemukakan bahwa perubahan sosial meliputi perubahan dalam segi distribusi kelompok usia, pola perilaku, tingkat pendidikan rata-rata, mobilitas (lapisan dalam masyarakat), sistem politik dan kekuatan, serta persebaran penduduk. Sedangkan ekonomi menurut Haryanto (2011:15) dalam pengertian sekarang ini memiliki tiga aspek utama, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Ketiga aspek ini merupakan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan.

Ada pula pengertian dari Masyarakat nelayan menurut Kusnadi (2002:8) adalah masyarakat yang hidup tumbuh, dan berkembang di kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Menurut Mulyadi (2005:7), nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budidaya. Masyarakat nelayan pada umumnya tinggal di daerah pinggir pantai yang didalamnya terdapat penggolongan nelayan yang mencakup pengambang, pandhiga, dan nelayan budidaya. Sehingga dapat dikatakan masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang melakukan pengelolaan sumberdaya ikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud dengan “Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi” dalam penelitian ini adalah suatu kondisi yang terjadi dalam masyarakat akibat adanya interaksi sosial sehingga menimbulkan perubahan yang berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat nelayan terkait kehidupan sosial ekonominya. Aspek sosial yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan tingkat pendidikan, hubungan antar masyarakat, dan mobilitas dalam masyarakatnya. Sedangkan aspek ekonomi dalam penelitian ini terkait dengan tingkat pendapatan dan pengelolaan hasil tangkapan masyarakat nelayan Desa Kedungrejo tahun 2000-2015.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan memberikan pengaruh besar terhadap segala aspek dalam kehidupan terutama aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Indikator tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo.

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar terfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Untuk menegaskan hal-hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup spasial, ruang lingkup temporal, dan ruang lingkup tematis.

Lingkup spasial yang diambil dalam penelitian ini adalah di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan Desa Kedungrejo merupakan daerah penghasil ikan terbesar di Kabupaten Banyuwangi. Mayoritas penduduk Desa Kedungrejo adalah nelayan karena wilayah ini langsung bersentuhan dengan pesisir laut kota Muncar. Kawasan ini adalah salah satu pusat perindustrian ikan di kota Muncar, yaitu industri yang berhubungan dengan hasil nelayan seperti industri pengalengan ikan, industri pakan ternak, industri minyak ikan, industri tepung ikan, *coolstorage* dan lain-lain

Lingkup temporal dalam penelitian ini diawali tahun 2000 dengan mempertimbangkan karena sejak tahun itu merupakan awal dimulainya Otonomi Daerah yang berimplikasi terhadap kebijakan sektor perikanan laut. Pemerintah berupaya mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya pada setiap daerah sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Sebelumnya kebijakan masih bersifat sentralistik, sehingga dalam pelaksanaan program pemerintah dilakukan secara merata dalam pengelolaan sumberdaya tanpa mengetahui kondisi serta potensi yang dimiliki di setiap daerah. Disisi lain dimulainya juga program pembangunan kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk membantu meletakkan landasan pembangunan

ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Sedangkan tahun 2015 dijadikan batas akhir dengan pertimbangan bahwa tahun tersebut merupakan akhir dari penelitian ini.

Ruang lingkup permasalahan yang mencangkup inti materi penulis batasi pada perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Lingkup materi dalam penelitian ini meliputi pembahasan mengenai kondisi masyarakat nelayan, faktor penyebab perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan, bentuk perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan, dan sikap masyarakat terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimana kondisi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi menjelang Tahun 2000?
2. apa sajakah faktor-faktor penyebab perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015?
3. bagaimana bentuk perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015?
4. bagaimana sikap masyarakat nelayan terhadap perubahan sosial ekonomi Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. untuk mengkaji kondisi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi menjelang Tahun 2000.
2. untuk mengkaji faktor-faktor penyebab perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015.
3. untuk mengkaji bentuk perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015.
4. untuk mengkaji sikap masyarakat nelayan terhadap perubahan sosial ekonomi Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait, antara lain:

1. bagi Mahasiswa, dapat menambah kontribusi dan tambahan wawasan sejarah maritim tentang perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
2. bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber inspirasi bagi pemerintah daerah atau pusat dalam mengembangkan masyarakat pesisir.
3. bagi masyarakat, dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
4. bagi peneliti lain, sebagai dorongan motivasi dan inovasi untuk melakukan penelitian yang sejenis.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini mengemukakan kajian tentang berbagai pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masyarakat nelayan, terutama yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan pada umumnya. Penulis telah mendapat beberapa penelitian terdahulu yang akan direview terkait dengan judul penelitian baik yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun yang tidak diterbitkan, misalnya berupa tesis, skripsi, laporan penelitian, dan sebagainya.

Susilo (2010) dalam karyanya berjudul "*Dinamika Struktur Sosial Dalam Ekosistem Pesisir*" merupakan disertasi yang semula berjudul "*Dinamika struktur dalam Ekosistem Pesisir: Kapasitas Ruang dan Titik kritis Struktur Sosial Masyarakat Nelayan di Dusun Karanggongso Kabupaten Trenggalek Jawa Timur (1950-2008)*". Buku ini menjelaskan tentang adanya interaksi sosial yang membentuk struktur sosial kelompok dalam masyarakat nelayan yang akan menentukan lebih lanjut bagaimana corak kelangsungan hidup kelompok itu, sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan yang dikenal dengan istilah proses sosial dalam masyarakat. Pada struktur sosial masyarakat pesisir berkaitan dengan status dan peranan masyarakat nelayan yang terbentuk dari hubungan produksi (termasuk pasar) pada usaha perikanan baik penangkapan ikan maupun budidaya, perubahan teknologi perikanan dan tingkatan sosial pada masyarakat pesisir, terjadinya konflik dalam masyarakat pesisir akibat adanya proses sosial yang bersifat asosiatif dan diasosiatif, kemiskinan masyarakat pesisir yang dapat dilihat berdasarkan ukurannya yang dibagi menjadi dua yaitu: kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, serta pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat. Kemudian dijelaskan pula tentang upaya pembangunan yang dilakukan kurang memperhatikan terhadap struktur sosial



masyarakat. Sebagai contoh, ketika upaya pemerintahan mengembangkan kelembagaan permodalan dan pemasaran hasil tangapan nelayan di kawasan pesisir dengan mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) telah meniadakan peran para patron yang selama ini menjadi pusat roda ekonomi di kawasan pesisir. Dengan demikian upaya membangun kelembagaan tersebut belum mampu berintegrasi terhadap struktur masyarakat lokal. Dari penjelasan di atas adanya struktur dalam masyarakat menjadi salah satu pendorong terjadinya perubahan tatanan kehidupan masyarakat nelayan.

Kelebihan dari penelitian Susilo terletak pada pembahasan tentang struktur sosial. Dalam penelitian menjelaskan secara rinci penyebab utama perubahan struktur sosial dalam masyarakat pesisir serta upaya pembangunan sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas ruang struktur sosial yang termasuk dalam pembahasan penelitian ini. Kelemahan dari penelitian ini adalah kurang menjelaskan proses perubahan yang terjadi serta dampaknya terhadap kondisi masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini akan lebih menjabarkan secara rinci kondisi, proses perubahan, serta dampak yang dirasakan masyarakat nelayan terhadap perubahan tersebut.

Mulyadi (2005) dalam bukunya yang berjudul “*Ekonomi Kelautan*” menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat nelayan yang berkaitan dengan perilaku ekonomi masyarakat nelayan dan pembangunan wilayah pesisir dan lautan. Mulyadi menjelaskan pada masyarakat nelayan, pola adaptasinya menyesuaikan dengan ekosistem lingkungan fisik laut dan lingkungan sosial disekitarnya. Perubahan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap sistem adaptasi manusia adalah perubahan lingkungan akibat bencana, sehingga manusia mengembangkan pola adaptasi yang berbentuk pola-pola tingkah laku yang salah satunya adalah perubahan strategi mata pencarian. Nelayan tidak hanya melaut mencari ikan akan tetapi berusaha mengelola hasil produksi dan memasarkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mengatasi kesulitan modal, masyarakat nelayan mengembangkan

suatu mekanisme sendiri seperti yaitu sistem modal bersama. Sistem ini memungkinkan terjadinya kerja sama diantara nelayan dalam penggandaan modal juga menunjukkan terjadinya pemerataan resiko karena kerugian besar yang dapat terjadi setiap saat, seperti perahu hilang atau rusaknya alat tangkap, akan menjadi tanggungan bersama. Disisi lain pemerintah juga berupaya dalam pembangunan wilayah pesisir dan lautan dapat dilihat dalam pengelolaan sumber daya dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan dan sasaran pembangunan wilayah pesisir dan laut ini secara umum, antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, pengembangan program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan dan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan, peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan dan peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan. Kelebihan dalam buku ini bahasan penting tentang perilaku ekonomi serta permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat nelayan, pembahasan tersebut sangat membantu dalam aspek sosial ekonomi penelitian ini. Kelemahan penjelasan dalam buku ini bersifat umum atau meluas dalam penjabarannya. Oleh karena itu penelitian ini akan lebih difokuskan pada kondisi masyarakat nelayan yang dilihat dari aspek sosial ekonominya.

Najib (2011) dalam buku "*Sistem Pembiayaan Nelayan*" menjelaskan permasalahan yang dihadapi nelayan dalam sistem modal pembiayaan nelayan. Najib merangkai benang merah antara kelembagaan ekonomi formal yang bersaing dengan ekonomi pembiayaan nelayan. Meskipun kebijakan telah dibuat untuk memajukan kehidupan nelayan, ketidak pahaman pemerintah terhadap masyarakat nelayan masih saja terjadi. Pemerintah telah menyadari bahwa sejauh ini belum ada sistem pembiayaan yang sesuai untuk sektor perikanan tangkap. Ketidakadaan sistem pembiayaan yang mapan tampaknya bersumber dari kesalahan dalam memahami masyarakat nelayan. Dijelaskan pula beberapa kesalahan diantaranya: kurang tepatnya dalam mengategorisasi masyarakat nelayan sehingga pengertian nelayan meliputi pula kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya bukan nelayan, dan

pemahaman yang menyamakan budaya ekonomi nelayan dan petani. Selain itu permasalahannya adalah sifat usaha perikanan tangkap tidak stabil, hasil tidak pasti, dan penuh spekulasi sehingga penghasilan tidak jelas dan teratur. Pada buku ini juga mencangkup salah satu aspek penting penulisan skripsi ini, mengenai faktor penyebab terjadinya perubahan dalam masyarakat akibat kebijakan pemerintah dalam modal usaha perikanan tangkap. Dibidang pembiayaan, setidaknya semenjak awal tahun 1970-an, berbagai program kredit telah di introduksikan pemerintah guna pengembangan sektor pertanian, usaha kecil, dan perikanan. Pada sektor perikanan perubahan penting penyaluran kredit untuk subsektor perikanan tangkap terjadi ketika banyak dibentuk organisasi sosial ekonomi dikalangan masyarakat, termasuk nelayan. Organisasi ini bertujuan melakukan perbaikan ekonomi, diantaranya melalui gerakan semacam koperasi. Dengan demikian peranan pemerintah juga mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir secara sistematis.

Tesis "*Dinamika Kebijakan Terhadap Nelayan Nelayan Tinjauan Historis Pada Nelayan Pantai Utara Jawa Tahun 1900-2000*" yang ditulis oleh Widodo menggambarkan kebijakan awal tentang perikanan pada Zaman Kolonial hingga masa ordebaru. Pada bidang kelautan dan perikanan utamanya kebijakan mulai mengarah pada ranah laut dari pada darat. Perkembangan usaha perikanan tangkap disebabkan oleh adanya perubahan corak permintaan sebagai akibat dari peningkatan penadapatan serta ditentukan oleh kebijakan politik. Selain itu untuk keberdayaan nelayan (sosial-ekonomi) dibuatnya aturan-aturan mengenai regulasi kemudian juga berimplikasi kuat terhadap berubahnya kondisi kelautan (ekologi) akibat adanya kebijakan politis (politik). Dengan demikian akan berdampak pada perubahan pola tatanan kehidupan masyarakat nelayan dalam segala bidang yaitu: dalam bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, dan bidang politik.

Pemahaman tentang implementasi kebijakan dapat lebih difokuskan pada pembentukan hukum bidang kelautan dan perikanan diantaranya terdapat pada karya Muchtar berjudul "*Dimensi Ekonomi Politik Pembentukan Hukum Dibidang Kelautan dan Perikanan: Kajian Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Muncar*

Kabupaten Banyuwangi” Menjelaskan dampak pembangunan terhadap perubahan Peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Mengingat UU. No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan termasuk aturan pelaksanaan yang pada umumnya berpihak pada kelompok tertentu yang punya akses dibidang permodalan yang dalam hal ini para pengusaha ikan. Masyarakat nelayan Muncar yang selama ini bergelut langsung disekitar pemburuan ikan ternyata tidak memiliki akses dalam proses pembentukan hukum yang berkaitan dengan usaha bidang perikanan baik yang menyangkut aspek ekonomi maupun politik. Sehingga masyarakat nelayan Muncar dalam menyampaikan kepentingannya yang dilakukan dengan memberi input pembentukan hukum dibidang perikanan adalah dengan cara unjuk rasa, demonstrasi dan tindakan destruktif lainnya. Pada skripsi ini terkait dengan penelitian yang membahas tentang kebijakan yang diterapkan pemerintah sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan terlibat sepenuhnya dalam mengelola sumber daya perikanan laut di wilayahnya. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 telah mengatur garis besar kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya pesisir dan laut yang ada diwilayahnya. Pelimpahan kewenangan (desentralisasi) ini menunjukkan keterbatasan pemerintah pusat dalam mengelola sumber daya perikanan secara nasional. Pemberlakuan otonomi daerah menjadi arena konflik karena salah paham mengartikannya. Hal ini tampak dengan adanya pengelolaan wilayah perairan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang pelaksanaanya dalam bentuk pengaplingan beberapa wilayah laut oleh masing-masing nelayan setempat yang dianggap sebagai suatu kepemilikan. Pengaplingan atas beberapa wilayah laut oleh nelayan menyebabkan terjadinya konflik ditengah-tengah laut. Berdasarkan hal tersebut adanya kebijakan yang telah ditetapkan memberikan gejolak besar terhadap perubahan pola kehidupan nelayan yang justru membuat adanya usaha-usaha masyarakat sendiri untuk merubah sistem yang ada agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Skripsi *“Pengaruh Modernisasi Sarana dan Prasarana Perikanan Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Puger Tahun 1985-1993”* memberikan pengetahuan kepada penulis tentang awal penerapan kebijakan modernisasi pada di era Orde Baru. Pada skripsi ini, menjadi acuan untuk memahami kebijakan pemerintah bidang kelautan dan perikanan sebelum tahun 2001, yakni sebelum era Reformasi. Disebutan bahwa modernisasi perikanan merupakan kebijakan masa Orde Baru yang dibuat pemerintah tahun 1970 dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). REPELITA I tahun 1968-1973, dan REPELITA II tahun 1973-1998 dengan tujuan peningkatan hasil produksi perikanan nasional. Pada masyarakat nelayan puger sendiri, modernisasi mendapat tanggapan positif. Hal ini dikarenakan secara sosial, modernisasi mampu membentuk integrasi dan memperluas komunikasi masyarakat luar lingkungannya sehingga kinerja nelayan dapat mengalami peningkatan. Secara ekonomi, pembaruan kapal, alat tangkap ikan, dan pemberian kredit modal kepada nelayan, dinilai dapat membantu kesejahteraan nelayan. Namun disisi lain, modernisasi perikanan dapat berakibat perebutan wilayah tangkap yang berada dalam kondisioverfishing (daya tangkap lebih), dan memperlebar jurang kesenjangan antara nelayan tradisonal dengan nelayan modern.

Skripsi *“Konflik Nelayan dalam Memanfaatkan Sumber Daya Perikanan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 1971-2000”* yang ditulis oleh Nugroho (2005) merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teori fungsionalisme yang bertumpu pada analogi dan organisme milik David Kaplan serta teori struktural konflik milik Lewis Coser. Skripsi ini berisi tentang konflik yang terjadi pada sumber perikanan masyarakat Desa Kedungrejo Muncar. Skripsi ini menjelaskan kebijakan modernisasi perikanan oleh pemerintah menyebabkan persaingan antar nelayan tradisional yang menggunakan jaring biasa tidak mampu bersaing dengan nelayan pengguna mini trawl, kondisi ini menyebabkan hasil tangkap nelayan tradisional juga menurun. Perubahan teknologi alat tangkap ikan membawa pengaruh besar terhadap kondisi sumber perikanan laut sehingga sebagian nelayan

mengalami lebih tangkap (*over fishing*) yang menyebabkan persaingan antar nelayan dalam merebutkan daerah tangkap ikan yang tinggi. Pelanggaran wilayah tangkap ikan oleh pengguna mini trawl yang beroperasi di wilayah pesisir dapat merusak alat tangkap nelayan. Meskipun penggunaan alat tangkap ini sudah dilarang keppres Nomor 39 tahun 1980, tetapi nelayan masih menggunakan mini trawl dan sering melanggar wilayah tangkapan nelayan tradisional. Kondisi ini dapat memicu konflik antar nelayan pengguna mini trawl dengan nelayan tradisional. Gejala sosial dalam masyarakat ini memicu adanya perubahan sistem dalam masyarakat nelayan sehingga masyarakat nelayan mendapat kesejahteraan sesuai dengan tujuan utama kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Pada skripsi ini menjelaskan konflik yang terjadi pada masyarakat muncar setelah diterapkannya kebijakan oleh pemerintah daerah, sehingga peneliti menjadikan sumber tambahan terkait dengan faktor pendorong adanya perubahan pada masyarakat nelayan.

Skripsi "*Peranan Koperasi Mina Blambangan Terhadap Perkembangan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 1975-2011*" yang ditulis oleh Subagiyo menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat nelayan Muncar. Skripsi ini menjelaskan lembaga ekonomi KUD Mina Blambangan sebagai salah satu lembaga keuangan yang di kelola oleh pemerintah desa khusus untuk perikanan Muncar. Setelah adanya kebijakan otonomi daerah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan sumber daya, pemerintah daerah berusaha meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan membangun berbagai fasilitas yang menunjang salah satunya lembaga keuangan. Koperasi Mina berperan dalam bantuan dana dan pemodalan berupa kredit lunak untuk biaya melaut maupun untuk permodalan barang melaut salah satunya permodalan berupa jaring *purse seine* mulai tahun 1975. Koperasi Mina juga memiliki andil dalam penyelesaian konflik tahun 1975 yang dilatar belakangi modernisasi perikanan utamanya modernisasi bidang alat tangkap berupa jaring *purse seine*, konflik nelayan Muncar dengan nelayan Bali dilatar belakangi permasalahan penangkapan ikan di daerah pengambang tahun 1986, konflik nelayan andon tahun

1990-2004 sampai pembakaran kapal nelayan andon tahun 2006. Dengan demikian peneliti mengambil skripsi ini terkait dengan pembahasan mengenai kondisi sosial ekonomi tentang tingkat pendapatan dan permodalan masyarakat nelayan muncar sebelum adanya kebijakan serta setelah diterapkannya kebijakan pemeberdayaan nelayan.

Berdasarkan kajian penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu masih memfokuskan penelitian pada permasalahan yang dihadapi nelayan, adanya kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, pengelolaan sumberdaya alam serta konflik yang dihadapi nelayan akibat adanya kebijakan pemerintah di beberapa daerah serta belum ada yang melakukan analisis mengenai perubahan tatanan kehidupan masyarakat nelayan. Oleh sebab itu penulis tertarik meneliti perubahan kehidupan masyarakat nelayan dilihat dari segi sosial ekonominya dengan judul penelitian Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologi Ekonomi. Pendekatan sosiologi ekonomi ini dapat digunakan sebagai dasar pedoman untuk memecahkan permasalahan yang dikaji. Konsep ini diperkenalkan oleh N.J Smelser yang menyebutkan bahwa untuk memahami dan menganalisis tentang suatu aspek kehidupan sosial tidak dapat mengabaikan peranan ekonomi dari kehidupan sosial yang mempengaruhi ekonomi, dan sebaliknya aspek-aspek non-ekonomi dari kehidupan sosial juga mempengaruhi ekonomi itu sendiri (Smelser dalam Saebani, 2016:127). Pendekatan sosiologi ekonomi pada dasarnya menggunakan kerangka dasar sosiologi untuk mengkaji perubahan sosial dan perubahan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Adanya usaha-usaha dalam masyarakat mendorong terjadinya proses sosial sehingga terjadi suatu interaksi sosial yang menimbulkan dampak sosial ekonomi dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis mengenai tingkah laku individu atau kelompok masyarakat yang melakukan interaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Perubahan dalam masyarakat nelayan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang berpengaruh

terhadap proses terjadinya perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pendekatan ini dianggap mampu menggambarkan terjadinya suatu interaksi sosial yang berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat nelayan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori modernisasi. Modernisasi merupakan suatu bentuk transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern atau lebih maju. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik dan budaya (Smellser dalam Stompka, 2005:149-150). Masyarakat tidak dipandang sebagai suatu hal yang berdiri sendiri, tetapi sebagai suatu keseluruhan dalam suatu sistem masyarakat seperti halnya nelayan di Desa Kedungrejo dalam pemenuhan kehidupannya selalu melakukan aktifitas yang dipandang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Modernisasi memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut (Suwarsono dan Alvin,1994:21-23):

1. Modernisasi merupakan proses bertahap. Masyarakat yang semula berada dalam tatanan yang primitif dan sederhana menuju dan berakhir pada tatanan yang maju dan kompleks;
2. Modernisasi juga dikatakan sebagai proses homogenisasi. Dengan modernisasi akan terbentuk berbagai masyarakat dengan tendensi dan struktur serupa;
3. Modernisasi terkadang mewujud dalam bentuk lainnya, sebagai proses Eropanisasi dan Amerikanisasi, atau yang lebih dikenal dengan istilah bahwa modernisasi sama dengan Barat;
4. Modernisasi juga terlihat sebagai proses yang tidak dapat bergerak mundur;
5. Modernisasi merupakan perubahan progresif;
6. Modernisasi memerlukan waktu panjang.

Penelitian menggunakan teori modernisasi karena secara garis besar perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri. Faktor yang berasal dari dalam masyarakat



seperti perubahan pada kondisi sosial ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun faktor yang menyebabkan perubahan dari luar masyarakat biasanya adalah adanya hal yang terjadi diluar perencanaan manusia.

Berkaitan dengan teori diatas, sebagai landasan untuk melakukan penelitian tentang perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan dengan berbagai faktor pendorong terjadinya perubahan secara intern dan ekstern. Perubahan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan semata-mata untuk pemenuhan kebutuhannya. Masyarakat nelayan Desa Kedungrejo berusaha meningkatkan taraf hidupnya agar mendapatkan posisi atau status sosial yang lebih tinggi dan terpendang dilingkungan masyarakatnya. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soekanto, 2013:213). Sehingga sebagai suatu sistem masyarakat terikat dan terbatas dalam pemenuhan kebutuhannya. Jika salah satu sistem mengalami 'ketidakberesan', maka fungsi dari bagian yang lain juga akan terganggu. Dengan demikian jika salah satu fungsi dan peran tidak berjalan baik, maka akan sangat mengganggu akan kehidupan sebuah masyarakat. Terbentuknya sebuah tatanan masyarakat dengan keunikan tersendiri yang nantinya akan mengalami perubahan secara kompleks. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori modernisasi, karena teori modernisasi cocok digunakan untuk menganalisis Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

### BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menganalisis, mengkaji kebenaran, dan menguji keabsahan data yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah ini digunakan karenasesuai dengan bidang kajian yang sedang diteliti. Dilihat dari sumber datanya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk meneliti hal-hal mengenai perubahan kehidupan masyarakat nelayan. Peneliti ingin mengetahui dan menganalisis tentang *Perubahan Sosial Ekonomi* dalam masyarakat nelayan desa Kedungrejo di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Metode penelitian sejarah merupakan usaha memberikan interpretasi terhadap peristiwa masa lampau untuk memperoleh generalisasi yang berguna dalam memahami kenyataan sejarah yang dilakukan secara kritis dengan menimbang secara teliti keterangan yang diperoleh. Metode sejarah menurut Sjamsuddin (2007:85) terdiri dari tahap Heuristik: Pengumpulan Sumber, Kritik: Ekstern & Intern, dan Penulisan Sejarah: Historiografi, Penafsiran, Penjelasan, Penyajian. Sedangkan menurut Gottschalk (1986:32) metode penelitian sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses yang dinamakan historiografi

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah prosedur kerja sejarawan untuk menguji dan menganalisis sumber-sumber sejarah yang berupa rekaman dari peninggalan masa lampau secara logis, kritis, dan kronologis, kemudian disajikan menjadi kisah sejarah. Metode penelitian sejarah meliputi langkah-langkah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

### 1. Heuristik

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu heuristik. Pada tahap ini peneliti berupaya mencari dan menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan desa Kedungrejo. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan dan observasi lapangan. Data yang diperlukan peneliti diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang akan dikaji dengan cara menanyakan secara langsung kepada narasumber sesuai arah atau tujuan yang telah ditentukan (Kuntowijoyo, 1980:24). Pelaksanaan wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai pegangan peneliti agar informasi yang diperoleh tetap terarah pada fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, teknik pemilihan informan yang digunakan dengan cara Purposive (dipilih menurut tujuan) dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hasan Basri selaku Ketua HNSI (*Himpunan Nelayan seluruh Indonesia*) untuk wilayah di Banyuwangi, Bapak Dayat selaku anggota Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi, Bu Fikri selaku anggota Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi, Bapak Abdurakhman selaku Kepala Desa Kedungrejo Muncar, Bapak Sudarsono selaku anggota Desa Kedungrejo, Bapak Abidin selaku Pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan Muncar, Bu Tatik selaku anggota Dinas Kelautan dan Perikanan Muncar, Bu Setyorini selaku pengawas Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Bapak Amuni selaku Ketua KUD Mina Blambangan, Bapak Samhlan selaku Kepala Dusun Desa Muncar, Bapak Saham selaku Kepala Dusun Kalimati, Bapak Moh. Antony selaku Kepala Dusun Sampangan, Bapak Samsul Arifin selaku Kepala Dusun Stoplas, Bapak Sudirman selaku Tokoh Pemuda Muncar dan masyarakat nelayan di Desa Kedungrejo.

Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung. Peneliti dalam hal ini terjun langsung ke lapangan melakukan observasi terhadap perilaku dan gejala-gejala obyek yang diteliti yakni “*Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo*”. Peneliti mencatat hasil observasi tersebut dalam bentuk catatan lapang yang akan berguna sebagai pelengkap dokumentasi. Observasi ini peneliti lakukan disertai data juga dilengkapi dengan terjun langsung kepada *kehidupan masyarakat nelayan desa Kedungrejo Muncar dilihat dari aspek sosial ekonomi*. Kegiatan observasi bertujuan memudahkan peneliti untuk mendapatkan sumber otentik dan membantu menjawab permasalahan yang akan dikaji.

Studi pustaka dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data-data atau informasi penunjang baik dari buku, koran, majalah, dan lain-lain sesuai dengan masalah yang akan dikaji. Dokumen merupakan segala sesuatu dalam bentuk tulisan maupun tidak tulisan yang dapat memberikan keterangan tentang masa lampau berupa informasi, sehingga ada ungkapan yang berbunyi *no document no history* (Sugiyanto, 1996:17). Dengan studi kepustakaan ini peneliti memperoleh sumber penunjang seperti buku-buku, arsip daerah, laporan penelitian, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan permasalahan mengenai perubahan masyarakat nelayan desa Kedungrejo kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Dari berbagai sumber yang diperoleh, peneliti membagi sumber-sumber tersebut menjadi dua meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penelitian ini berupa hasil observasi dan wawancara kepada Hasan Basri, Abdurakhman, Samhlan, Abidin, Sudirman, Samsul arifin sebagai informan pendukung atau tokoh masyarakat yang memahami kondisi masyarakat nelayan desa Kedungrejo. Dikatakan sebagai sumber primer karena para narasumber merupakan orang yang hidup sejaman, hadir secara langsung, dan bertindak sebagai pelaku atau bisa dikatakan sebagai saksi kehidupan masyarakat nelayan Kedungrejo (Gottschalk, 1986:35). Sumber sekunder peneliti ini berupa studi kepustakaan terkait materi yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat nelayan, seperti buku karya Edi Susilo

(2010) berjudul "*Dinamika Struktur Sosial Dalam Ekosistem Pesisir*", karya Arif Satria (2015) berjudul "*Sosiologi Masyarakat Pesisir*", Mulyadi (2005) berjudul "*Ekonomi Kelautan*" karya, Aprindar (2011) berjudul "*Ekonomi Kelautan dan Pesisir*", Victor P.H Nikijuluw (2002) berjudul "*Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*", Singgih Tri Sulistiyono (2004) berjudul "*Pengantar Sejarah Maritim Indonesia*", Amanah (2014) berjudul "*Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan Keunikan Agroekosistem dan Daya Saing*", Kingseng berjudul (2014) "*Konflik Nelayan*", Kusnadi (2002) berjudul "*Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Perikanan*", Najib (2013) berjudul "*Sistem Pembiayaan Nelayan*", adapun penelitian Kusnadi (2014) berjudul "*Kebudayaan Masyarakat Nelayan*", Setyaningrum (2014) berjudul "*Pengembangan Perikanan Tangkap Berbasis Lemuru Di Perairan Muncar Kabupaten Banyuwangi*", Muchtar (2000) berjudul "*Dimensi Ekonomi Politik Hukum Bidang Kelautan Dan Perikanan (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Kecamatan Muncar*", Nugroho berjudul "*Konflik Nelayan Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Perikanan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*", Rahman (2009) berjudul "*Dinamika Otonomi Daerah Tahun 1945-2008*". Dikatakan sebagai sumber sekunder karena peneliti memperoleh informasi atau sumber dari kesaksian orang yang tidak bertindak secara langsung (Gottschalk, 1986:35). Sumber yang diperoleh peneliti dari: UPT Perpustakaan Jember, Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah, Perpustakaan Daerah Banyuwangi, Perpustakaan online milik perpustakaan UNS (Universitas Sebelas Maret), UNDIP (Universitas Diponegoro), Universitas Brawijaya Malang, serta Universitas 17 Agustus Banyuwangi.

## 2. Kritik

Langkah kedua dalam penelitian sejarah adalah melakukan kritik. Kritik yaitu langkah peneliti dalam menguji dan menyeleksi sumber-sumber sejarah. Kritik digunakan sebagai usaha untuk mempertimbangkan apakah suatu sumber atau data yang diproses benar-benar otentik atau tidak (Widja, 1998:21). Langkah kritik ini

bertujuan untuk menyeleksi data sebagai fakta. Kritik sumber dalam penelitian ini terdiri atas dua tahap yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

Pada tahap kritik ekstern peneliti mencari keaslian sumber yang telah diperoleh. Kritik ekstern bertujuan mengetahui keterkaitan antara sumber yang diperoleh dengan masalah yang dikaji. Kritik ekstern yang dilakukan peneliti untuk sumber wawancara berkaitan dengan apakah narasumber mengatakan kesaksian tentang perubahan masyarakat nelayan Kedungrejo, dan apakah narasumber merupakan orang yang berkompeten dalam bidang perikanan dan mengetahui fakta yang sebenarnya. Kritik ekstern untuk sumber dokumen berkaitan dengan tingkat keaslian sumber dengan cara melihat seberapa jauh keterlibatan pengarang buku dengan kajian mengenai kehidupan masyarakat nelayan, agar keterangan yang diperoleh dari sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan apakah terjadi penambahan atau perubahan fakta asli oleh penulis buku-buku atau juga subyektivitas.

Setelah melakukan kritik ekstern tahap kedua yaitu kritik intern, peneliti akan menilai apakah sumber atau kesaksian yang diperoleh memiliki kreadibilitas (kebenaran isi) atau tidak. Kritik intern yang dilakukan peneliti untuk wawancara berkaitan dengan menilai apakah informasi yang disampaikan adalah fakta dan membandingkan informasi yang diperoleh dari narasumber satu dengan narasumber lainnya sehingga dapat ditemukan jawaban yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji serta bisa dipercaya kebenarannya. Kritik ekstern untuk dokumen atau buku dengan cara memahami maksud dari kesaksian pengarang buku sehingga peneliti mengetahui maksud dari pengarang. Kritik intern bertujuan menyaring kualitas informasi yang bisa didapat dari jejak atau sumber sejarah dengan membandingkan kesaksian berbagai sumber, diman kesaksian dari berbagai sumber dipaparkan dan saling dicek secara silang (Widja, 1991:27).

### 3. Interpretasi

Langkah ketiga dalam penelitian sejarah adalah interpretasi. Interpretasi dilakukan karena berbagai fakta yang telah ditemukan dalam kegiatan kritik ekstern dan kritik intern masih terpisah atau berdiri sendiri. Oleh karena itu pada interpretasi

peneliti berusaha merangkai fakta-fakta yang mempunyai kesesuaian satu sama lain sehingga dapat menjadi sebuah cerita yang memiliki kesesuaian dengan peristiwa yang terjadi. Menurut Kuntowijoyo (2003: 100-101) terdapat dua macam interpretasi yaitu analisis dan sintesis. Analisis yaitu menguraikan data-data yang telah diperoleh, sedangkan sintesis yaitu menyatukan data-data tersebut sehingga ditemukan fakta. Fakta tersebut kemudian dirangkai dan dihubungkan antara satu dengan yang lain secara kronologis sehingga menjadi kesatuan cerita yang sistematis, logis, rasional, menarik dan menjadi informasi yang mudah dimengerti.

Interpretasi merupakan aktivitas merangkai dan menghubungkan atau mengkaitkan fakta-fakta sejarah dengan berusaha subyektif mungkin sehingga dapat mengungkapkan kehidupan masyarakat masa lampau beserta segala aktivitasnya secara faktual, rasional, kronologis dan logis. Pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran terhadap *Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo* Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan menghubungkan makna dari fakta-fakta yang kemudian dirangkai dan saling dihubungkan secara kronologis, sehingga menjadi satu kesatuan yang sistimatis dan logis. Peneliti menggabungkan fakta-fakta sejarah dari hasil wawancara, observasi dan studi kepustakaan serta berbagai buku penunjang yang terkait dengan *perubahan kehidupan masyarakat nelayan*. Secara kronologis, diperoleh kisah sejarah yang sesuai dengan realitas aspek sebagai berikut: (1) kondisi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo; (2) faktor penyebab terjadinya perubahan masyarakat nelayan Desa Kedungrejo; (3) bentuk perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo; (4) sikap masyarakat nelayan terhadap erubahan sosial ekonomi di Desa Kedungrejo.

#### 4. Historiografi

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi, dalam tahap ini peneliti berperan untuk merekonstruksi tulisan secara analitis, kronologis, dan sistematis cerita dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh melalui langkah-langkah penelitian sebelumnya (Gottschalk, 1986:32). Penyajian hasil penelitian ini

dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan sistematika penulisan terdiri atas delapan bab.

Bab 1 Pendahuluan memaparkan latar belakang yang berisi alasan kenapa peneliti ingin mengambil judul terkait, ruang lingkup penelitian yang digunakan sebagai batasan supaya bahasan menjadi fokus dan efektif, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab 2 Tinjauan Pustaka memaparkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh para ahli berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan desa Kedungrejo kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi yang dikemukakan dalam kajian teori serta pendekatan yang digunakan oleh peneliti. Selain itu terdapat sumber penunjang baik yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, laporan penelitian maupun dalam bentuk skripsi. Bab 3 Metode Penelitian memaparkan tentang tata cara memperoleh data, menganalisis data dan merekonstruksi fakta-fakta sejarah. Peneliti menggunakan Metode penelitian sejarah yang didalamnya terdapat empat tahap yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik, interpretasi (penafsiran), dan historiografi (Penyajian).

Deskripsi hasil penelitian diuraikan dalam bab 4, bab 5, bab 6 dan bab 7. Pada Bab 4 memaparkan tentang kondisi geografis, demografis, dan sosial ekonomimasyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi menjelang tahun 2000. Pada bab ini dijelaskan kondisi masyarakat nelayan desa Kedungrejo sebelum dibentuknya hukum di bidang kelautan dan perikanan oleh pemerintah. Serta kondisi masyarakat nelayan desa Kedungrejo setelah diterapkan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bab 5 memaparkan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Perubahan dalam kehidupan nelayan Desa Kedungrejo disebabkan faktor internal dan faktor eksternal, salah satunya disebabkan karena adanya peraturan pemerintah yang menetapkan kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap terjadinya perubahan tersebut. Selain itu aktivitas nelayan dengan



penggunaan alat tangkap ikan, cara produksi hasil tangkapan ikan yang berkembang serta modal usaha perikanan tangkap juga mempengaruhi perubahan kondisi kehidupan nelayan Desa Kedungrejo.

Bab 6 memaparkan tentang bentuk perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Perubahan yang terjadi pada masyarakat nelayan Desa Kedungrejo dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, yaitu struktur masyarakatnya, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan, kondisi tempat tinggal serta fasilitas penunjang dalam bentuk sarana dan prasarana bagi masyarakat nelayan Kedungrejo. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak lepas dari permasalahan yang terjadi pada nelayan. Adanya konflik antar nelayan, perbedaan argumentasi/pendapat merupakan bagian dalam proses perubahan sosial ekonomi masyarakatnya.

Bab 7 memaparkan tentang sikap masyarakat nelayan terhadap perubahan sosial ekonomi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Nelayan Desa Kedungrejo awalnya menolak adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat hal ini disebabkan masyarakat nelayan beranggapan mampu untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus terikat dengan program dari pemerintah daerah. Akan tetapi dengan adanya penyuluhan serta pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman tentang upaya pengelolaan sumberdaya alam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam program-program yang dilaksanakan pemerintah. Selanjutnya, dibagian akhir berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diuraikan dalam Bab 8.

**BAB 5. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERUBAHAN SOSIAL  
EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DESA KEDUNGREJO  
KECAMATAN  
MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2000-2015**

Perubahan masyarakat pada umumnya dapat terjadi dengan sendirinya secara wajar dan teratur, terutama apabila perubahan itu sesuai dengan pertumbuhan kepentingan masyarakat. Jika tidak masyarakat akan tertutup terhadap perubahan karena khawatir atau takut kalau stabilitas kehidupan masyarakatnya akan terganggu akibat perubahan itu. Akan tetapi pada kondisi tertentu perubahan tidak bisa dihindari terutama jika keadaan sekarang dianggap tidak memiliki kemajuan atau tidak memuaskan lagi. Terjadinya ketidakpuasan terhadap keadaan sekarang disebabkan oleh nilai-nilai, norma-norma sosial, pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat atau karena tidak mampu memenuhi berbagai kepentingan yang semakin kompleks dan serba tidak terbatas. Kondisi demikian akan menuntut masyarakat untuk berubah, masyarakat akan mencari jalan keluar dari berbagai kesulitan dengan cara mengganti nilai-nilai, norma-norma, pengetahuan dan teknologi lama menjadi nilai-nilai, norma-norma, pengetahuan dan teknologi baru yang dianggap dapat memenuhi tuntutan hidup sekarang dan masa depan keturunannya. Peluang menuju arah perubahan akan semakin besar dikala lingkungan masyarakat sekitar menawarkan berbagai metode dan teknologi atau sasaran baru (faktor ekstern) yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa mendatang (Syani, 1995:88-89).

Adapun terjadinya perubahan masyarakat dapat disebabkan oleh terganggunya keseimbangan atau tidak adanya sinkronisasi dalam masyarakat itu sendiri (faktor intern). Terganggunya keseimbangan atau tidak adanya sinkronisasi dalam



masyarakat mengakibatkan ketegangan-ketegangan dalam tubuh masyarakat. Pada kondisi semacam ini, perlu diketahui faktor yang dominan sebagai penyebab terjadinya gangguan terhadap keseimbangan dan sinkronisasi masyarakat itu (Susanto, 1999:158).

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat nelayan di Desa Kedungrejo disebabkan oleh faktor intern dan faktor ekstern. Perubahan ini terjadi karena adanya suatu keinginan masyarakat untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat nelayan sangat bergantung hidupnya terhadap tangkapan laut, hasil pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti pemenuhan kebutuhan sekolah anak dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini mendorong masyarakat nelayan Kedungrejo menghendaki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Adapun faktor intern dan ekstern yang mendorong perubahan kehidupan masyarakat nelayan Desa Kedungrejo sebagai berikut.

## **5.1 Faktor Internal**

### **5.1.1 Pertumbuhan Penduduk**

Perubahan masyarakat yang disebabkan oleh faktor pertumbuhan penduduk antara lain: angka kematian (mortalitas), kelahiran (fertilitas), dan migrasi penduduk. Sejak tahun 2005 masyarakat Desa Kedungrejo mengalami penambahan penduduk karena kedatangan nelayan pendatang dari luar kota Muncar seperti Probolinggo, Pasuruan, Bondowoso dan Madura, hal ini disebabkan karena potensi sumber daya alam khususnya perikanan yang melimpah di Desa Kedungrejo. Hampir sekitar 60% penduduk Desa Kedungrejo adalah nelayan pendatang, nelayan ini terkadang hanya singgah sementara tetapi ada juga yang menetap disepanjang pinggir pantai Kedungrejo Muncar. Nelayan pendatang adalah buruh yang ikut sanak saudara untuk bekerja, dan ketika sudah lama bekerja akan membawa anggota keluarga yang lain untuk ikut bekerja atau menetap. Adanya penambahan penduduk ini memberikan pengaruh yang besar, seperti dalam lingkungan tempat tinggal banyak rumah-rumah

singgah disepanjang pesisir Desa Kedungrejo karena jumlah penduduk yang padat sehingga rumah penduduk saling berhimpitan dan tidak jarang nelayan membuat pemukiman disekitar pesisir pantai (lihat tabel 5.1)

Tabel 5.1 Data Jumlah Penduduk Desa Kedungrejo Tahun 2005-2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah	Presentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	2005	13.199	12.875	26.074	9,62
2	2006	12.727	14.345	27.072	9,99
3	2007	13.037	12.845	25.882	9,55
4	2008	13.094	12.855	25.949	9,60
5	2009	12.814	13.289	26.103	9,66
6	2010	13.875	13.404	27.279	10,07
7	2011	13.142	12.853	25.995	9,60
8	2012	13.748	12.853	26.601	9,82
9	2013	13.956	13.451	27.407	10,12
10	2014	15.005	13.481	28.486	10,51
11	2015	16.267	13.746	30.013	11,08
Jumlah		153.864	152.296	270.912	100

*Sumber: Data BPS Banyuwangi 2005-2015*

Pertumbuhan penduduk yang disebabkan tingkat kelahiran tinggi berjumlah sekitar 10%-15% pertahun. Masyarakat nelayan Desa Kedungrejo banyak yang menikah dini. Penyebabnya adalah faktor lingkungan yang mayoritas penduduknya adalah suku Madura. Masyarakat Madura di Desa Kedungrejo adalah masyarakat yang agamis (taat pada ajaran agama), sehingga jika anaknya sudah tertarik dengan lawan jenis dan menurut keluarga cocok langsung menikah supaya tidak timbul finah dari para tetangga atau sanak saudara. Semakin tinggi tingkat kelahiran maka akan

membuat beban ketergantungan hidup semakin meningkat. Sedangkan angka kematian sangat rendah, karena masyarakat nelayan Desa Kedungrejo sangat tinggi konsumsi ikan lautnya sehingga memiliki kebutuhan gizi yang cukup. Selain itu masyarakatnya juga bersifat konsumtif yang peka dengan kondisi sekitar (wawancara dengan Sudirman, tanggal 14 September 2016).

Adanya pertumbuhan penduduk tiap tahun membuat masyarakat nelayan harus bekerja keras memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini membuat perubahan dalam masyarakat di bidang ekonomi, masyarakat nelayan tidak lagi hanya bekerja sebagai nelayan akan tetapi bekerja sambilan untuk menyambung hidup, karena kondisi hasil laut yang tidak menentu dan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Adanya penambahan penduduk ini menimbulkan daya saing tersendiri dalam masyarakat, masyarakat nelayan berlomba-lomba mendapatkan penghasilan yang tinggi dengan cara mengoptimalkan hasil tangkapan yang berdampak pada perusakan pengembangbiakan ikan dengan melaut sepanjang waktu. Adanya penambahan penduduk dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat disebabkan bertambahnya jumlah angkatan kerja (pencari kerja), meningkatnya kebutuhan hidup, dan rendahnya kemampuan kerja secara teknis. Sehingga mendorong terjadinya perubahan-perubahan tata kehidupan masyarakat, terutama perubahan terhadap pola perilaku, kepentingan baru dan nilai ekonomis baru. Sedangkan perubahan dalam jangka pendek, pertumbuhan lapangan kerja cenderung tidak mampu mengimbangi cepatnya pertumbuhan penduduk yang dapat membawa perubahan-perubahan terhadap pola-pola kehidupan yang baru.

## **5.2 Faktor Eksternal**

### **5.2.1 Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sejak adanya modernisasi perikanan (revolusi biru) di tahun 1970. Hasil dari kebijakan modernisasi perikanan diantaranya berupa pemakaian peralatan tangkap modern untuk meningkatkan daya tangkap ikan nelayan. Kebijakan tersebut tidak begitu saja ditinggalkan tapi berlanjut

hingga masa reformasi. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1960 yang disempurnakan menjadi UU No. 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, sumber daya pesisir dikelola pemerintah pusat. Selain itu UU No. 5 Tahun 1974 hanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya di darat saja, sehingga Pemerintah Daerah belum mempunyai kewenangan dilaut dan masyarakat pesisir hanya mendapatkan sebagian kecil dari hasil ekonomi penangkapan ikan.

Pada pengelolaan sumber daya pemerintah pusat mengalami beberapa kendala terkait peningkatan pendapatan serta pemberdayaan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan potensi sumber daya setiap daerah berbeda sehingga dalam pengelolaannya perlu dioptimalkan sesuai potensi yang dimiliki di setiap daerah. Untuk meningkatkan hasil pendapatan daerah, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang secara jelas menyatakan bahwa pelaksana pemerintah otonomi di daerah adalah tingkat Kabupaten/ Kota Madya. Peraturan pemerintah mengenai kewenangan yang diartikan dalam kewenangan pemerintahan oleh pusat, provinsi dan Kabupaten/ Kota Madya telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000. Secara umum, beberapa prinsip yang harus dipegang oleh semua pihak dalam pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 ini adalah pertama, otonomi Daerah harus dilaksanakan dalam konteks Negara kesatuan; kedua, pelaksanaan otonomi Daerah menggunakan tata cara desentralisasi, dengan demikian peran daerah sangat menentukan. UU No. 22 Tahun 1999 menekankan tiga faktor yang mendasar yaitu:

1. memberdayakan Masyarakat;
2. menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas;
3. pembangunan daerah.

Kebijakan maritim yang dilaksanakan di wilayah perairan Indonesia tidak terlepas dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan direktorat kementerian kelautan dan perikanan. Sejak tahun 2001 tepatnya, kebijakan di bidang kelautan dan perikanan mengalami keberlanjutan dengan tujuan yang lebih kompleks, yakni meningkatkan pendapatan nasional melalui pemberdayaan masyarakat pesisir dengan

memperhatikan kelestarian sumber daya hayati. Berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi direktorat masing-masing sub, maka dapat dilihat garis besar perkembangan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dari tahun 2001-2012, sebagai berikut.

Tabel 5.2 Garis Besar Perkembangan Kebijakan Kelautan dan Perikanan Nasional 2001-2012

NO	Kebijakan Nasional	Pelaksana/ Direktorat	Program	Tujuan	Tahun Pelaksa naan
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Masyarakat Pesisir Lainnya</li> </ul>	Dirjen Pemberday aan Masyarakat Pesisir	Pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya Pengembangan usaha dan nilai tambah Peningkatan kapasitas usaha dan investasi	Pembenahan rantai permodalan nelayan sehingga mampu hidup secara layak Peningkatan sosial ekonomi nelayan berdasarkan asas ekonomi kerakyatan	2001-2004
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Lainnya</li> <li>• Pengelolaan dan pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Konservasi dan Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen KP3K</li> <li>• Ditjen PT</li> <li>• Ditjen PB</li> <li>• Ditjen P2HP</li> <li>• Ditjen PPSDKP</li> </ul>	Program Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Lainnya	Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya	2005-2009



NO	Kebijakan Nasional	Pelaksana/ Direktorat	Program	Tujuan	Tahun Pelaksanaan
3	Sumberdaya Kelautan dan Perikanan • Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil • Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan • Fasilitas Pengembangan Industri Pengolahan • Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	• Ditjen Perikanan Tangkap (PT) • Ditjen PB • Ditjen PPSDKP	• Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap • Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya • Peningkatan daya saing produk perikanan	Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya	2010-2012

*Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan, "Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan 2001-2012.*

Berdasarkan tabel tersebut, kebijakan kelautan dan perikanan yang diterapkan bagi masyarakat pesisir terbagi menjadi beberapa periode yakni 2001-2004, 2005-2009, 2010-2012. Peraturan atau regulasi dibentuk berdasarkan prinsip keberlanjutan dan prinsip pengembangan, sehingga saling terjadi sinkronisasi antara kebijakan sebelum dan sesudahnya. Pada periode 2001-2004, kebijakan pemerintah pusat terkait kelautan diutamakan pada program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), yang tujuannya meningkatkan sosial ekonomi nelayan. Periode 2005-2009, regulasi kelautan dan

perikanan yang dilimpahkan pada Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Pembudidayaan Ikan, serta dirjen terkait lainnya, memusatkan kebijakan kelautan pada keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan juga dianggap penting untuk menjaga ekosistem laut dan meningkatkan sosial ekonomi nelayan. Periode 2010-2012, kebijakan kelautan dan perikanan yang diterapkan oleh pemerintah pusat tidak mengalami perubahan secara total, yakni tetap melanjutkan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan di daerah-daerah pesisir tidak terkecuali di pesisir Muncar, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Kebijakan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2001-2004

Program pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2001-2004 disusun berdasarkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai serta kebijakan dan strategi yang dilakukan yang mengacu pada Program Pembangunan Nasional Propenas dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999. arena adanya keterbatasan sumber daya, dalam jangka pendek program ini diprioritaskan untuk membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi yang disertai dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang sebagian besar berada pada masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petani ikan. Namun demikian bukan berarti masalah-masalah lainnya diabaikan seperti misalnya: pelestarian lingkungan, pengendalian pemanfaatan ruang dan SDKP, pengembangan teknologi, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur negara dengan tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masing-masing daerah pesisir. Dalam jangka menengah dilaksanakan pula program pembangunan kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk membantu meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka program pembangunan kelautan dan perikanan dibagi menjadi 5 program yang saling terkait, yaitu: (1) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Masyarakat Pesisir lainnya dengan sasaran program adalah peningkatan kegiatan ekonomi

produktif yang terkait langsung dengan kehidupan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya, serta pulau-pulau kecil yang masih miskin.; (2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan sesuai Kemampuan Lestari Sumber Daya Ikan (SDI) dan Daya Dukung Lingkungan dengan sasaran program adalah meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan kawasan laut, pesisir, pulau-pulau kecil, dan perairan tawar, sehingga dapat menunjang pembangunan perikanan tangkap, budidaya, pariwisata bahari, dan kegiatan kelautan bidang lainnya secara berkelanjutan.; (3) Peningkatan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Kawasan Laut, Pesisir, Pulau-pulau Kecil, dan Perairan Tawar dengan sasaran program adalah terwujudnya ketersediaan teknologi untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, data dan informasi mengenai potensi kelautan dan perikanan untuk menunjang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menunjang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya.; (4) Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur, dan Penguatan Kelembagaan dengan sasaran program adalah meningkatkan kualitas SDM aparatur pusat dan daerah, tersedianya sarana dan prasarana aparatur, berdaya institusi lokal, pemerintah dan dunia usaha, terwujudnya pelayanan publik, serta direvisi dan disusunnya undang-undang bidang kelautan dan perikanan, yang menunjang optimalisasi kinerja aparatur dan kapasitas kelembagaan.; (5) Penyerasian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan Otonomi Daerah dengan sasaran program adalah Keberhasilan program-program DKP di daerah sangat tergantung dari kondisi lapangan yang kondusif dalam menyikapi otonomi daerah masing-masing pihak dan mengaplikasikannya secara tepat, bersinergi dan harmonis.

## 2. Kebijakan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2005-2009

Program pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia tahun 2005-2009 disusun berdasarkan kelanjutan pengembangan kebijakan sebelumnya, dengan tetap

mendasar pada Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999. Kebijakan kelautan dan perikanan periode 2005-2009 bertujuan untuk mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab bagi kesatuan dan kesejahteraan anak bangsa (Departemen Kelautan dan Perikanan 2005-2009).

Berdasarkan tujuan tersebut, maka program kemaritiman yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan yang memiliki tujuan program adalah meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya. Sasaran program adalah meningkatnya usaha dan kualitas sumber daya manusia; (2) Peningkatan peran sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi memiliki tujuan program adalah meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional. Sasaran program adalah meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional; (3) Pemeliharaan daya dukung dan meningkatkan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki tujuan mewujudkan kondisi lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkualitas. Sasaran program adalah menurunnya tingkat kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (4) Peningkatan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan; (5) Peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan memperkuat budaya bahari bangsa.

### 3. Kebijakan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2012

Kebijakan kelautan dan perikanan di tahun 2010-2012 adalah kelanjutan dari program kemaritiman pada periode sebelumnya. Penerapan regulasi mengacu pada rencana kerja pemerintah tahun 2010 dengan visi dan misi mengelola sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah untuk kesejahteraan bangsa Indonesia tanpa mengesampingkan objek pelaku kemaritiman (masyarakat pesisir). Dalam jangka panjang, kebijakan yang tertera dalam Rencana Pemerintah, akan diperbaharui

berdasarkan *issue* (masalah) yang terjadi di masyarakat dengan tetap mengembangkan program pemberdayaan masyarakat pesisir.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka program kelautan dan perikanan difokuskan pada: (1) program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap dengan tujuan program pengembangan pengelolaan perikanan tangkap adalah mewujudkan hasil pengelolaan ikan yang lebih beragam dan bergizi tinggi. Sasarannya adalah menurunnya ketergantungan nelayan pada situasi paceklik perikanan tangkap yang menyebabkan berkurangnya pendapatan nelayan; (2) peningkatan daya saing dan produk perikanan dengan tujuan untuk mewujudkan keberagaman produk perikanan sehingga dapat bersaing dengan perikanan internasional. Sasaran dari program ini adalah menurunkan ketergantungan impor perikanan dari pihak asing berupa: makanan kaleng, teri Jepang, ikan laut lainnya dan memperbaiki gizi masyarakat dengan tidak mengekspor secara keseluruhan produk nomor 1 hasil tangkapan seperti: tuna, kakap merah, dan lobster; (3) peningkatan produksi dan budidaya dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat menghadapi persaingan global. Sasarannya peningkatan produksi dan budidaya serta meningkatnya minat masyarakat pesisir untuk membudidayakan ikan; (4) pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk merawat wilayah pesisir yang didalamnya terdapat biota laut, kelestarian terumbu karang, dan mencegah penjualan aset pulau-pulau kecil di wilayah kelautan Indonesia. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kepedulian masyarakat pesisir untuk turut menjaga kelestarian dan kebergunaan wilayah pesisir Indonesia.

Memasuki pasca reformasi, berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah serta berdasarkan UU No. 19 Tahun 2004 mengenai desentralisasi perikanan, maka pembentukan kebijakan sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah disesuaikan dengan kondisi masing-masing setiap daerah. Tahun 2001, pemerintah Kabupaten Banyuwangi selaku pemegang kewenangan dan pengelolaan kebijakan diberbagai sektor mengeluarkan amanat untuk sepenuhnya menyerahkan pengelolaan program kepada dinas-dinas terkait. Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Banyuwangi sebagai penanggung jawab sektor kemaritiman, bertugas mengelola dan menerapkan kebijakan dari pusat yang didanai oleh dana APBD Kabupaten Banyuwangi. Maka Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan telah memiliki rencana dan program yang diimplementasikan berdasarkan kondisi perairan dan sumber daya manusia yang ada diwilayah Banyuwangi, tidak terkecuali di wilayah pesisir pantai Muncar sebagai berikut.

Tabel 5.3 Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi  
2001-2015

Kebijakan Daerah	Sasaran	Program	Tahun Pelaksanaan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan pengelolaan sumber daya perikanan sesuai dengan potensi disetiap daerah.</li> </ul>	Pembinaan modal bagi usaha nelayan berdasarkan ekonomi kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan produksi perikanan dan kelautan</li> <li>memperluas lapangan kerja</li> <li>meningkatkan hasil pendapatan masyarakat nelayan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2001-2005</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.</li> <li>peningkatan pengelolaan pengembangan produksi dan daya saing hasil perikanan</li> </ul>	Meningkatkan produksi budidaya perikanan dan pendapatan serta pelayan terhadap nelayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>peningkatan sarana prasarana</li> <li>sumberdaya laut</li> <li>Pengembangan perikanan tangkap</li> <li>pengembangan budidaya perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2006-2010</li> </ul>

Kebijakan Daerah	Sasaran	Program	Tahun Pelaksanaan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur perikanan</li> <li>• Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pemasaran produk hasil perikanan</li> <li>• Pengelolaan konservasi kawasan</li> </ul>	Peningkatan kapasitas Birokrasi pelayanan publik dan peningkatan pembangunan bidang kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan perikanan tangkap</li> <li>- Pengembangan budidaya perikanan</li> <li>- optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</li> <li>- peningkatan kesadaran hukum dalam pendayagunaan</li> <li>- Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan</li> </ul>	- 2011-2015

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi 2001-2015*

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan kelautan dan perikanan yang diterapkan bagi masyarakat pesisir terbagi menjadi beberapa periode yakni 2001-2015. Peraturan atau regulasi dibentuk berdasarkan prinsip keberlanjutan dan prinsip pengembangan, sehingga saling terjadi sinkronisasi antara kebijakan sebelum dan sesudahnya. Pada periode 2001-2005, kebijakan pemerintah daerah terkait kelautan diutamakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan pengelolaan sumber daya perikanan sesuai dengan potensi di setiap daerah, yang tujuannya untuk meningkatkan sosial ekonomi nelayan. Pada periode 2006-2010 regulasi kebijakan pemerintah daerah terkait dengan peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tujuan meningkatkan produksi budidaya perikanan dan pendapatan serta pelayan terhadap nelayan. Pada periode 2011-2015 regulasi kebijakan pemerintah daerah terkait dengan tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam

upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan pembangunan ekonomi terintegrasi.

#### 1. Implementasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi 2001-2005

Fokus dari regulasi Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi adalah pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan sesuai dengan potensi disetiap daerah. Pembangunan ini mencakup kegiatan melaut termasuk nelayan, petani ikan, dan petani budidaya serta masyarakat nelayan lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber yang ada disetiap daerah pesisir di kawasan Banyuwangi. Diwilayah pesisir pantai Muncar, tantangan yang harus dihadapi tidak jauh berbeda dengan masyarakat pesisir lainnya, sumber daya manusia yang dapat dikatakan masih rendah karena 8 dari 10 nelayan rata-rata hanya lulusan sekolah dasar (wawancara dengan Tatik, tanggal 26 september 2016). Untuk mengatasi permasalahan tersebut diterapkanlah pendayagunaan program sumber perikanan secara optimal dan berkelanjutan yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sasaran dan program ini yakni; (1) meningkatkan produksi perikanan dan kelautan, (2) memperluas lapangan pekerjaan, (3) meningkatkan hasil pendapatan masyarakat nelayan.

Berdasarkan program dari kebijakan pemerintah implementasi dapat dirasakan masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar salah satunya penguatan modal dan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir yang dibangun. Untuk pemberian pemahaman tentang program yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Muncar sebagai pengawas perikanan di pelabuhan Muncar memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat nelayan Muncar. Penyuluhan atau sosialisai biasanya dilakukan 3 kali dalam 1 bulan terkait dengan program yang telah dicanangkan. Pembinaan juga dilakukan seperti pelatihan-pelatihan bagi nelayan. Pelatihan-pelatihan itu misalnya; pelatihan tentang manajemen, pelatihan tentang penangkapan ikan, dan pelatihan organisasi kelompok. Dampaknya dari ada pelatihan



tersebut nelayan menjadi mengerti materi yang telah diberikan, nelayan juga bisa bertukar pikiran dan menambah wawasan nelayan (wawancara dengan Abidin, tanggal 21 September 2016).

## 2. Implementasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi 2006-2010

Fokus dari regulasi Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi adalah peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Tujuannya untuk meningkatkan produksi budidaya perikanan dan pendapatan serta pelayanan terhadap nelayan. Adapun sasaran dan program antara lain: (1) peningkatan sarana dan prasarana, (2) pengembangan perikanan tangkap, (3) pengembangan budidaya laut. Pemerintah bekerjasama dengan beberapa lembaga yang ada sebagai upaya untuk meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kebijakan ini mendorong masyarakat nelayan Kedungrejo untuk ikut berpartisipasi salah satunya dengan membangun unit lembaga modal khusus yaitu Koperasi Unit Desa Mina. Anggota atau karyawan KUD Mina ini adalah masyarakat nelayan asli sehingga lebih memahami kondisi nelayan setempat. Pengembangan Koperasi mina ini membawa perubahan dan perkembangan masyarakat nelayan ini mendorong KUD Mina mengikuti perkembangan teknologi, dan pola pikir anggotanya. Unit Usaha KUD ini bergerak dalam 2 bidang yakni usaha yang bergerak dalam bidang sosial dan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi. Unit usaha yang bergerak dalam bidang sosial adalah unit usaha TK Tunas Nelayan dan unit usaha Balai Pengobatan. Sedangkan unit usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi yaitu unit Usaha TPI, perbengkelan, pembayaran rekening listrik, pertokoan, unit Usaha Simpan Pinjam (USP) dan unit usaha pabrik es (wawancara dengan asmuni, tanggal 22 September 2016).

### 3. Implementasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi 2011-2015

Fokus kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi periode 2011-2015 adalah melanjutkan program pembangunan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan dengan mengoptimalkan sistem pengelolaan sumber daya alam. Regulasi periode ini merupakan rencana pembangunan kawasan kelautan dan perikanan serta peningkatan birokrasi pelayanan terhadap masyarakat (wawancara dengan Bu Fikri, tanggal 20 September 2016).

Berdasarkan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, sasaran dan tujuan yang diterapkan pada periode 2011-2015, adalah: (1) meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan; (2) meningkatkan ketersediaan hasil kelautan dan perikanan; (3) mengoptimalkan pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan; (4) meningkatkan jumlah kelompok masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan yang mandiri. Berdasarkan sasaran dan tujuan tersebut, maka dibentuklah program-program terkait yakni: (1) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, (2) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, (3) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut, (4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, (5) Program Pengembangan Kawasan Minapolitan, (6) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, (7) Program Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan.

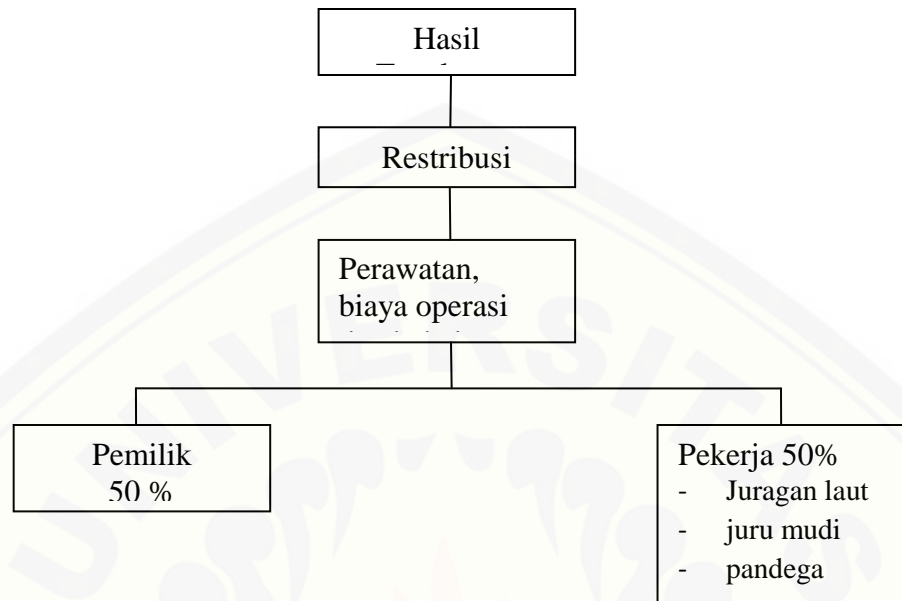
Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncarmelalui berbagaisosialiasi terkait dengan pengoptimalan sumber daya alam. Untuk sarana penunjang pemerintah daerah dilakukan pembangunan disepanjang jalan trotoar Muncar. Pada program perencanaan pengembangan kawasan, pemerintah melakukan pembangunan di pelabuhan, seperti pembangunan

pertamina, tahap renovasi TPI Pelabuhan sebagai pusat penuh pelelangan (lihat gambar lampiran E.)

### 5.2.2 Teknologi Penangkapan Ikan

Unsur penting dalam proses penangkapan ikan adalah penggunaan teknologi penangkapan saat melakukan proses produksi yang meliputi armada berupa perahu atau kapal, alat tangkap dan cara menggunakan proses produksi. Ketiga unsur tersebut akan berpengaruh terhadap hasil produksi yang diperoleh nelayan. Oleh karena itu pemerintah berusaha melaksanakan modernisasi teknologi penangkapan ikan yang digunakan nelayan. Tujuan dilaksanakan modernisasi ini adalah meningkatkan hasil produksi nelayan, sehingga terjadi peningkatan taraf hidup nelayan melalui peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya perikanan yang terkandung dilaut secara optimal dengan menjaga kelestariannya.

Modernisasi teknologi alat penangkapan ikan merupakan landasan kekuatan ekonomi masyarakat nelayan sekaligus menjadi landasan terjadinya perubahan sosial dan pranata di lingkungan masyarakat nelayan. Perubahan teknologi penangkapan ikan mempengaruhi tingkat produksi, pendapatan, dan hubungan kerja antara nelayan pemilik kapal dengan pandega. Pertama, tingkat produksi nelayan mengalami peningkatan karena cara kerja nelayan tidak lagi tergantung pada musim. Kedua hubungan kerja antara nelayan pemilik dengan pandega dan sesama pandega yang semakin kompleks karena terjadi peningkatan jumlah pandega yang terlibat dalam organisasi penangkapan ikan. Ketiga, bertambahnya jumlah pandega yang terlibat dalam proses penangkapan ikan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan nelayan atau pelaksanaan sistem bagi hasil. Dalam hal ini pembagian hasil tangkapan yang diterima oleh masing-masing pihak sesuai dengan spesifikasi kerja.



*Gambar 5.1 Sistem bagi Hasil*

Modernisasi perikanan pada masyarakat nelayan dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama modernisasi pengetahuan. Untuk menyebarkan pengetahuan tentang teknologi perikanan dalam kehidupan nelayan diperlukan tenaga penyuluhan dan diharapkan mampu membawa sasaran penyuluhan kepada cita-cita yang ingin diwujudkan. Sehingga dengan adanya petugas penyuluhan lapangan diharapkan mampu mengajarkan ilmu yang dikuasainya kepada nelayan agar timbul kesadaran untuk menerapkan dan mempraktekan teknologi yang diterima.

Pemerintah dalam memperkenalkan teknologi perikanan pada masyarakat banyak menggunakan agen pembaharuan untuk mengarahkan masyarakat nelayan agar menerima modernisasi perikanan yang telah dicanangkan pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitasnya. Proses yang ditimbulkan oleh adanya modernisasi, tidak lepas dari hakekat pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan dan membentuk manusia seutuhnya, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual untuk kesejahteraan

masyarakat. Modernisasi dalam bidang perikanan merupakan proses masuknya unsur baru yang berupa mesin, motor, perahu, dan peralatan perikanan yang ditunjang oleh sarana modern lainnya dengan memperoleh hasil yang baik. Sarana perikanan adalah peralatan yang dipakai oleh para nelayan secara langsung sebagai alat penangkapan ikan. Sedangkan prasarana adalah merupakan penunjang yang digunakan nelayan untuk mendukung kelancaran proses modernisasi.

Sebelum dilaksanakan modernisasi di bidang teknologi penangkapan ikan, komunitas nelayan Kedungrejo Muncar masih menggunakan perahu layar tanpa motor dengan alat tangkap yang masih sederhana berupa jala, serok, dan pancing. Setelah adanya modernisasi masyarakat nelayan Kedungrejo Muncar mulai menggunakan kapal motor atau biasanya disebut perahu sleret dengan alat tangkap berupa jaring *Purse Seine* dan jaring *Gill Net*. Sehingga hasil tangkapannya meningkat dan menambah hasil pendapatan nelayan. Setelah adanya motorisasi atau penggunaan mesin di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar, aktifitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dilaut mengalami perubahan. Pengaruh perubahan teknologi alat tangkap dikawasan ini menyangkut juga perubahan sasaran tangkap. Pada tahun sebelumnya, para nelayan masih menggunakan alat tangkap sederhana dan kebanyakan bertujuan menangkap ikan pelangis. Sesudah perubahan teknologi tangkap nelayan beralih sasaran tangkap menjadi ikan demesial. Nelayan yang sebelumnya menggunakan perahu layar diganti mesin penggerak yang mempunyai sistem kerja yang efektif dan efisien, sedangkan alat tangkap tradisional diganti dengan alat tangkap *mini trawl*. Perubahan alat tangkap ini diwilayah perairan Kedungrejo Muncar mempunyai pengaruh besar terhadap hasil produksi tangkapan nelayan sesudah menggunakan perahu mesin dan alat tangkap *mini trawl*. Kondisi ini menyebabkan berkembangnya armada perahu dan alat tangkap ikan nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar (wawancara dengan Abidin, 7 September 2016).

Tabel 5.4 Perkembangan Armada Kapal Perikanan di Muncar

No	Tahun (unit)	Kapal Motor			Perahu Motor Tempel	Perahu Tanpa Motor	Jumlah
		5 GT	5 GT-10 GT	10 GT-30 GT			
1.	2002	533	258	198	1.112	29	2.130
2.	2003	566	253	198	1.008	48	2.073
3.	2004	566	269	193	950	165	2.143
4.	2005	566	319	68	945	121	2.019
5.	2006	566	319	189	1.070	121	2.265
6.	2007	565	319	190	1.401	96	2.571
7.	2008	565	317	192	954	96	2.124
8.	2009	563	319	192	676	121	1.871
9.	2010	563	322	198	676	121	1.871
10.	2011	566	322	189	686	111	1.874
11.	2012	548	315	205	680	118	1.866
12.	2013	548	319	189	671	108	1.835
13.	2014	553	299	197	656	78	1.783

Sumber: Data Perikanan UPPPP Muncar 2002-2014

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah penggunaan armada kapal semakin menurun mulai 2008 sampai tahun 2009 sebesar 1.871. Hal ini disebabkan oleh faktor alam yang tidak menentu terkait untuk pergi melaut, karena modal yang dikeluarkan untuk melaut dengan hasil perolehan ikan tidak seimbang. Hal ini membuat nelayan tak menentu untuk melaut, terkait dengan turunnya jumlah ikan yang diperoleh ketika melaut. Selain itu menurunnya jumlah armada kapal hingga 1.783 unit disebabkan karena kondisi laut yang tidak dijaga kelestariannya, banyak pabrik yang dibangun berdekatan dengan laut membuat berbagai pencemaran serta semakin modern alat tangkap justru semakin mempersulit pengembangbiakan ikan karena alat tangkap yang digunakan semakin kecil lubang jaring-jaringnya sehingga mengambil benih-benih ikan.

**BAB 6. BENTUK PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT  
NELAYAN DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2000-2015.**

**6.1 Bentuk Perubahan Sosial Ekonomi Nelayan Kedungrejo**

Bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat secara umum dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu perubahan alami, perubahan yang direncanakan, dan perubahan yang tergantung pada kehendak pribadi. Perubahan alami adalah perubahan-perubahan yang terjadi tidak sengaja atau terjadi dengan sendirinya. Perubahan secara alami cenderung berkembang secara gradual yaitu terjadi keseimbangan antara perubahan sikap individu dengan lingkungan sosialnya. Adapun perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang didasarkan atas pertimbangan dan perhitungan secara matang tentang manfaat perubahan tersebut bagi kehidupan masyarakat. Sedangkan perubahan yang tergantung pada kehendak individu maksudnya perubahan yang erat kaitannya dengan selera pribadi (Syani, 1995:128-132).

Kebijakan muncul sebagai titik awal perubahan, sehingga masyarakat nelayan Desa Kedungrejo mulai mengalami kemajuan atau bersifat progres dalam pembangunan wilayahnya dan peningkatan taraf kehidupannya. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar terkait dengan perubahan sebagai berikut.

**6.1.1 Tingkat Pendapatan**

Kebijakan pemerintah terkait dengan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti yang terjadi di Jawa Timur, pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi nampak berjalan sedikit lebih cepat yaitu mencapai

5,43%, sebelumnya tahun 2002 sekitar 3,41% dan pada tahun 2003 sekitar 4,11%. Pertumbuhan pada tahun 2004 diakibatkan oleh meningkatnya hampir semua sektor ekonomi, terutama oleh sektor perdagangan, sektor industry, sektor pengangkutan, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan masing-masing daerah sebesar 4,42%-8,27%. Bagi daerah PAD merupakan sumber pendapatan yang penting, oleh karena itu pemerintah daerah bersama DPRD mencari peluang-peluang baru sebagai sumber masukan kas daerah (Salim, 2009:7).

Peningkatan ekonomi dalam masyarakat nelayan Kedungrejo Muncar dapat dilihat dari produksi hasil tangkapan ikan masyarakat nelayan. Hal ini di karenakan hasil produksi ikan merupakan inti dari peningkatan pendapatan nelayan. Dengan adanya motorisasi dari pemerintah nelayan Desa Kedungrejo mulai menggunakan kapal motor. Sebelumnya nelayan Kedungrejo sebagian besar menggunakan perahu motortempel karena perahu ini mampu menjangkau daerah tangkapan yang lebih jauh dibanding dengan kapal motor. Sejak adanya motorisasi terkait penggunaan kapal motor, jumlah nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor dan perahu motor tempel berkurang. Adapun dengan berdirinya KUD Mina Blambangan salah satu program pemerintah sebagai lembaga yang menunjang peningkatan kesejahteraan nelayan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan dari hasil tangkap ikan nelayan yang disebabkan karena kredit jaring *Purse Seine* yang dilakukan oleh KUD Mina (Pamungkas, 2013:9-11).

Kondisi ekonomi (pendapatan) nelayan Kedungrejo sangat dipengaruhi oleh hasil produksi tangkapan yang diperoleh. Jika perolehan tangkapan sedikit maka akan tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan dalam sekali melaut sebuah kapal selain itu juga membutuhkan biaya bekal selama perjalanan yang cukup besar, jadi hasil produksi yang sedikit hanya mampu mengganti modal untuk melaut saja. Dengan demikian adanya bantuan dari pemerintah melalui lembaga dengan bantuan memberi kredit armada kapal serta alat tangkap yang digunakan atau jaring untuk meningkatkan kehidupan masyarakat nelayan Kedungrejo, secara tidak langsung



telah memberikan akses kemudahan dalam peningkatan hasil produksi perikanan (lihat tabel 6.1)

Bentuk dari peningkatan pendapatan hasil perikanan ini, pada masyarakat nelayan Kedungrejo Muncar dapat dilihat dari bangunan rumah penduduk, rumah yang awalnya terbuat dari *gedeg* atau papan dan kombinasi *gedeg* papan dengan penerangan dari lampu minyak tanah sepanjang pesisir pantai Kedungrejo sudah tidak ada. Rumah masyarakat nelayan Kedungrejo kini sudah permanen atau banyak rumah yang mewah dengan berbagai fasilitas yang dimiliki nelayan, walaupun masih ada pemukiman rumah warga yang masih berhimpitan. Kini banyak sekali nelayan Pandega yang awalnya berkerja pada pemilik perahu atau juragan, sekarang sudah memiliki perahu sendiri dan tidak jarang pandega menjadi juragan laut karena kerja keras dibantu dengan program-program pemerintah terkait dengan usaha kesejahteraan nelayan (wawancara dengan Sudirman, tanggal 14 September 2016).

Tabel 6.1 Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2002-2014

No	Tahun	Produksi Ikan ( Kg)	Nilai Produksi (Rp)
1.	2002	23.150.543	54.775.807.500
2.	2003	34.058.841	60.110.214.900
3.	2004	23.777.539	49.369.591.900
4.	2005	11.565.879	21.885.458.600
5.	2006	58.815.285	90.443.097.100
6.	2007	60.393.648	87.494.873.200
7.	2008	35.756.636	112.724.026.500
8.	2009	32.782.997	82.090.947.000
9.	2010	22.042.289	98.394.406.500
10.	2011	16.526.715	84.956.896.500

11.	2012	11.459.005	107.374.808.500
12	2013	8.010.771	87.546.170.500
13.	2014	11.792.713	118.662.351,000

*Sumber: Data Perikanan UPPPP Muncar 2002-2014*

Pada table produksi perikanan tangkap yang di hasilkan mengalami dinamika dari tahun ke tahun dengan titik tertinggi sebesar 60.393.648 kilogram ditahun 2007. Setelah tahun tahun 2007 hasil penangkapan ikan mengalami penurunan hingga hasil penangkapan ikan terkecil sebesar 8.010.771 kilogram pada tahun 2013. Hal ini diakibatkan selain kondisi alam yang tidak menentu, dan penangkapan ikan yang tidak mengenal waktu, sehingga pengembangbiakan ikan terganggu. Untuk nilai produksi atau harga disesuaikan dengan banyak ikan, jika jumlah tangkapan ikan banyak harga yang dijual murah, sebaliknya jika jumlah ikan sedikit maka harga yang ditawarkan relatif tinggi.

#### 6.1.2 Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu penunjang dalam kelangsungan proses pembangunan manusia seutuhnya. Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik maka akan menciptakan sumber daya manusia yang juga lebih berkualitas. Tingkat pendidikan yang beragam di Kedungrejo, berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat terutama masyarakat nelayan sebagai mayoritas penduduk Desa Kedungrejo dalam upaya pemenuhan kesejahteraan hidup. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan penduduk adalah dengan mendirikan berbagai macam fasilitas pendidikan. Ketersedian fasilitas pendidikan yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas di wilayah Kedungrejo yang pada akhirnya berpengaruh langsung terhadap proses pembangunan sumberdaya manusia.

Setelah adanya motorisasi yang meningkatkan pendapatan nelayan, membuat nelayan Kedungrejo mulai sadar kurangnya pemahaman terhadap teknologi dan ilmu

pengetahuan menyadarkan masyarakat nelayan bahwa pendidikan itu penting, dan juga memahami tidak selamanya nelayan akan bergantung kepada profesinya sebagai nelayan melihat kondisi perairan atau pendapatan yang tidak menentu tergantung kondisi alamnya (saat melaut). Dengan demikian Nelayan Kedungrejo berusaha memberikan pendidikan yang tinggi terhadap anaknya agar bisa merubah nasib. Disisi lain ada pula program pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun dengan dana bantuan dari pemerintah berupa BOSS (Dana Operasi Sekolah) bagi anak yang kurang mampu. Hal ini mendorong masyarakat Kedungrejo merubah pola pemikirannya terhadap pendidikan. Nelayan banyak yang berusaha menyekolahkan anaknya tinggi agar tidak senasib dengan orang tuanya yang sebagai nelayan terutama nelayan pandhega atau ABK (wawancara dengan Anton Ansori, tanggal 14 September 2016).

Langkah pertama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu adanya tindakan awal yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya dengan membuat badan hukum yang tergabung dalam KUD (Koperasi Unit Desa yang merupakan suatu lembaga sosial ekonomi yang bertujuan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar. Program yang telah dilakukan dalam peningkatkan sumber daya manusia melalui dalam hal peningkatan kualitas masyarakat nelayan salah satunya dengan membangun Unit usaha Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK Tunas Nelayan). TK Tunas Nelayan merupakan TK yang cukup tua di Kecamatan Muncar dan merupakan TK satu-satunya yang berada di Desa Kedungrejo. Tujuan dibangun lembaga pendidikan TK nelayan ini sebagai salah satu langkah awal pemerintah guna menyiapkan anak nelayan pada jenjang berikutnya serta menarik minat anak-anak untuk bersekolah (wawancara dengan Asmuni, tanggal 22 September 2016).

Bentuk peningkatan pendidikan, pada masyarakatnelayan Kedungrejo Muncar dapat dilihat dari jenjang pendidikan di Desa Kedungrejo. Tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat pada akhirnya mempengaruhi kelancaran proses pembangunan dan perkembangan di wilayahnya. Untuk jenjang pendidikan

masyarakatnya nelayan sebesar 35,07% menamatkan jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/ sederajat. Selanjutnya terbesar kedua sebesar 25,67% menamatkan jenjang pendidikan sampai SMP/sederajat. Untuk jenjang pendidikan SD/sederajat sekitar 20,28%, sedangkan jenjang pendidikan lanjutan tamatan Perguruan Tinggi/sederajat 10,06%. Dari kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa penduduk nelayan Kedungrejo telah menyadari pentingnya pendidikan terutama jenjang lanjutan SMA dan Perguruan Tinggi serta masyarakat nelayan Kedungrejo sudah tidak ada yang buta huruf atau tidak bersekolah (Data profil desa 2005-2015, data diolah).

Pendidikan yang tinggi membuat masyarakat mampu menggunakan teknologi perikanan tangkap yang modern, sehingga perolehan tangkapan perikanan mendapatkan hasil yang optimal. Selain itu masyarakat menyadari dampak-dampak yang timbul karena penangkapan yang berlebih, masyarakat nelayan Kedungrejo juga berupaya melakukan pengolahan hasil tangkapan yang ada untuk menunjang kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin tinggi.

### 6.1.3 Pengelolaan dan Pemasaran

Setelah diterapkan otonomi daerah tahun 2000 masing-masing daerah melakukan kebijakan penarikan restribusi berbeda-beda. Untuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menetapkan restribusi pelelangan ikan mengambil kebijakan 4% dari harga yang telah disepakati penjual dan pembeli, atau 4% dari harga barang. Kebijakan ini diatur dalam Perda. No 32 dan 33 Tahun 2003 dan pelaksanaannya tahun 2004. Pada tahun 2004 pelaksanaan dan pengelolaan TPI dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan uji coba Perda. TPI diserahkan kembali oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dikelola KUD tahun 2008 dengan surat perjanjian No 523/02/429.104/2008. Penyerahan ini dilakukan karena Dinas Kelautan dan Perikanan ingin masyarakat ikut melakukan pengelolaan TPI. Dimana keikutsertaan masyarakat nelayan ini diwakili oleh KUD Mina Blambangan. Berapa kemudahan memang dapat diperoleh dari unit-unit usaha

tersebut. Sebagai contoh, dari unit perbengkelan (untuk perahu nelayan) nelayan mendapat kemudahan pada saat pembayaran karena bisa dilakukan dengan cara mengangsur. Namun demikian, KUD masih belum bisa memberikan dukungan yang optimal untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang penting pengaruhnya bagi nelayan setempat yaitu dalam hal pemodal dan pemasaran. Pada pemodal yang merupakan komponen penting dalam kegiatan operasional penangkapan ikan, koperasi juga belum mampu berperan sebagai lembaga penyedia modal seperti halnya pengambang yang hingga saat ini masih memiliki peran dominan sebagai lembaga penyedia modal bagi nelayan, baik itu untuk keperluan operasional penangkapan ataupun pemenuhan kebutuhan hidup harian rumah tangga nelayan. Sedangkan pada sistem pemasaran diharapkan bisa memberikan daya tawar yang lebih kuat dari nelayan akan tetapi masih belum dapat dilaksanakan oleh KUD (lihat Undang-undang lampiran G.)

Salah satu menunjang kelancaran para nelayan dalam pelaksanaan usaha dibidang perikanan, pemerintah telah menyediakan sarana prasarana dermaga pelabuhan yang berada di Desa Kedungrejo yaitu Pusat Pendaratan Ikan (PPI) yang dikelola oleh Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Muncar. Di wilayah Kecamatan Muncar terdapat tiga sarana pelelangan ikan atau TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yaitu TPI Pelabuhan, TPI Kalimoro dan TPI Sampangan besar. Pada TPI Pelabuhan juga terdapat Kantor Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Muncar, KUD Mina Blambangan dan beberapa unit kerjanya, Kantor Satuan Polisi Air dan Udara, SPBN, serta BPPPI. Sedangkan prasarana yang diberikan dengan kemudahan dalam akses transportasi, sehingga memudahkan dalam pemasaran atau distribusi hasil olahan perikanan keluar wilayah Muncar. Pada pengolahan hasil tangkapan ikan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, sejak tahun 2000 sistem pengolahan sudah jauh lebih modern dengan dibantu tenaga mesin mekanik dari pabrik-pabrik besar di Desa Kedungrejo sehingga dapat mengoptimalkan hasil olahan ikan. Terlebih lagi mengingat sifat komoditas perikanan yang mudah sekali rusak atau cepat busuk

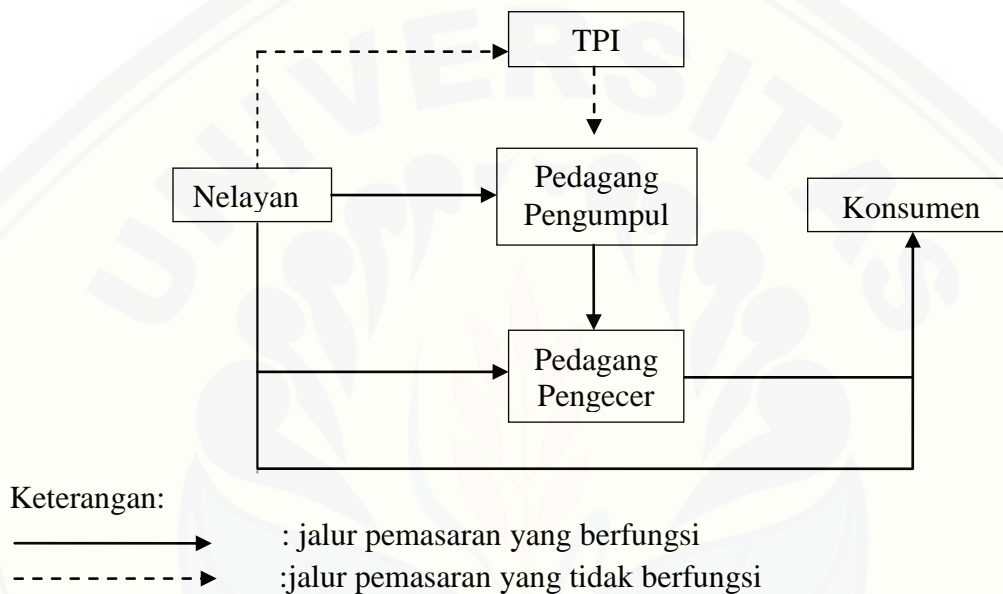
jika tidak cepat-cepat diolah (wawancara dengan Abidin, tanggal 21 September 2016)

Pada pengolahan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Kedungrejo utamanya adalah pengalengan ikan, tepungan ikan, dan pemindangan. Terkait dengan banyaknya pabrik dan industri rumahan dalam pengolahan hasil tangkap ikan di Desa Kedungrejo sebagai pusat perindustrian perikanan. Memasuki tahun 2002 nelayan berusaha mengoptimalkan pengolahan hasil tangkapan dengan melakukan pengasinan dan *cold storage*. Hal ini justru berdampak negatif pada usaha industri rumahan atau *home industry* khususnya pemindangan. Banyak industri rumahan yang gulung tikar akibat adanya pabrik *cold storage* selain itu hasil tangkapan yang ikan yang menurun karena kondisi alam yang tidak menentu dan terkadang hasil tangkapan ikan saat sampai di pelabuhan langsung masuk ke pabrik pengalengan ikan, sehingga banyak pengusaha industri rumahan yang gulung tikar (wawancara dengan Endang, tanggal 24 April 2016)

Adapun kegiatan pemasaran ikan dikenal dengan pelelangan ikan yang berlangsung setelah kapal nelayan mendarat di pangkalan pendaratan ikan. Kegiatan pelelangan ikan tersebut selain untuk melindungi kepentingan nelayan dalam hal harga jual ikan yang layak juga merupakan sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan ketetapan pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menetapkan peraturan Daerah (perda) No. 32 dan 33 tentang penyelenggaraan pelelangan ikan dan retribusi pelelangan ikan dengan tujuan agar penyelenggaraan pengelengan ikan dapat terlaksana secara efektif.

Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar sebagai daerah penghasil komoditas perikanan laut terbesar di Kabupaten Banyuwangi secara langsung berpengaruh terhadap terbentuknya unit-unit pengolahan perikanan atau bahan baku ikan di daerah tersebut. Oleh karena itulah maka komoditas perikanan laut yang dihasilkan nelayan dalam tahap selanjutnya yaitu pemasaran dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan bentuk akhir yang diterima oleh konsumen yaitu dalam bentuk ikan segar (sebagai

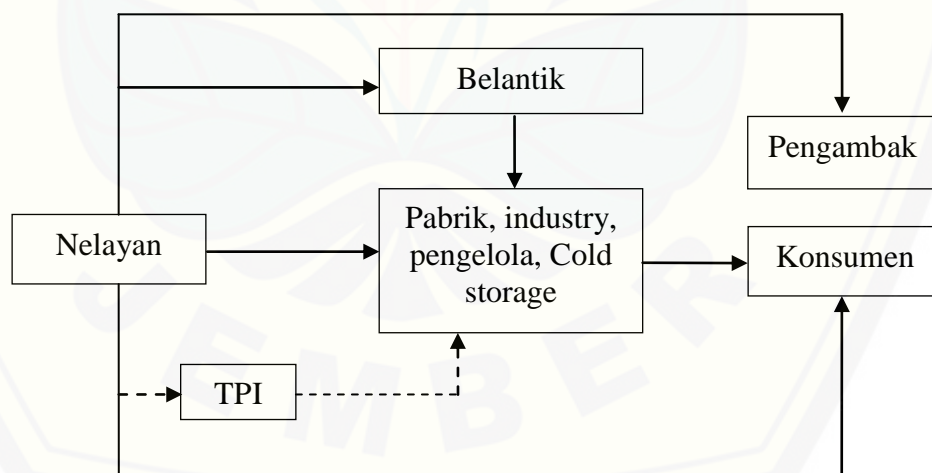
konsumsi rumah tangga) dan dalam bentuk olahan. Perbedaan tersebut selanjutnya tentu saja disertai juga dengan perbedaan pihak-pihak terkait didalam setiap alur pemasaran. Untuk alur pemasaran yang pertama yaitu pemasaran untuk komoditas ikan segar seperti yang terlihat pada gambar 6.1



*Gambar 6.1 Alur Pemasaran Komoditas Ikan Laut segar*

Untuk komoditas ikan segar, setelah perahu mendarat di pangkalan pendaratan ikan yang ada di tiap lokasi TPI, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan tersebut langsung ditampung oleh pedagang pengumpul (sodagar) tanpa melalui proses atau kegiatan pelelangan. Ikan yang ditampung oleh sodagar selanjutnya akan dijual kepada para pedagang pengecer (baku) hingga akhirnya sampai kepada konsumen. Selain melalui pedagang pengumpulan, nelayan juga bisa menjual ikan hasil tangkapannya dalam jumlah yang relative lebih sedikit kepada para bakul atau langsung kepada konsumen, tergantung pada banyak sedikitnya jumlah tangkapan yang diperoleh.

Seperti halnya pemasaran ikan segar, pemasaran ikan untuk komoditas olahan atau bahan baku bagi pabrik pengolahan juga tidak melalui proses pelelangan. Sejak tahun 2005 TPI tidak berjalan seperti fungsinya untuk melakukan pelelangan ikan. Hal ini karena perusahaan perikanan/ pabrik-pabrik sudah memiliki jalinan kerjasama dengan pihak pengambang atau belantik, sebagai pihak perantara perusahaan nelayan yang mampu menyediakan bahan baku untuk industri pengolahan. Jika proses mendapatkan bahan baku harus melalui pelelangan kurang cepat. Karena mengingat sifat komoditas perikanan yang mudah sekali rusak atau cepat busuk jika tidak cepat-cepat diolah. Perbedaan antara pengambang dan belantik adalah dalam proses pendaratan ikan. Berbeda dengan pengambang yang menerima hasil tangkapan nelayan setelah perahu nelayan mendarat di pangkalan pendaratan, sedangkan belantik menjemput langsung perahu nelayan pada saat masih melaut. Namun, keberadaan belantik tersebut tidak selalu ada sepanjang tahun. Alur pemasaran komoditas olahan dapat dilihat pada gambar berikut.



Keterangan:

- > : jalur pemasaran yang berfungsi  
 - - - - -> : jalur pemasaran yang tidak berfungsi

Gambar 6.2 Jalur Pemasaran Ikan Komoditas Olahan



Setelah melalui proses pengolahan ikan produksi oleh industri pengolahan berdiri beragam bentuk jadi, misalnya ikan kalengan, tepungan ikan, terasi, petis dan lain-lain. Industri pengolahan ikan tersebut banyak terdapat di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar terutama disekitar wilayah pendaratan ikan baik itu industri yang menggunakan mesin maupun industri pengolahan tradisional. Selain industri pengolahan tersebut, juga terdapat beberapa *cold storage* yang menghasilkan produk ikan beku yang lebih banyak untuk keperluan ekspor ke luar daerah yang jumlahnya menunjukkan peningkatan pada tahun tahun terakhir ini dikarenakan harga pembelian ikan di tingkat nelayan yang cukup tinggi dan bersaing dengan jenis industri lainnya.

Berdasarkan uraian sebelumnya dijelaskan bahwa terjadi perubahan sejak tahun 2000 pada masyarakat nelayan dilihat dari tingkat pendidikan terbukti sudah tidak ada masyarakat nelayan yang buta huruf dan pendidikan kebanyakan SMP/ sederajat serta anak-anak sudah ada beberapa tamatan sarjana. Dilihat dari pendapatan nelayan, dengan mengoptimalkan sumber daya alam dengan bantuan dari pemerintah nelayan Desa Kedungrejo sudah bisa melakukan pengolahan secara optimal hasilnya dilihat dari tempat tinggal atau rumah penduduk yang sudah permanen dengan beberapa fasilitas seperti aliran listrik. Pada pemasaran hasil olahan masyarakat nelayan Kedungrejo dapat melakukan distribusi ekspor hasil tangkapan berupa tepung ikan ke Jepang, ikan dalam kaleng ke Afrika, Amerika, dan timur tengah serta ikan beku/ *Frozen* ke Jepang, Korea, Uni Eropa, dan Australia.

**BAB 7. SIKAP MASYARAKAT NELAYAN TERHADAP PERUBAHAN  
DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR  
KABUPATEN BANYUWANGI.**

Suatu masalah sosial seringkali disebut sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan oleh banyak orang, sehingga akan timbul rasa untuk memperbaiki. Masyarakat yang mengalami perubahan pasti melahirkan suatu masalah, hal itu dapat terjadi karena kondisi dalam masyarakat itu sendiri yang mengalami perubahan-perubahan yang tidak dapat di terima atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak dapat diterima. Dengan demikian suatu masyarakat yang terintegrasi secara baik tidak akan menghadapi masalah sosial. Terlepas dari adanya sikap umum masyarakat terhadap perubahan, setiap masyarakat memiliki pula banyak sikap dan nilai-nilai khusus yang berkaitan dengan objek dan kegiatan masyarakat. Perasaan senang atau tidaknya kondisi yang sudah mapan merupakan faktor yang penting dalam perubahan sosial. Sikap dan nilai-nilai mempengaruhi baik jumlah maupun arah perubahan sosial, kadar dan arah perubahan suatu masyarakat banyak dipengaruhi oleh kebutuhan yang dianggap (Horton dan Hunt, 1996:220-224).

Masyarakat nelayan Desa Kedungrejo adalah masyarakat yang dinamis. Maksudnya masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir yang mudah menerima perubahan. Pada umumnya nelayan Kedungrejo merupakan masyarakat yang konsumtif dan mempunyai kehidupan yang keras. Adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya dapat diterima dengan baik dengan syarat tidak mengganggu usaha atau kinerja nelayan dalam mendapatkan penghasilan, hal ini karena pada dasarnya masyarakat nelayan Kedungrejo adalah masyarakat yang memiliki tingkat konsumtif yang tinggi. Perjuangan hidup sebagai nelayan pada dasarnya cukup berat akan tetapi nelayan tetap menekuni. Disamping kegiatan yang memerlukan fisik kuat

Masyarakat nelayan Kedungrejo dalam hubungan sosial antar nelayan sangat tinggi hal ini terlihat dari sikap solidaritas pada saat penangkapan ikan, jika ada perahu yang mendapatkan kelebihan muatan nelayan yang berada di pesisir pantai langsung datang menolong tanpa melihat pemilik kapal atau juragan yang berbeda. juga modal yang besar terutama untuk menggandakan perahu untuk menunjang kebutuhan hidup yang tinggi sehingga nelayan juga mengambil kerja sambilan.

Pada Akhirnya adaptasi perubahan lingkungan tersebut menyebabkan munculnya suatu kebudayaan baru dalam masyarakat pesisir. Munculnya kebudayaan baru tersebut melalui proses pelebagaan yang panjang dari awal kebudayaan baru tersebut diketahui dan dikenal sampai kebudayaan tersebut menjadi suatu norma yang telah melekat dan mendarah daging dalam masyarakat pesisir. Kesesuaian dengan adanya perubahan akan sangat mudah diterima jika hal tersebut cocok dengan budaya yang berlaku. Pertama, inovasi itu mungkin tidak bertentangan dengan pola-pola yang berlaku. Kedua, inovasi mungkin saja memerlukan pola baru yang belum ada didalam masyarakat. Ketiga, beberapa inovasi merupakan unsur pengganti bukan unsur tambahan. Dengan demikian perubahan dalam masyarakat dapat diterima jika ketiga hal tersebut sangat dibutuhkan dalam masyarakat.

Perubahan masyarakat selalu diikuti oleh pengaruh dari faktor eksternal dan internal dalam masyarakat. Kedua faktor ini sangat mempengaruhi kondisi yang ada dalam masyarakat nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar, dalam segi:

1. Nilai sosial

Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lain, oleh karenanya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Hubungan yang erat antar nelayan karena persamaan profesi membuat masyarakat nelayan memiliki rasa Tenggang rasa yang tinggi, seperti gotong royong saling membantu dan toleransi antar tetangga yang tinggi dalam masyarakat. Budaya gotong-royong dan saling membantu tanpa pamrih merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam rasa persatuan yang tinggi karena persamaan keadaan.

Adapun saat padang bulan, pada saat ini nelayan tidak melaut melainkan nelayan bekerja sama merakit jaring, biasanya nelayan pada malam hari pergi bersama ke rumah juragan untuk membetulkan jaring-jaring yang rusak atau berlubang pada saat penangkapan ikan serta memperbaiki kapal pada siang hari di pelabuhan (wawancara dengan Hasan Basri, Tanggal 26 April 2016). Nilai sosial merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam menjalin komunikasi serta interaksi antar nelayan (lihat lampiran E).

## 2. Nilai Kebudayaan

Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dengan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Ada 3 bentuk kebudayaan, yaitu kebudayaan dalam bentuk gagasan, kebiasaan, dan benda-benda budaya (Koentjaraningrat, 2000:48)

Adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat itu sendiri. Masuknya budaya baru akan membuat pergolakan dalam masyarakat seperti halnya hubungan atau interaksi antar nelayan. Nilai-nilai budaya dapat diambil dari tradisi yang sudah melekat dalam kehidupan nelayan. Masyarakat nelayan terkenal dengan cirikhas masyarakat yang keras akan tetapi memiliki budaya toleransi yang tinggi membuat ikatan antar nelayan semakin erat. Seperti halnya interaksi yang dilakukan oleh nelayan kedungrejo (tata cara pergaulan), nelayan Kedungrejo bukan hanya nelayan asli (nelayan setempat) melainkan kebanyakan nelayan pendatang dari luar wilayah Banyuwangi. Walaupun berbeda status atau tempat tinggal, tetapi rasa solidaritas sangat tinggi misalnya antara nelayan jika ada acara seperti halnya petik laut nelayan saling membantu atau bekerja sama tanpa memandang status baik itu Juragan laut, juragan Darat, ABK atau Pandhega semua ikut serta dalam tradisi petik laut.

Masuknya budaya penggunaan alat tangkap yang baru tentu akan menimbulkan suatu pertentangan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern hal ini timbul karena rasa cemburu sosial dalam masyarakat. Akan tetapi seiring waktu penggunaan alat tangkap baru ini bisa diterima oleh masyarakat tradisional terkait dengan upaya peningkatan hasil tangkapan. Masyarakat Nelayan Kedungrejo memiliki sifat konsumtif dan mudah terpengaruh dengan kondisi yang sedang terjadi. Selama perubahan yang terjadi tidak mengganggu keberlangsungan kehidupan terutama dalam bidang ekonomi sangat mudah diterima oleh nelayan itu sendiri (wawancara dengan, Abdurahman tanggal 26 April 2016). Dengan adanya perubahan yang terjadi membantu nelayan Kedungrejo mengembangkan pemikiran yang lebih modern sebagai salah satu upaya untuk menunjang keberlangsungan hidupnya.

## BAB 8. PENUTUP

### 8.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perubahan sosial ekonomimasyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar, dapat disimpulkan dibawah ini.

Kehidupan masyarakat nelayan Kedungrejo menjelang tahun 2000 sangat sederhana terlihat dari cara penangkapan ikan yang masih tradisional serta hasil pendapatan yang tidak seimbang dengan potensi sumber daya yang ada. Hal ini membuat nelayan tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dengan ketidakpastian pendapatan membuat para nelayan Kedungrejo berada pada posisi paling bawah ekonominya. Kebanyakan nelayan hanya sebagai lulusan SD/ sederajat ada pula yang masih belum mengenyam pendidikan sehingga pemahaman ilmu yang dimiliki masih jauh tertinggal khususnya dalam pengembangan teknologi alat tangkap. Nelayan Kedungrejo mendasarkan pengetahuan dalam usaha penangkapan ikan secara terkaji namun hanya berdasarkan pengalaman selama ini yang telah dilakukan.

Perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat nelayan Kedungrejo disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Adanya pertumbuhan penduduk membuat semakin banyaknya kebutuhan ekonomi dan biaya pendidikan yang meningkat, membuat nelayan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja ganda. Selain itu faktor ekstern disebabkan adanya kebijakan pemerintah dan teknologi penangkapan yang modern. Kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan berbagai program yang disosialisasikan secara langsung sangat berpengaruh dalam menunjang kondisi sosial ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar

Bentuk perubahan yang terjadi pada masyarakat nelayan Kedungrejo dilihat dari perubahan sosial ekonomi yaitu, masyarakat kini mulai bisa meningkatkan kesejahteraan diberbagai aspek kehidupan seperti tempat tinggal, pendidikan dan pendapatan yang meningkat. Adapun dalam proses pengolahan dan pemasaran hasil peringkan tangkap yang lebih modern. Masyarakat mulai melakukan pengolahan dengan cara mengoptimalkan hasil perolehan tangkapan sehingga dapat meningkatkan pendapatan, serta dalam pemasaran menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah sehingga dalam pemasarannya bisa menjangkau wilayah diluar daerah penangkapan.

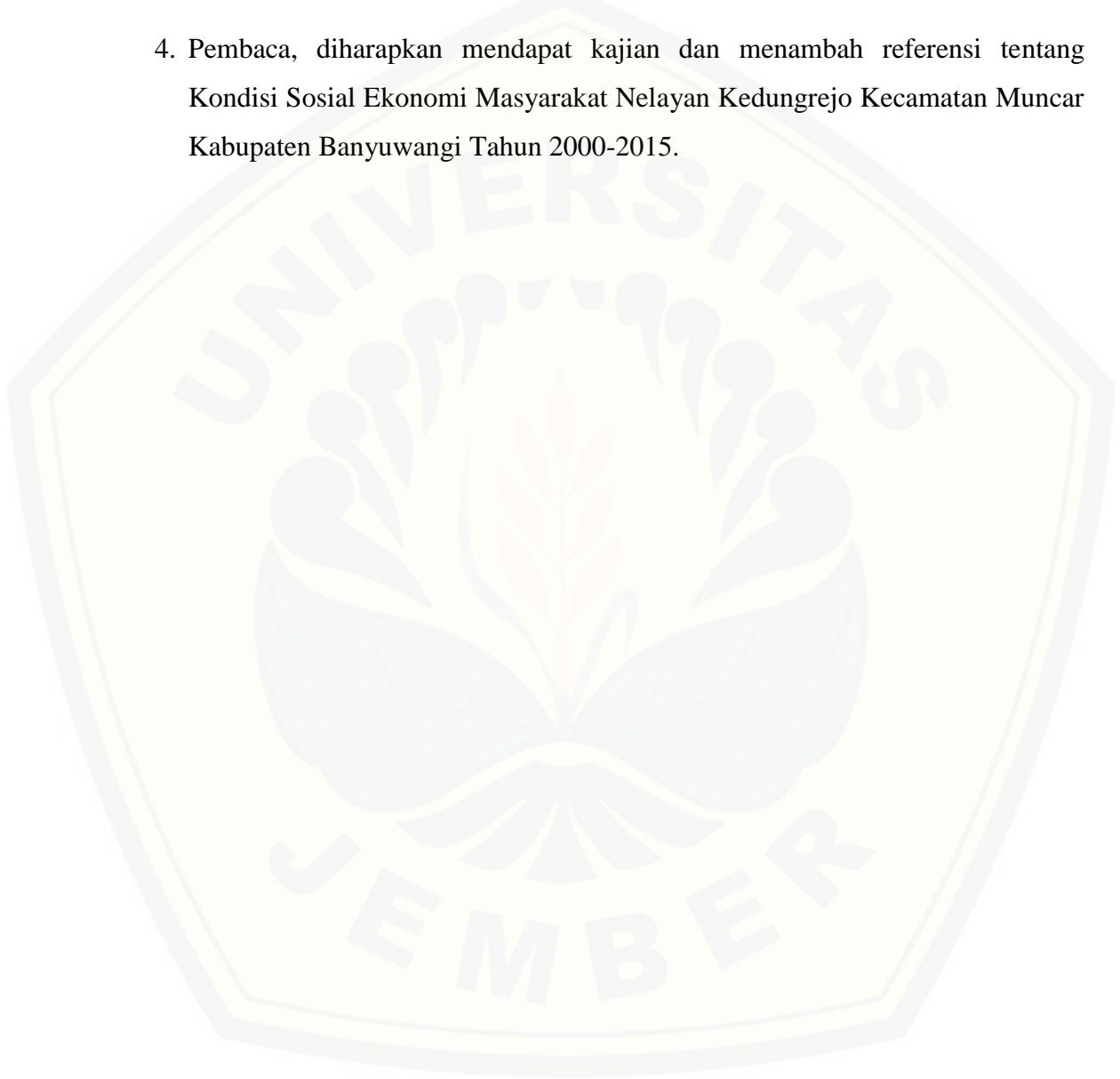
Dengan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat yang membantu dalam peningkatan sosial ekonomi nelayan Kedungrejo sangat diterima oleh masyarakatnya. Selain karena masyarakat nelayan Desa Kedungrejo merupakan masyarakat yang dinamis yang dapat menerima perubahan dengan baik dengan syarat tidak mengganggu usaha atau kinerja nelayan dalam mendapatkan penghasilan, hal ini karena nelayan Kedungrejo adalah masyarakat yang memiliki tingkat konsumtif yang tinggi.

## **8.2 Saran**

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, peneliti menyajikan beberapa saran kepada:

1. Universitas Jember diharapkan dapat menambah referensi dan memperkaya aktivitas penelitian sejarah Maritim agar bisa menambah wawasan generasi selanjutnya;
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, diharapkan turut memantau kondisi perikanan dan kehidupan nelayan serta mengoptimalkan pengelolaan dengan cara memperhatikan daerah penelitian agar dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan;

3. Masyarakat Muncar, diharapkan tetap menjaga hubungan antar masyarakat nelayan dan mengutamakan pendidikan, agar menjadi daerah memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik generasi selanjutnya;
4. Pembaca, diharapkan mendapat kajian dan menambah referensi tentang Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel

- Abdurahman, D. 2007. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: AR-Ruzz.
- Amanah, S., dan Farmayanti, N. 2014. *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan Keunikan Agroekosistem dan Daya Saing*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Apridar, Karim, M., dan Suhana. 2011. *Ekonomi kelautan dan Pesisir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atmosudirdjo, P., dan Burger. 1962. *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia Jilid 1*. Jakarta: Negara Pradnjaparamita.
- Badan Pusat Statistik Banyuwangi. 2006. *Katalog: Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Muncar Tahun 2006*. Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik Banyuwangi. 2007. *Katalog: Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Muncar Tahun 2007*. Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik Banyuwangi. 2008. *Katalog: Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Muncar Tahun 2008*. Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik Banyuwangi. 2009. *Katalog: Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Muncar Tahun 2009*. Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik Banyuwangi. 2011. *Katalog: Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Muncar Tahun 2011*. Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik Banyuwangi. 2013. *Katalog: Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Muncar Tahun 2013*. Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Banyuwangi.

- Badan Pusat Statistik Banyuwangi. 2014. *Katalog: Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Muncar Tahun 2014*. Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Banyuwangi.
- Damsar. 2015. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi. 2007. *Laporan Tahunan Tahun 2007*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi. 2008. *Laporan Tahunan Tahun 2008*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi. 2009. *Laporan Tahunan Tahun 2009*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi. 2010. *Laporan Tahunan Tahun 2010*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi. 2011. *Laporan Tahunan Tahun 2011*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi. 2012. *Laporan Tahunan Tahun 2012*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi. 2013. *Laporan Tahunan Tahun 2013*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi. 2014. *Laporan Tahunan Tahun 2014*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi.
- Gottschalk, L. 1986. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusaanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Hamdani, H. 2013. *Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisonal*. Atikel Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jember: Universitas Jember.
- Horton, P.B., dan Hunt, C.L. 1996. *Sosiologi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.

- Johns, D.P. 1994. *Teori Sosial Klasik dan Modern Jilid 2*. Terjemahan Robert M.Z Lawang. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirjo, S. 1997. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kingseng, R.A. 2014. *Konflik Nelayan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi Jilid 2*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo.1980. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Perikanan*. Yogyakarta:LKis
- Kusnadi. 2015. *Pemberdayaan Perempuan Pesisir: Pengembangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Budidaya Rumput Laut*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulyadi. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Najib. 2013. *Sistem Pembiayaan Nelayan*. Jakarta: LIPI Press
- Nikijuluw, V.P.H. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. Jakarta: PT. Pusaka Cidesindo.
- Partadiredja, A. 1985. *Pengantar Ekonomi*. Yogyakarta: BPEF Yogyakarta.
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2000. *Laporan Tahunan 2000: Kondisi Perikanan Muncar*. Muncar: UPT PPP Muncar.
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2001. *Laporan Tahunan 2001: Kondisi Perikanan Muncar*. Muncar: UPT PPP Muncar.
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2002. *Laporan Tahunan 2002: Kondisi Perikanan Muncar*. Muncar: UPT PPP Muncar.
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2003. *Laporan Tahunan 2003: Kondisi Perikanan Muncar*. Muncar: UPT PPP Muncar.

- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2004. *Laporan Tahunan 2004: Kondisi Perikanan Muncar*. Muncar: UPT PPP Muncar.
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2005. *Laporan Tahunan 2005: Kondisi Perikanan Muncar*. Muncar: UPT PPP Muncar.
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2006. *Laporan Tahunan 2006: Kondisi Perikanan Muncar*. Muncar: UPT PPP Muncar.
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2007. *Laporan Tahunan 2007: Kondisi Perikanan Muncar*. Muncar: UPT PPP Muncar.
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2008. *Laporan Tahunan 2008: Kondisi Perikanan Muncar*. Muncar: UPT PPP Muncar.
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2009. *Laporan Tahunan 2009: Kondisi Perikanan Muncar*. Muncar: UPT PPP Muncar.
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2010. *Laporan Tahunan 2010: Kondisi Perikanan Muncar*. Muncar: UPT PPP Muncar.
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2011. *Laporan Tahunan 2011: Kondisi Perikanan Muncar*. Muncar: UPT PPP Muncar.
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2012. *Laporan Tahunan 2012: Kondisi Perikanan Muncar*. Muncar: UPT PPP Muncar.
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2013. *Laporan Tahunan 2013: Kondisi Perikanan Muncar*. Muncar: UPT PPP Muncar.
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2014. *Laporan Tahunan 2014: Kondisi Perikanan Muncar*. Muncar: UPT PPP Muncar.
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2015. *Laporan Tahunan 2015: Kondisi Perikanan Muncar*. Muncar: UPT PPP Muncar.
- Pranoto, S.W. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saebani, B. A. 2016. *Perspektif Perubahan Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sajogyo, P. 1985. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: PT Etasa Dinamika .
- Satria, A. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Sjamsuddin, H. 2007. *Metodelogi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soekanto, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sudirman. 2013. *Mengenal Alat dan Metode Penangkapan Ikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyanto. 2009. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jember: Universitas Jember.
- Sukidin, dan Chrysoekamto, H. 2009. *Sosiologi Ekonomi*. Jember: Center for Society Studies.
- Sukidin. 2009. *Ekonomi Pembangunan: Konsep, Teori, dan Implementasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sulistiyono, S.T. 2004. *Sejarah Maritim Indonesia*. Semarang: Kerjasama Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Sunarto, K. 2000. *Pengantar Sosiologi (Edisi Kedua)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Susanto, A.S. 1999. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Putra A. Bardin.
- Susilo, E. 2010. *Dinamika Struktur Sosial dalam Ekosistem Pesisir*. Malang: UB Press.
- Syani, A. 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Sztompka, P. 2005. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Ketiga Cetakan Ketiga. Jember: Jember University Press.
- Widodo, S.K. 2007. *Dinamika Kebijakan Terhadap Nelayan Tinjauan Historis Pada Nelayan Pantai Utara Jawa 1900-2000*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro tanggal 17 Maret 2007.

Widja, I.G. 1988. *Pengantar Ilmu Sejarah dalam Prespektif Pendidikan*. Semarang: Satya Wacana.

Widja, I.G. 1991. *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Bandung: Angkasa Bandung.

Zuhdi, S. 2014. *Nasionalisme Laut dan Sejarah*. Depok: Komunitas Bambu.

### **Jurnal**

Kusmiati. 2007. *Kajian Pemasaran Ikan Lemuru (Sardinella Lemuru) Di Muncar Banyuwangi*. Jurnal Sosiologi Ekonomi Pertanian. Jember: Universitas Jember. Vol.1 No 2: 48-55.

Mira. 2007. *Efisiensi Ekonomi dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Usaha Penangkapan Lemuru Di Muncar, Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jakarta. Vol. 12 No 2: 141-147.

Pamungkas, W.P. 2013. *Implikasi Ekonomi dan Sosial Masyarakat Pesisir Atas Turunnya Hasil Tangkapan Lemuru*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Malang : Universitas Brawijaya.

Purwaningsih, R., Widjaja, S., dan Partiw, S.G. 2012. *Pengembangan Modal Simulasi Kebijakan Pengelolaan Ikan Berkelanjutan*. Jurnal Teknik Industri. ISSN 1411-2485.Vol.14 (1): 25-34.

Santoso, S.H. 2013. *Kemiskinan Nelayan Dalam Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember*. Jurnal Fakultas Ekonomi. Vol. 8 (1): 53-70.

Setyaningrum, E.W. 2014. *Pengembangan Perikanan Tangkap (Alat Tangkap Purse Seine) Berbasis Ikan Lemuru Di Perairan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Laporan Penelitian. Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Wahyono, A., Imron, M., dan Nadzir, I. 2014. *Resiliensi Komunitas Nelayan Dalam Menghadapai Perubahan Iklim: Kasus Di Desa Grajakan Pantai, Banyuwangi Jawa Timur*. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol. 16 No 2.

### **Skripsi**

Muchtar, I. 2000. *Dimensi Ekonomi Politik Pembentukan Hukum Di Bidang Kelautan Dan Perikanan: Kajian Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Muncar*

*Kabupaten Banyuwangi*. Tidak diterbitkan. Tesis. Ilmu Hukum. Semarang: Universitas Diponegoro.

Nugroho, N.W. 2005. *Konflik Nelayan Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Perikanan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 1971-2000*. Tidak diterbitkan. Skripsi.FKIP. Jember: Universitas Jember.

Rahman, A.T. 2009. *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia Tahun 1945-2008*. Tidak diterbitkan. Skripsi.FKIP. Jember: Universitas Jember.

Subagiyo, A. 2006. *Peranan Koperasi Nelayan Mina Blambangan Terhadap Perkembangan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 1975-2011*. Tidak diterbitkan. Skripsi.FKIP. Jember: Universitas Jember.

Widodo, S.J. 2007. *Dinamika Kebijakan Terhadap Nelayan Tinjauan Historis Pada Nelayan Pantai Utara Jawa, 1900-2000*. Tidak diterbitkan. Tesis. Fakultas Sastra. Semarang: Universitas Diponegoro.

### **Internet**

Katalog, G. 2016. *Pola Pemukiman dan Kehidupan Sosial Masyarakat Pesisir Dusun Muncar (Jawa Timur)*.

<http://file:///D:/SEMESTER/SEMESTER%208/2016/DAPUS/INTERNET/POLA%20PEMUKIMAN%20dan%20KEHIDUPAN%20SOSIAL%20MASYARAKAT%20PESISIR%20DUSUN%20MUNCAR%20%28JAWA%20TIMUR%29%20-%20Katalog%20Geografi.htm> [13 April 2016]

Rahayu, F.I. 2014. *Pola Pemukiman dan Kehidupan Sosial Masyarakat Pesisir Dusun Muncar (Jawa Timur)*.

<http://file:///D:/SEMESTER/SEMESTER%208/2016/DAPUS/INTERNET/Tempat%20Ruang%20dan%20Sistem%20Sosial%20%20POLA%20PEMUKIMAN%20dan%20KEHIDUPAN%20SOSIAL%20MASYARAKAT%20PESISIR%20DUSUN%20MUNCAR%20%28JAWA%20TIMUR%29.htm> [13 April 2016].

Salim, A. 2009. *Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timr*

<http://www.slideshare.net/ekpd/hasil-evaluasi-kinerja-pembangunan-daerah-tahun-2009-provinsi-jawa-timur>.

MATRIKS PENELITIAN

Tema Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode Penelitian	Sifat Penelitian	Rumusan Masalah	Sumber Data
Sejarah Maritim	Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015	Penelitian Sejarah	Metode Penelitian Sejarah dengan menggunakan langkah sebagai berikut : 1. Heuristik 2. Kritik 3. Interpretasi 4. Historiografi	Studi Pustaka dan Studi Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kondisi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupten Banyuwangi menjelang Tahun 2000?</li> <li>2. Apa saja faktor-faktor penyebab perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupten Banyuwangi menjelang Tahun 2000-2015?</li> <li>3. Bagaimana bentuk perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupten Banyuwangi menjelang Tahun 2000-2015?</li> <li>4. Bagaimana sikap masyarakat nelayan terhadap perubahan sosial ekonomi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupten Banyuwangi menjelang Tahun 2000-2015?</li> </ol>	Buku penunjang yang diperoleh dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpustakaan Pusat UNEJ</li> <li>2. Perpustakaan Prodi Sejarah</li> <li>3. Koleksi Pribadi.</li> </ol> Selain itu, data juga diperoleh dari Wawancara dan Observasi.



**Lampiran B. Pedoman Wawancara****PEDOMAN WAWANCARA****1. Dinas Kelautan dan Perikanan Muncar**

1. Bagaimana kondisi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo menjelang tahun 2000 (diterapkannya kebijakan Otonomi Daerah), apa adakah perubahan yang terjadi?
2. Kebijakan apa saja yang sudah dan diterapkan dalam pengelolaan sektor perikanan laut di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar?
3. Bagaimana sikap masyarakat menanggapi kebijakan yang diterapkan?
4. Apakah ada program pembinaan atau penyuluhan yang dijalankan oleh dinas?
5. Bagaimana sarana dan Prasarana yang diberikan pemerintah untuk menunjang perikanan di Desa Kedungrejo ini?
6. Bagaimana peranan dinas dalam sektor perikanan laut di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar?
7. Permasalahan apa saja yang menjadi prioritas dinas untuk segera ditangani dan dicari solusinya?
8. Berapa jumlah TPI yang ada di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dan bagaimana perannya untuk pemasaran hasil tangkapan nelayan?
9. Bagaimana produksi ikan tahun 2000-2015?
10. Bagaimana pengelolaan hasil tangkap perikanan?
11. Bagaimana sistem pemasaran perikanan?

## **2. Unit Pengelolaan Perikanan Pantai Muncar**

1. Bagaimana produksi ikan nelayan Kedungrejo tahun 2000-2015?
2. Bagaimana hasil rata-rata tangkapan ikan nelayan Kedungrejo tahun 2000-2015?
3. Bagaimana perkembangan armada kapal dan alat tangkap yang digunakan nelayan Kedungrejo?
4. berapa jumlah nelayan menurut jenis alat tangkap yang digunakan nelayan Kedungrejo?
5. Bagaimana pengolahan hasil tangkap perikanan nelayan Kedungrejo?
6. Bagaimana pemasaran hasil tangkap perikanan nelayan Kedungrejo?

## **3. Masyarakat Nelayan**

1. Bagaimana kondisi masyarakat nelayan Desa Kedungrejo Muncar?
  - a. kinerja antar nelayan
  - b. hubungan kemasyarakatan
2. Bagaimana pendapatan nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar?
3. Bagaimana sikap masyarakat nelayan Kedungrejo terhadap tingkat pendidikan? Permasalahan apa yang sering dihadapi nelayan Kedungrejo Muncar?
4. Jika ada (terkait no 3) bagaimana solusi yang diberikan dalam menyikapi permasalahan tersebut?
5. Apa saja bantuan yang telah diberikan pemerintah terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan?

**Lampiran C. Profil Informan**

## C.1 Profil Informan Pendukung



Nama : Abidin  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Usia : 58 tahun  
Pekerjaan : Pengawas Perikanan  
Muncar



Nama : Hasan Basri  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Usia : 57 tahun  
Pekerjaan : Ketua HNSI



Nama : Sahlam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Usia : 54 tahun  
Pekerjaan : Kepala Dusun Muncar



Nama : Saham  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Usia : 55 tahun  
Pekerjaan : Kepala Dusun Kalimoro



Nama : Anton Ansori  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Usia : 56 tahun  
Pekerjaan : Kepala Dusun  
Sampangan



Nama : Samsul Arifin  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Usia : 54 tahun  
Pekerjaan : Kepala Dusun Stoplas



Nama : Sudirman  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Usia : 38 tahun  
Pekerjaan : Tokoh Pemuda Muncar

## C.2 Daftar Informan

	<p>Nama : Abul Azis  Pekerjaan : Juragan laut  Alamat : Dsn. Muncar  Profil :</p> <p>Abdul Hasis adalah nelayan pemilik perahu yang biasa disebut juragan kapal. Beliau memiliki beberapa perahu yang ada disekitar pelabuhan. Beliau sudah bekerja hampir 20 tahun sebagai nelayan pandega dan baru 5 tahun menjadi juragan kapal sejak tahun 2011.</p>
	<p>Nama : Amaliyah  Pekerjaan : Tepungan Ikan  Alamat : Dsn. Stoplas  Profil :</p> <p>Amaliyah adalah salah satu pengusaha tepung ikan yang masih bertahan di kedungrejo. Penepungan ikan yang biasanya dilakukan dengan cara tradisional kini telah digantikan dengan mesin dari pabrik besar.</p>
	<p>Nama : Halim  Pekerjaan : Nelayan Pandega  Alamat : Dsn. Sampangan  Profil :</p> <p>Halim adalah seorang nelayan pandegan kapal sejak tahun 2000. Selain nelayan pada sore beliau memiliki pekerjaan lain pada pagi hingga siang hari yaitu sebagai penjaga sekolah di SDN 3 Kedungrejo.</p>
	<p>Nama : Nurul  Pekerjaan : Nelayan Pandega  Alamat : Dsn. Sampangan  Profil :</p> <p>Sama seperti Halim, Nurul adalah seorang nelayan pandegan beliau adalah menantu dari pak Halim. Selain menjadi nelayan pandega beliau juga menjadi penjaga di SDN 3 Kedungrejo. Nurul memiliki 2 orang anak yang masih sekolah. Anak pertama masih Sekolah Dasar dan anak kedua masih balita. Sedangkan istrinya tidak memiliki kegiatan produktif lainnya.</p>
	<p>Nama : Endang  Pekerjaan : Pemandangan Ikan  Alamat : Dsn. Sampangan  Profil :</p> <p>Endang adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus juragan pemandangan di Kedungrejo. Beliau sudah melakukan usaha ini sejak tahun 2000, melanjutkan usaha keluarganya. Pemasaran yang dilakukan di luar Kabupaten Banyuwangi terutama di Surabaya</p>

## Lanjutan: Daftar Informan



Nama : Mistari  
 Pekerjaan : Nelayan Pendega  
 Alamat : Desa Sampangan  
 Profil : Maisan bekerja sebagai nelayan pandega sejak tahun 2006, setelah menyelesaikan pendidikan SMA beliau langsung bergabung menjadi kru laut salah satu juragan laut. Maisan belum memiliki istri dan masih tinggal bersama orang tuanya yang bekerja sebagai buruh pabrik es.



Nama : Kusnaldi  
 Pekerjaan : Kapten kapal  
 Alamat : Desa Kalimati  
 Profil : Kusnaldi adalah kapten kapal disalah satu kapal sleret Muncar. Beliau memiliki tugas sebagai pemandu arah penangkapan ikan dan juga memandu penangkapan ikan, sesuai panduan juragan laut ini ABK akan menurunkan jaring-jaring dan mengangkat sesuai arahnya.



Nama : Katman  
 Pekerjaan : Nelayan Pandega  
 Alamat : Desa Kalimati  
 Profil : Katman merupakan nelayan pandega yang mengawasi kelengkapan kapal. Mulai dari jaring-jaring dan pendingan hasil tangkapan atau ikan dalam kapal.



Nama : Baihaki  
 Pekerjaan : Pedagang Ikan Kecil  
 Alamat : Ds. Kedungrejo  
 Profil : Baihaki merupakan nelayan kecil yang menjual ikan di disekitar pelabuhan terkadang menjual ikan di dalam pasar

## HASIL WAWANCARA (Informan Pendukung)

1. Nama : Abidin  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 58 tahun  
Pekerjaan : Pengawas Perikanan Muncar

Masyarakat nelayan Desa Kedungrejo adalah nelayan pendatang dari berbagai daerah diluar Kabupaten Banyuwangi seperti Bondowoso, Probolinggo, dan terbanyak dari Madura. Masyarakat nelayan disini terdiri etnis seperti Jawa, Madura, Bugis dan Cina yang dominan disepanjang pantai Muncar pada tahun 2000-2015 sangat tidak terlalu signifikan dalam perubahan. Pada era 70an sangat dibawah garis fisik minimum, rumah terbuat dari rumbia, memasuki era 80an masyarakat sudah memiliki alat tangkap yang baru, etnis Cina yang membawa alat tangkap modern, awalnya banyak masyarakat yang cemburu sosial sehingga tahun 1974 terjadi pembakaran kapal. Masyarakat msaih awam karena tidak ada penyuluhan, sejak tahun 1976 pemerintah memberi kredit alat tangkap purse sein yang dipakai hingga saat ini. Terjadilah perubahan sosial ekonmi awalnya pendapatan nelayan peroleh sekitar 300-500 sekarang bisa mendapat puluhan juta. Pada jenjang pendidikan sebelum 2000 masih pendidikan SD atau SMP karena ada transformasi teknologi dan pendidikan, membuat masyarakat paham pentingnya pendidikan. Sehingga banyak anak nelayan yang bersekolah tinggi sampai sarjana dan bahkan menjadi dokter. Masyarakat nelayan dulu bersifat konsumtif dengan membeli emas sekarang sudah mengenal perbankan dan beralih membeli sawah.

Sejak tahun 2000 pola pemikiran masyarakatnya lebih rasional dan bukan lagi tradisional. Kebijakan daerah tahun 1999 justru memfokuskan pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mengikuti aturan pemerintah asalkan tidak merugikan Nelayan. Adapun UU No 23 Tahun 2015 terkait dengan perikanan terhadap kewenangan kabupaten di daerah peisir sudah ditarik an digantikan oleh kewenangan provisnis dibawah gubernur. Hal ini membuat masyarakat resah. Dulu perijinan alat tangkap dibawah pemerintah kabupaten searang dipindahkan dibawah provisi yang notabennya masih belum sanggup melaksanakan.

### HASIL WAWANCARA (Informan Pendukung)

2. Nama : Hasan Basri  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 57 tahun  
Pekerjaan : Ketua HSNI

Pada masyarakat nelayan Kedungrejo dikenal dua musim, yakni musim basah dan musim kering. Musim basah adalah musim perolehan hasil tangkap yang cukup tinggi. Musim basah biasanya dimulai pada bulan Nopember sampai bulan Maret. Pada pertengahan musim basah yakni sekitar bulan Januari terdapat angin barat daya. Pada musim kering terjadi antara bulan April sampai bulan Oktober. Pada pertengahan musim kering, yakni sekitar bulan Agustus terdapat angin Timur yakni angin yang bergerak dari timur ke barat. Semakin tahun SDI yang ada di Selat Bali semakin menurun, sehingga perlunya nelayan mengetahui penyebab turunnya. Nelayan harus bisa mempunyai mensek tentang alat tangkap yang panjang dan begitu besar akan tetapi hasil tangkapannya nihil. Dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana akan membuat sumber daya alam masih tersedia. Alat tangkap yang digunakan setelah modernisasi sampai sekarang tetap menggunakan porsen sein dengan Perahu slerek yang menggunakan 2 perahu dengan jumlah kapal 197, sejak tahun 2000 tinggal 50 unit porsen sein berpindah dengan menggunakan 1 perahu atau perahu kapalan/ gardan dengan biaya yang lebih kecil karena jumlah SDI yang tidak melimpah seperti dulu. ABK perahu sleret 40-50 orang dan yang memakai 1 perahu 20-25 orang sudah bisa mlaut. Dalam pembagian hasil sesuai dengan sistem kontrak yang telah disepakati. Kebijakan oleh pemerintah daerah sudah baik, dalam perikanan ada 3 bidang. Yang sangat penting; 1) bidang nelayan tangkap, 2) bidang budidaya, 3) pengolahan hasil ikan (*home industri*).



### HASIL WAWANCARA (Informan Pendukung)

3. Nama : Sahlam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 54 tahun  
Pekerjaan : Kepala Dusun Muncar

Kondisi Masyarakat nelayan sebelum tahun 2000 tidak ada kemajuan (masih sederhana) menggunakan alat tangkap yang sangat sederhana yaitu kail, jala, serok, dan berbagai perangkap ikan alat. Masyarakat nelayan yang ada di Desa Kedungrejo khususnya dusun Muncar ini dulu kondisi sosial ekonominya masih belum sejahtera, hal ini dilihat dari pendapatan nelayan yang tidak menentu tergantung kondisi laut. Adapun permasalahan yang dihadapi nelayan yaitu tentang jaminan sosial saat di laut. Adanya kecelakaan dilaut masyarakat kurang mendapatkan bantuan dari pemerintah terkait dengan kesejahteraan masyarakat nelayan. Adapun bantuan yang diberikan pemerintah terkadang tidak tepat sasaran yang membuat nelayan merasa tidak diperhatikan.

Pada tingkat pendidikan sudah mengalami kemajuan sejak adanya bantuan dari pemerintah. Anak-Anak nelayan sudah banyak yang bersekolah, walaupun sebagian besar disekolahkan dipondokan. Adapun juga penurunan buta huruf dengan adanya program belajar dari pemerintah.

HASIL WAWANCARA  
(Informan Pendukung)

4. Nama : Saham  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 55 tahun  
Pekerjaan : Kepala Dusun Kalimati

Di Muncar hubungan sosial antar nelayan sangat tinggi hal ini terlihat dari sikap solidaritas pada saat penangkapan ikan, jika ada perahu yang mendapatkan kelebihan muatan nelayan yang berada di pesisir pantai langsung datang menolong tanpa melihat pemilik kapal atau juragan yang berbeda. Adapun saat padang bulan, pada saat ini nelayan tidak melaut melainkan nelayan bekerja sama merakit jaring, biasanya nelayan pada malam hari pergi bersama ke rumah juragan untuk membetulkan jaring-jaring yang rusak atau berlubang pada saat penangkapan ikan serta memperbaiki kapal pada siang hari di pelabuhan. Nilai sosial merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam menjalin komunikasi serta interaksi antar nelayan .

### HASIL WAWANCARA (Informan Pendukung)

5. Nama : Anton Ansori  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 56 tahun  
Pekerjaan : Kepala Dusun Sampangan

Pada masyarakat dusun sini banyak yang menjadi nelayan dan menjadi belantik. Kehidupan masyarakat nelayan sejak tahun 2000 perubahan tidak terlalu tampak. Masuknya budaya penggunaan alat tangkap yang baru tentu akan menimbulkan suatu pertentangan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern hal ini timbul karena rasa cemburu sosial dalam masyarakat. Akan tetapi seiring waktu penggunaan alat tangkap baru ini bisa diterima oleh masyarakat tradisional terkait dengan upaya peningkatan hasil tangkapan. Masyarakat Nelayan Kedungrejo memiliki sifat konsumtif dan mudah terpengaruh dengan kondisi yang sedang terjadi. Selama perubahan yang terjadi tidak mengganggu keberlangsungan kehidupan terutama dalam bidang ekonomi sangat mudah diterima oleh nelayan itu sendiri.

Adapun konflik masyarakat pesisir khususnya di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar muncul karena dampak modernisasi perikanan. Beroperasinya jaring purse seine milik para nelayan cina, dalam operasinya bergerak tanpa menghiraukan posisi alat tangkap tradisional, selain itu dalam operasinya alat tangkap tersebut tidak mengenal waktu dan daya jelajah sangat melebihi alat tangkap tradisional yang mampu bergerak sejauh 3 mill. Kondisi ini telah menimbulkan perebutan daerah tangkap (*fishing ground*) sehingga nelayan dengan alat tangkap tradisional ada dalam posisi yang dirugikan karena kalah bersaing dengan nelayan pengguna *mini trawl* dan jaring *purse seine* dan menimbulkan kecemburuan para nelayan kecil yang pada perkembangan dapat memicu konflik antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah

### HASIL WAWANCARA (Informan Pendukung)

6. Nama : Samsul Arifin  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 54 tahun  
Pekerjaan : Kepala Dusun Stoplas

Masyarakat yang ada didusun stoplas 25% hanya nelayan, tetapi lebih condong ke industri rumahan atau home industri. Pemuda sudah banyak lulusan SMA lain sebelum tahun 2000 masih hanya lulusan SD. Tetapi pemudanya lebih memilih kerja di pabrik dari pada sebagai nelayan. Hubungan antar masyarakatnya sangat kompak, karena banyak pertemuan rutin setiap minggu. Dusun ini dianggap sebagai dusun percontohan. Pada tahun 1990 ikan hanya 5 ton tidak dapa kalu dapat 15 baru ole. Kalau sekarang 5 kerajang bisa dianggap. Adanya pembanguan pelabhan yang dibangun sebagi transit, kapal yang mau ke gilimanuk. Kalau dilihat dari fisik rumah sudah sangat bagus, tapi alau sudah masuk rumah tanya pendapatan. Secara umum muncar gka da yang miskin akan tetapi al tahun2 dulu masyarakat sekatrang trmasuk miskin. Kalau ABK dalam untuk mencuupi masyarakat sudah sangat cukup.

### HASIL WAWANCARA (Informan Pendukung)

7. Nama : Sudirman  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 38 tahun  
Pekerjaan : Tokoh Pemuda Muncar

Masyarakat nelayan di Desa Kedungrejo ada 3 kelompok yaitu kelompok purse sein alat tangkap diatas 30 GT, kelompok setetan 10 GT kebawah, kelompok pancing. Kinerja nelayan disesuaikan kondisi alam, ada waktu penuh bisa melaut masyarakat waktunya dengan bulan hijrah pada saat padang bulan. Pedagang kecil di pantai dan dipasar, kalau dipantai membeli hasil tangkapan yang volume kecil yang volume besar masuk pabrik. Pedagang darat misalnya pengsin, ada pedang ikan segar pemasaran langsung bisa dikonsumsi biasanya nelayan ada di brak atau TPI. Pengelolaan hasil tangkap ikan sebelum tahun 2000 kejumlah perusahaan tidak terlalu banyak permintaan sedikit dan penawaran banyak sehingga harga ikan turun. Mulai tahun 2000 banyak perusahaan banyak dan jenisnya banyak pengalengan, tepungan, dan pengasinan. Sehingga harga antara permintaan dan penawaran seimbang sehingga harga ikan naik. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan kesejahteraan disambut baik oleh masyarakatnya karena merupakan aturan. Khusus Perikanan di Muncar ini sudah memenuhi standar aturan perikanan tinggal teknis pengawasan saja dari instansi terkait. Adanya aturan ini tentu membuat kaget karena pola berfikir yang sudah merasa nyaman karena itu perlu adanya sosialisasi.

### HASIL WAWANCARA (Informan Nelayan)

8. Nama : Abdul Azis  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Juragan Laut  
Alamat : Dusun Muncar

Juragan laut bertanggung jawab mulai dari pemberangkatan perahu, mengemudikan perahu juga sebagai pemberi komando dalam proses penangkapan ikan termasuk bertanggung jawab pada keselamatan anak buahnya dilaut. Jika terdapat insiden (konflik) antar pandega dilaut maka juragan laut berperan sebagai penengah untuk melerainya, begitu juga jika terjadi musibah dilaut misalnya, perahu berbenturan dengan perahu lain atau tabrakan, maka orang yang menyelesaikan juragan laut sampai dibawa ke daratan dan diputuskan pembiayaannya, tetapi pembiayaan ditanggung juga oleh juragan darat.

Pada masyarakat nelayan terdapat pembagian hasil biasanya sebelum berangkat mengambil bon di pertamina (solar). Pembagian hasil yang dilakukan nelayan awalnya hasil tangkapan dipotong dengan biaya operasi dan bekal, 50% pemilik kapal, dan 50% nelayan yang bekerja yang dalam pembagian terdapat bagian yang berbeda antara juru mudi, juru lampu, pendega. Untuk pemasaran hasil tangkapan biasanya perahu yang datang langsung disambut pengambak, harga penjualan ditentukan saat ikan turun.

Bantuan yang berikan pemerintah berupa jaring, atau modal usaha diberikan kepada setiap kelompok nelayan. Satu kelompok nelayan terdiri dari 30 nelayan. Pada pemberian bantuan biasanya mengajukan kepada pemerintah daerah untuk mendapat modal. Tetapi tidak jarang syarat ketentuan sudah dipenuhi akan tetapi bantuan belum datang.

HASIL WAWANCARA  
(Informan Nelayan)

9. Nama : Halim  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Nelayan Pandega  
Alamat : Dusun Sampangan

Nelayan Desa Kedungrejo banyak memiliki mata pencaharian ganda. Hal tersebut merupakan cara nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebab apabila hanya mengadakan satu bidang pekerjaan saja tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Mata pencarian nelayan Desa Kedungrejo utamanya adalah pada sektor kelautan yaitu nelayan sedangkan pekerjaan lainnya adalah pekerjaan sambilan. Hal tersebut karena kondisi dan pengaruh alam sangat erat sehingga nelayan berusaha mencukupi kebutuhannya dengan berkerja ganda.

Kebutuhan bahan pokok yang meningkat membuat nelayan pandega bekerja lebih keras. Dengan penghasilan yang hanya tergantung dari hasil tangkapan dalam perahu yang diperoleh. Sebelum ada bantuan dari pemerintah nelayan hanya mendapatkan hasil tangkapan yang sedikit sekitar Rp. 50.000- Rp 100.000 perhari, tetapi sejak adanya bantuan modal usaha dari pemerintah penhasilan tangkapan meningkat membuat pendapatan nelayan bertambah hingga beberapa ratus ribu sekitar  $\pm$  Rp 300.000 perhari jika musim panen.

HASIL WAWANCARA  
(Informan Nelayan)

10. Nama : Nurul  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Nelayan Pandega  
Alamat : Dusun Sampangan

Nelayan berusaha melakukan pemenuhan kebutuhan dengan melakukan berbagai pekerjaan sambilan. Hal ini untuk kehidupan anak-anak nelayan agar mendapat pendidikan yang baik, serta mampu merubah nasib. Kondisi nelayan yang sederhana tidak bisa memotivasi dirinya untuk memberikan pendidikan yang tinggi terhadap anaknya, nelayan hanya beranggapan cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keberlangsungan hidupnya. Pemikiran semacam ini turu-temurun hingga generasi berikutnya. Pada pendidikan, anak nelayan tidak ada yang ingin melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, justru anak-anak nelayan beranggapan bahwa walaupun sekolah tinggi tapi pada akhirnya bekerja sebagai nelayan juga. Sebagian besar nelayan hanya sebagai lulusan SD/ Sekolah Dasar, pemahaman ilmu yang dimiliki masih jauh tertinggal khususnya dalam pengembangan teknologi alat tangkap. Nelayan Kedungrejo mendasarkan pengetahuan dalam usaha penangkapan ikan secara terkaji namun hanya berdasarkan pengalaman selama ini yang telah dialami.



HASIL WAWANCARA  
(Informan Nelayan)

11. Nama : Baihaki  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Pedagang Kecil  
Alamat : Dusun Kalimati

Pedagang kecil biasanya membeli ikan dari nelayan pandega atau *Menyo*. *Menyo* bertugas mengawal ikan yang baru turun dari kapal menuju pemindangan dan memberikan informasi tentang harga ikan dari pengambang atau juragan darat pada konsumen. Jika belantik memiliki modal belantik juga membeli ikan dari jatah lauk pauk ABK yang nantinya dijual kepada pengecer. Ikan yang dijual pedagang kecil dengan harga yang sedikit lebih mahal, misal jika ikan tongkol dijual dipasar Rp. 13.000/kg para pedang kecil akan menjual dengan harga Rp. 14.500/kg. Adanya bantuan dari pemerintah tidak terlalu berdampak terhadap nelayan kecil. Hal ini karena banyaknya hasil tangkapan ikan tetap ditentukan oleh belantik serta juragan darat.

HASIL WAWANCARA  
(Informan Nelayan)

12. Nama : Amaliyah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Tepungan  
Alamat : Dusun Stoplas

Pada tepungan berbagai ikan bagus dari tolakan ikan sarden bisa diolah menjadi tepungan untuk pakan ternak baik ditambak maupun dijual di luar kota. Kalau dulu penepungan dilakukan dengan merebus dengan dijemur. Untuk sekarang penepungan dilakukan dipabrik dengan mengambil ikan dari pabrik sarden yang tidak terpakai dijual basah, ditimbang dan dijual kembali ke pabrik untuk melakukan penepungan. Dengan demikian kinerja pabrik yang digunakan untuk pengolahan dengan harga yang sedikit turun tetapi dalam prosesnya cepat sehingga banyak nelayan tepungan yang berhenti melihat modal yang besar dengan hasil yang tidak seimbang.

HASIL WAWANCARA  
(Informan Nelayan)

13. Nama : Endang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pemindangan  
Alamat : Dusun Sampangan

Pada pengolahan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Kedungrejo utamanya adalah pengalengan ikan, tepungan ikan, dan pemindangan. Terkait dengan banyaknya pabrik dan industri rumahan dalam pengolahan hasil tangkap ikan di Desa Kedungrejo sebagai pusat perindustrian perikanan. Memasuki tahun 2002 nelayan berusaha mengoptimalkan pengolahan hasil tangkapan dengan melakukan pengasinan dan cold storage. Hal ini justru berdampak negatif pada usaha industri rumahan atau *home industry* khususnya pemindangan. Banyak industri rumahan yang gulung tikar akibat adanya pabrik cold storage selain itu hasil tangkapan yang ikan yang menurun karena kondisi alam yang tidak menentu dan terkadang hasil tangkapan ikan saat sampai di pelabuhan langsung masuk ke pabrik pengalengan ikan, sehingga banyak pengusaha industri rumahan yang gulung tikar.

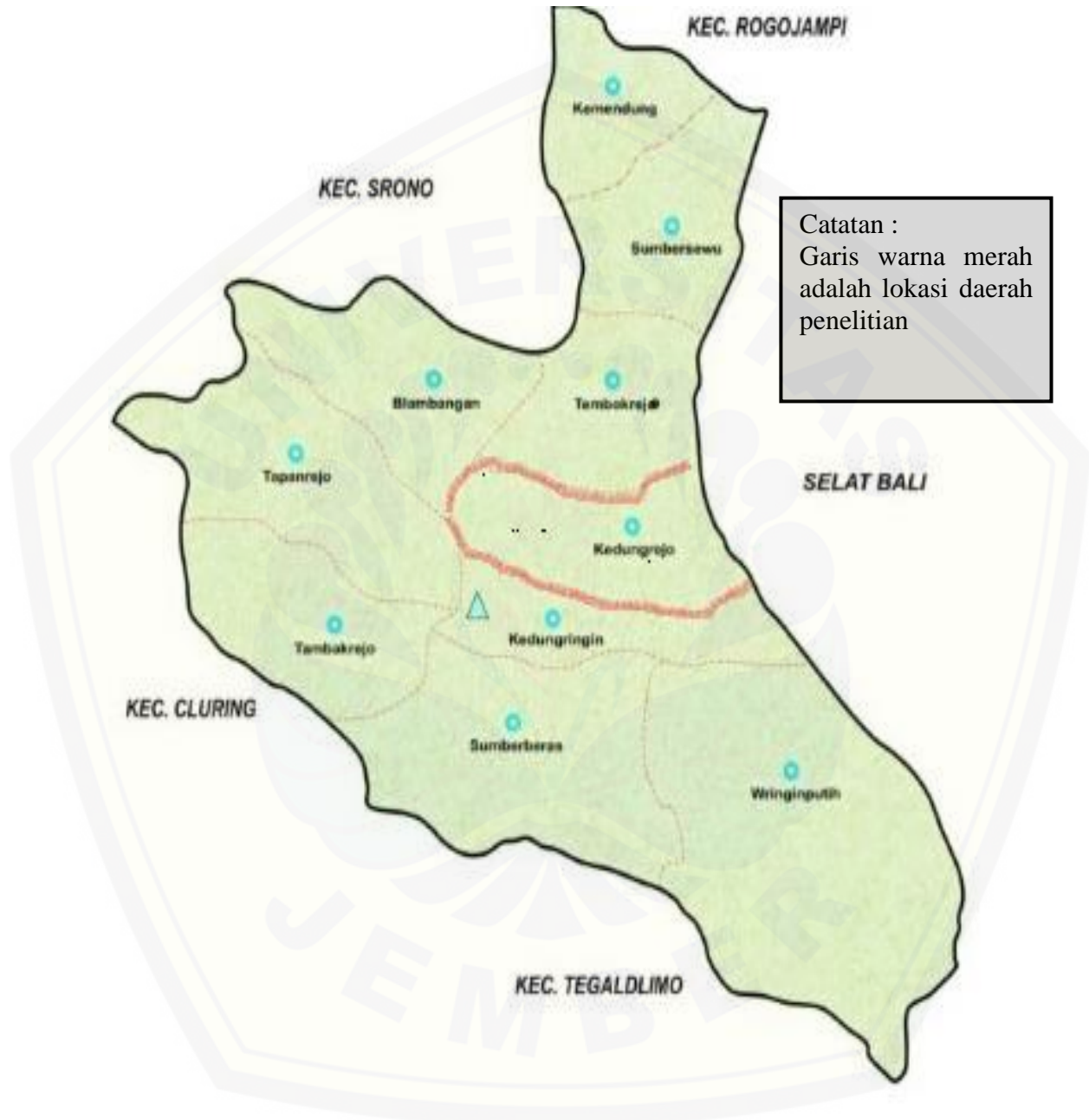
Pemasaran yang dilakukan hanya diluar kota Bondowoso, Jember terutama di Surabaya. Ikan yang digunakan ikan tongkol, selengseng, ikan layang/ mernyeng. Pada prosesnya pemindangan membutuhkan waktu yang agak lama. Selain itu kualitas ikan jika tidak didistribusikan cepat akan mengalami penurunan kualitas ikan, sehingga harga jual ikan menjadi turun. Sejak banyak pabrik yang berdiri dimuncar, banyak nelayan pindangan yang gulung tikar karena hasil tangkapan nelayan banyak yang langsung masuk perusahaan.

Lampiran D. Peta Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Muncar, Desa Kedungrejo, Dan Pelabuhan Muncar

D.1 Peta Kabupaten Banyuwangi

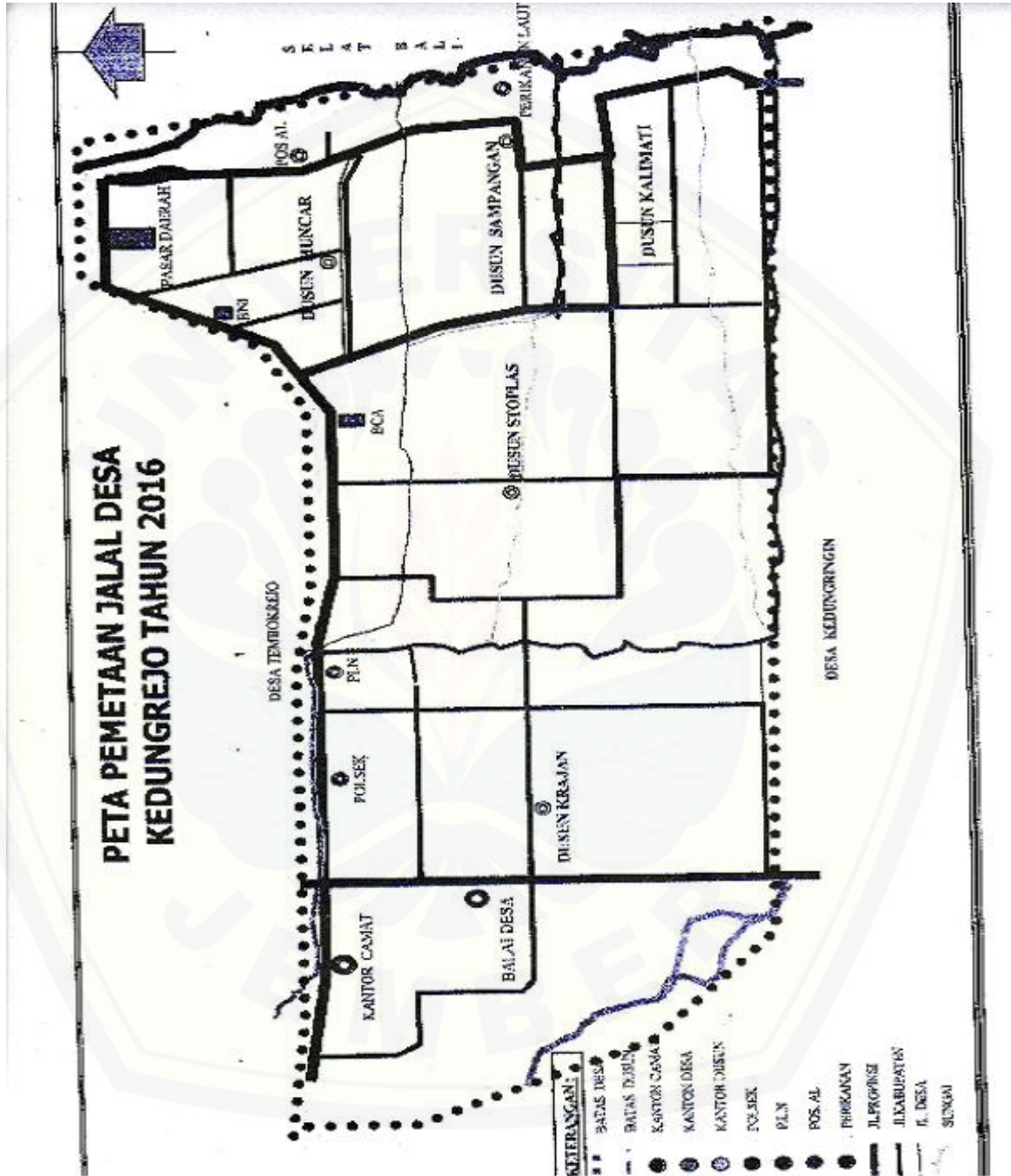


Gambar D.1 Peta Kabupaten Banyuwangi, Sumber: Chalif Latif 2000, Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia, halaman 14

**D.2 Peta Kecamatan Muncar**

Gambar D.2 Kecamatan Muncar , Sumber: Chalif Latif 2000, Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia

D.3 Peta Desa Kedungrejo



**D4. Peta Pelabuhan Muncar**

Gambar D.4 Denah Pelabuhan Muncar, sumber: UPPPMuncar

## LAMPIRAN E. GAMBAR PENELITIAN

### E.1 Kegiatan Nelayan



*Gambar E.1a Kegiatan penangkapan ikan*



*Gambar E.1b Proses perpindahan ikan ke kapal*





*Gambar E.1c Proses perpindahan ikan dari perahu*



*Gambar E.1d Pembahanan jaring-jaring*

## E.2 Fasilitas Penunjang Perikanan Muncar



Gambar E.2a Rumah Dinas Di Pelabuhan



Gambar E.2b Kantor POLARIUD



Gambar E.2.c Kantor Syahbandar



Gambar E.2.d KUD MINO



Gambar E.2.e SPBN Pelabuhan



Gambar E.2.f Kantor PP

**E.3 Pembangunan Pelabuhan Perikanan Muncar**



**E.4 Wawancara dengan Narasumber**



*Gambar E.4a.wawancaradenganBapakAbidin  
(DinasKelautandanPerikananMuncar)*




*Gambar E.4b.wawancaradenganIbu Indah Setyorini  
(Unit PengelolaanPerikananPantaiMuncar)*



*Gambar E.4c Wawancara dengan pemilik kapal sleret*

## Lampiran F. Surat-Surat

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	
	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> KABUPATEN BANYUWANGI Jalan KH. Agus Salim No. 109 Banyuwangi BANYUWANGI 68425	

---

Nomor	: 072/703/REKOM/429.204/2016	Banyuwangi, 13 Juli 2016
Lampiran	: -	Kepada
Sifat	: Biasa	Yth. 1. Ka. Dinas Kelautan dan Perikanan
Perihal	: <b>Rekomendasi Penelitian</b>	2. Camat Muncar
		3. BPS

di  
**BANYUWANGI**

Menunjuk Surat	: Pembantu Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember
Tanggal	: 22 Juni 2016
Nomor	: 7134/UN25.1.5/LT/2016
Bersama ini diberitahukan	
N a m a	: <b>MAGDALENA YULI PURWATI</b>
N I M	: <b>120210302096</b>

Bermaksud melaksanakan Penelitian


Judul	: Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015
Tempat	: Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
Waktu	: 13 Juli s/d 13 November 2016

Schubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Mclaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

At. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANYUWANGI  
Kahid Bina Keturunan, Pembinaan dan Wawasan Kebangsaan

  
**Drs. TR. WIDODO, M.Si**  
Pembina/Tingkat I  
NIP. 19601014 199103 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan K.H. AgusSalim Nomor 106 Telepon (0373) 421418  
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : [disperikanan@banyuwangikab.go.id](mailto:disperikanan@banyuwangikab.go.id)  
**BANYUWANGI**

Banyuwangi, 22 September 2016

Nomor : 523/2663/429.113/2016  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Penelitian Skripsi

Kepada  
 Yth. 1 Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai  
 Muncar  
 2 Administratur TPI Muncar

di  
**MUNCAR**

Berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyuwangi tanggal 5 September 2016 Nomor: 072 / 703 / REKOM /429.204 / 2016 perihal izin penelitian, maka bersama ini disampaikan bahwa:

Nama : **MAGDALENA YULI PURWATI**  
 NIM : 121210302096

selaku mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jember akan melaksanakan penelitian dengan judul Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan pada tanggal 13 Juli – 13 November 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon Saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan bagi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 KABUPATEN BANYUWANGI



**Te. FIDIO HARTANTO, M.P.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631213 199202 1 002

Tembusan:  
 Yth. I. Camat Muncar



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

## KECAMATAN MUNCAR

Jalan Hayam Wuruk Nomor: 14 Telepon Nomor: (0333) 593008

## MUNCAR

[www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id) e-mail: [kec\\_muncar@banyuwangikab.go.id](mailto:kec_muncar@banyuwangikab.go.id)

Muncar, 20 Juli 2016

Nomor : 072/ *448*/429.511/2016 Kepada  
 Sifat : Biasa Yth.Sdr. 1. Ka. BPPPI Muncar  
 Lampiran : - 2. Koordinator UPT Perikanan Muncar  
 Perihal : Rekomendasi Penelitian 3. Kepala Desa Kedungreja

di-

## MUNCAR

Menunjuk surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 Juli 2016 Nomor: 072/703/REKOM/429.204/2016 perihal sebagaimana Rekomendasi Penelitian, bersama ini diberitahukan :

Nama : **MAGDALENA YULI PURWATI**

NIM : **120210302096**

Instansi : Universitas Jember

Bermaksud melaksanakan Penelitian Pengambilan Data di :

Judul : *"Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Kedungreja Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2015"*.

Tempat : Desa Kedungreja

Waktu : 13 Juli s/d 13 November 2016

Sehubungan dengan hal tersebut mohon bantuan saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/ keterangan yang diperlukan dengan ketentuan kepada peserta :

1. Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Instansi;
2. Wajib menjaga situasi dan Kondisi selalu Kondusif;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum atas bantuannya disampaikan terima kasih.



CAMAT MUNCAR

**YUSDI IRAWAN, SE.M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 196805121994031007





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN MUNCAR  
DESA KEDUNGREJO  
Jalan. A. Yani Nomor 32 Telp. ( 0333 ) 592026  
KEDUNGREJO 68472**

Kedungrejo, 09 Agustus 2016

Nomor : 007/ 67 /429.511.02/2016 Kepada,  
Sifat : Penting / segera Yth, Sdr. Kepala Dinas Instansi/Lembaga dan  
Lamp : - Kepala Dusun Desa Kedungrejo  
Perihal : Pemberian Ijin Penelitian di-

**KEDUNGREJO**

Berdasarkan surat Camat Muncar tanggal 20 Juli 2016  
Nomor.072/948/429.511./2016 Perihal Rekomendasi Penelitian, bersama ini

kami telah Memberikan Ijin Penelitian kepada Universitas di bawah ini :

Nama : MAGADAELA YULI PURWATI NIM.120210302096  
Instansi : Universitas Jember

Bermaksud melaksanakan Penelitian Pengambilan Data sbb :

Judul : " *Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat nelayan Desa  
Kedungrejo Kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi*"

Tempat : Desa Kedungrejo Kec.Muncar Kab.Banyuwangi-Jatim

Waktu : 13 Juli s/d.12 Nopember 2016

Selanjutnya untuk mengadakan Penelitian di Instansi/Lembaga dan Kepala  
Dusun di wilayah Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kab.Banyu –  
wangi.

Demikian atas bantuan dan kerja samanya yang baik kami sampaikan terima  
kasih.



**Lampiran G.1 Undang-Undang No 25 Tahun 2000**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)  
NOMOR 25 TAHUN 2000 (25/2000)  
TENTANG  
PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 2000-2004 mengamatkan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS);
- b. bahwa Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) yang memuat kebijakan secara rinci dan terukur dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Undang-undang tentang Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) Tahun 2000-2004;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;

Dengan persetujuan bersama antara  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004.

Pasal 1

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dan penyelenggara negara lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun.

Pasal 2

Sistematika Program Pembangunan nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 disusun sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
BAB III	:	PEMBANGUNAN HUKUM
BAB IV	:	PEMBANGUNAN EKONOMI

BAB V	:	PEMBANGUNAN POLITIK
BAB VI	:	PEMBANGUNAN AGAMA
BAB VII	:	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
BAB VIII	:	PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA
BAB IX	:	PEMBANGUNAN DAERAH
BAB X	:	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAB XI	:	PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
BAB XII	:	PENUTUP

Pasal 3

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-undang ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN).

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2000  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 206

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2000  
TENTANG  
PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004

## BAB I PENDAHULUAN

### A. UMUM

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Rapat Paripurna ke-12, Sidang Umum MPR pada tanggal 19 Oktober 1999, menetapkan TAP/IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004. GBHN 1999-2004 tersebut memuat arah kebijakan penyelenggaraan negara untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara negara, termasuk lembaga tinggi negara, dan seluruh rakyat Indonesia, dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan, dalam kurun waktu tersebut,

Sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004, arah kebijakan penyelenggaraan negara tersebut dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (propenas) yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya Propenas diperinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.

Propenas, sebagai penjabaran dari GBHN 1999-2004, merupakan rencana pembangunan lima tahunan. Dengan demikian, kerangka waktu Propenas adalah tahun 2000-2004. Walaupun Propenas baru akan diundangkan pada akhir tahun 2000, pada kenyataannya semangat yang dicantumkan dalam GBHN 1999-2004 telah digunakan dalam penyusunan APBN 2000. Hal ini dimungkinkan karena pada tahun pertama pelaksanaan GBHN 1999-2004, kepada Presiden diberi kesempatan untuk melakukan langkah-langkah persiapan, penyesuaian guna menyusun Propenas dan repeta dengan tetap memelihara kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara. Selama belum ditetapkan rencana pembangunan tahunan berdasarkan GBHN 1999-2004, pemerintah dapat menggunakan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk tahun 2000 digunakan APBN yang telah disusun sebelumnya karena acuan yang baru tengah dipersiapkan.

Propenas adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Perumusan Propenas dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak baik itu kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun para pakar, baik di pusat maupun di daerah. Berbagai upaya mencari masukan ikut memiliki dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, Propenas bukanlah rencana pembangunan pemerintah pusat saja, melainkan merupakan rencana pembangunan seluruh komponen bangsa. Propenas merupakan payung bagi seluruh lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas pembangunan. Lebih jauh lagi, proses penyusunan Propenas yang dilakukan secara transparan akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan mendorong pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Tiap-tiap lembaga tinggi negara, departemen dan lembaga pemerintah non-departemen menyusun Rencana Strategis (Renstra), sedangkan pemerintah daerah menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda). Renstra dan Propeda harus mengacu pada Propenas. Untuk Propeda, dimungkinkan adanya penekanan prioritas yang berbeda-beda dalam menyusun program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Propenas mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunan yang lalu. Propenas berupaya untuk memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi penyelenggara pembangunan di pusat

(departemen/LPND) dan di daerah (Pemerintah Daerah) untuk membuat rencana pembangunannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi segala aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam hal pembangunan nasional.

#### B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional didasarkan pada visi dan misi yang diamanatkan oleh GBHN 1999-2004. Visi GBHN 1999-2004 merupakan tujuan pembangunan nasional, sedangkan misi GBHN 1999-2004 merupakan sasaran pembangunan nasional.

GBHN 1999-2004 memberikan visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, GBHN 1999-2004 menetapkan misi yang menjadi sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Terwujudnya penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Terwujudnya pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai.
4. Terwujudnya kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat.
5. Terwujudnya sistem hukum nasional yang mejamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
6. Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi
7. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
8. Terwujudnya otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah atau pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
10. Terwujudnya aparaturnegara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
11. Terwujudnya sistem dan iklim nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.
12. Terwujudnya politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.

Pelaksanaan misi tersebut akan bermuara pada terbangunnya sistem politik yang

demokratis dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, terwujudnya supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih, pulihnya ekonomi yang bertumpu pada sistem ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya, serta meningkatnya pembangunan daerah.

#### C. LANDASAN PROPENAS

Propenas disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta landasan operasional GBHN 1999-2004. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, GBHN 1999-2004 memberikan gambaran kondisi umum kehidupan bernegara pada saat ini, serta visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun ke depan. Kondisi umum, visi, misi, serta arah kebijakan yang diuraikan dalam GBHN 1999-2004 merupakan landasan operasional penyusunan Propenas.

#### D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat secara sistematis menguraikan arah kebijakan dalam 9 bidang pembangunan dalam GBHN 1999-2004 tersebut, sistematika penulisan Propenas disusun ke dalam bab sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Prioritas Pembangunan Nasional
- BAB III Pembangunan Hukum
- BAB IV Pembangunan Ekonomi
- BAB V Pembangunan Politik
- BAB VI Pembangunan Agama
- BAB VII Pembangunan Pendidikan
- BAB VIII Pembangunan Sosial dan Budaya
- BAB IX Pembangunan Daerah
- BAB X Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- BAB XI Pembangunan Pertahanan dan Keamanan
- BAB XII Penutup

Pada setiap bab bidang pembangunan selain berisi narasi, juga dilengkapi matriks kebijakan yang berisi arah kebijakan GBHN 1999-2004, program nasional, dan indikator kinerjanya untuk memperjelas pelaksanaan

Propenas.

Khusus pada Bab Pembangunan Ekonomi dilengkapi dengan kerangka ekonomi makro. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran mengenai besar-besaran ekonomi makro yang akan dicapai bila seluruh prioritas pembangunan berhasil dilaksanakan.

## BAB II PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

### A. UMUM

Kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini sangat kompleks serta bersifat multidimensional sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan sungguh-sungguh. Berdasarkan kondisi umum dan arah kebijakan dalam GBHN 1999-2004, dapat diidentifikasi lima permasalahan pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Permasalahan-permasalahan pokok tersebut adalah sebagai berikut.

#### 1. Merebaknya Konflik Sosial dan Munculnya Gejala Disintegrasi Bangsa

Sekalipun seluruh rakyat dan penyelenggara negara serta segenap potensi bangsa telah berusaha menegakkan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih terdapat ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada masa silam, kekuasaan eksekutif yang terpusat dan tertutup di bawah kendali lembaga kepresidenan telah menyebabkan tidak berkembangnya fungsi berbagai kelembagaan, terutama kelembagaan dalam masyarakat, dan mendorong terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan. Mekanisme hubungan pusat dan daerah pun cenderung menganut sentralisasi kekuasaan yang menghambat penciptaan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan.

Disamping itu, terdapat permasalahan mengenai kemajemukan yang rentan konflik, otonomi daerah yang belum terwujud, kebijakan yang terkesan masih terpusat, otoriter, serta tindakan ketidakadilan yang dipicu oleh hasutan serta pengaruh gejala politik internasional yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi bangsa.

Munculnya gejala disintegrasi bangsa dan merebaknya berbagai konflik sosial di berbagai daerah seperti yang terjadi di Maluku, dapat menjadi gangguan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila tidak segera ditanggulangi, gejala ini dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sementara itu, di Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya gejala yang timbul lebih merupakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang perlu segera dikoreksi dengan cepat dan tepat.

Gerakan reformasi, yang menumbangkan rezim orde baru, mendorong terjadinya kemajuan-kemajuan di bidang politik, usaha penegakan kedaulatan rakyat, dan peningkatan peran masyarakat disertai dengan pengurangan dominasi peran pemerintah dalam kehidupan politik. Hal ini tercermin, antara lain, dari terselenggaranya Sidang Istimewa MPR 1998, Pemilu 1999 yang diikuti banyak partai politik, netralitas pegawai negeri sipil (PNS), serta TNI dan Polri, peningkatan partisipasi politik, pers yang bebas, serta Sidang Umum MPR 1999. Namun, perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal.

#### 2. Lemahnya Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), antara lain disebabkan oleh belum dilaksanakannya pembangunan hukum yang komprehensif.

Intensitas peningkatan produk peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana hukum pada kenyataannya tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum, kesadaran, dan mutu pelayanan publik di bidang hukum kepada masyarakat. Akibatnya kepastian keadilan dan jaminan hukum tidak tercipta dan akhirnya melemahkan penegakan supremasi hukum.

Tekad untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan pada kenyataannya belum diikuti oleh langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah, termasuk aparat penegak hukum untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Adanya intervensi dan/atau pengaruh pihak lain dalam penyelesaian proses peradilan, semakin melemahkan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kondisi demikian mengakibatkan penegakan dan perlindungan hukum serta penghormatan HAM masih memprihatinkan yang tercermin dari terjadinya berbagai pelanggaran HAM, antara lain, dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kewenangan.

### 3. Lambatnya Pemulihan Ekonomi

Meskipun dilakukan upaya untuk mengatasi krisis ekonomi melalui program reformasi di bidang ekonomi, hasilnya belum memadai. Lambatnya proses pemulihan ekonomi ini terutama disebabkan oleh dua faktor. Pertama, penyelenggaraan negara di bidang ekonomi yang selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintahan yang terlalu besar telah mengakibatkan kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif. Kedua, kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antardaerah, antarpelaku, dan antargolongan pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak mampu menopangnya. Ini ditandai dengan masih berkembangnya monopoli serta pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu.

Selain faktor-faktor di atas, lambatnya pemulihan juga disebabkan oleh berbagai faktor di luar ekonomi seperti, antara lain, belum stabilnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum yang masih lemah, dan banyaknya kasus KKN yang belum dapat diselesaikan.

Lambatnya pemulihan ekonomi mengakibatkan pengangguran meningkat, hak dan perlindungan tenaga kerja tidak terjamin, jumlah penduduk miskin membengkak, dan derajat kesehatan masyarakat menurun. Bahkan, terdapat indikasi meningkatnya kasus kurang gizi di kalangan kelompok penduduk usia bawah lima tahun yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas fisik dan intelektual generasi mendatang.

Pemulihan ekonomi bertujuan mengembalikan tingkat pertumbuhan dan pemerataan yang memadai serta tercapainya pembangunan berkelanjutan. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya alam yang menjamin daya dukung lingkungan dan pelestarian alam. Sejauh ini sumber daya alam dikelola dengan tidak terkendali yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta mengganggu kelestarian alam yang akhirnya mengurangi daya dukung dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

### 4. Rendahnya Kesejahteraan Rakyat, Meningkatnya Penyakit Sosial, dan Lemahnya Ketahanan Budaya Nasional

Tingkat kesejahteraan belum memadai baik secara material maupun spritual. Krisis ekonomi menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat menurun dan meningkatnya jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kualitas pendidikan dan kesehatan yang menurun selama krisis memerlukan



berbagai penanganan yang sungguh-sungguh. Berbagai permasalahan sosial yang selama ini tidak terlihat muncul ke permukaan. Berbagai ketidakpuasan pada sebagian masyarakat kadangkala mengakibatkan perusahan serta tindakan main hakim sendiri.

Di bidang pendidikan, masalah yang dihadapi adalah kurang efektifnya pendidikan dalam mengembangkan pribadi dan watak peserta didik yang berakibat pada hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan. Sikap dan perilaku pendidik, lingkungan pendidikan, dan peranan keluarga merupakan unsur penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Selain itu, mata pelajaran yang berorientasi pada moral serta pendidikan agama kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengamalan sehingga tidak tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Akibatnya, masyarakat cenderung tidak memiliki kepekaan yang cukup untuk membangun toleransi, kebersamaan, dan khususnya menyadari keberadaan masyarakat yang majemuk.

Kehidupan beragama belum memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat. Merebaknya penyakit sosial, antara lain, berupa korupsi dan sejenisnya, kriminalitas, pemakaian obat terlarang, perilaku menyimpang yang melanggar moralitas, serta etika dan kepatuhan, memberikan gambaran adanya kesenjangan yang lebar antara perilaku formal kehidupan keagamaan dan perilaku realitas nyata kehidupan sehari-hari.

Status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki yang tercermin pada sedikitnya jumlah perempuan yang menempati posisi penting di pemerintahan, lembaga legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan.

#### 5. Kurang Berkembangnya Kapasitas Pembangunan Daerah dan Masyarakat

Salah satu faktor utama yang mengakibatkan daerah tidak berkembang adalah tidak diberikannya kesempatan yang memadai bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini didorong oleh kuatnya sentralisasi kekuasaan terutama di bidang politik dan ekonomi. Akibat dari sentralisasi yang berlebihan tersebut tidak saja mengakibatkan kesenjangan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebar, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat di daerah karena pemerintah pusat dianggap terlalu banyak mencampuri urusan daerah dan juga menutup kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas serta mendapatkan hak-hak ekonomi, sosial dan politiknya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah telah mulai dikembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung-jawab serta peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat.

Masalah pokok dalam pengembangan otonomi daerah adalah luasnya ruang lingkup pembangunan daerah terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang belum didukung oleh kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintahan daerah secara memadai serta perangkat peraturan bagi pengelolaan sumber daya pembangunan di daerah.

Krisis ekonomi memberikan dampak yang berbeda terhadap daerah meskipun pada dasarnya menurunkan perekonomian di semua daerah. Pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antardaerah mengalami hambatan keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan modal, kemitraan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Masalah lain yang menghambat adalah ketidaktertiban pemanfaatan ruang yang didasarkan pada penataan ruang, dan pemilikan dan pemanfaatan tanah yang mengakibatkan degradasi lingkungan. Pengembangan wilayah juga dibatasi oleh kondisi dan ketersediaan prasarana dan sarana yang ada yang ditentukan oleh luasnya wilayah yang harus dijangkau dan

keterbatasan dana. Hal ini mengakibatkan perlunya perhatian khusus untuk membangun daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya termasuk kawasan timur Indonesia.

Sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya akses masyarakat atas sumber daya pelayanan pemerintah dan belum tumbuhnya kesadaran birokrasi pemerintah untuk memberikan cara pelayanan yang memihak kepada masyarakat khususnya kepada kelompok masyarakat bawah.

Keseluruhan gambaran dari kelima permasalahan pokok tersebut menunjukkan kecenderungan menurunnya kualitas kehidupan, memudarnya jati diri bangsa, serta kurangnya prakarsa daerah dalam pembangunan. Kondisi ini menuntut bangsa Indonesia, terutama penyelenggara negara, para elite politik, dan pemuka masyarakat, agar bersatu dan bekerja keras melaksanakan reformasi dalam segala bidang kehidupan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

## B. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Prioritas pembangunan nasional disusun untuk melaksanakan berbagai misi yang telah digariskan GBHN 1999-2004 guna mewujudkan visi pembangunan nasional. Prioritas tersebut disusun dengan mempertimbangkan pengalaman membangun pada masa lalu dan berbagai kemungkinan perkembangan keadaan masa depan.

Keadaan menunjukkan bahwa berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan selama ini muncul ke permukaan secara serentak dan meliputi segala sendi kehidupan masyarakat yang menuntut penanganan dengan segera. Penanganan berbagai permasalahan yang saling terkait tadi menjadi semakin sulit dengan adanya krisis ekonomi. Sebaliknya, permasalahan ekonomi tidak dapat terselesaikan bila permasalahan di bidang lainnya belum tertangani, terutama tanpa pulihnya keamanan dan ketertiban. Langkah memulihkan keamanan dan ketertiban hanya dapat dicapai kalau masyarakat dilibatkan dalam pembangunan, baik itu dalam menetapkan keputusan-keputusan politik, ekonomi, maupun berbagai keputusan-keputusan bangsa lainnya. Upaya mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ini dapat diwujudkan bila kehidupan berdemokrasi dapat berjalan dengan baik.

Proses demokratisasi dapat dilaksanakan kalau tercipta supremasi hukum yang didukung oleh pemerintahan yang baik. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemerintahan yang dianggap korup dan tidak peka terhadap kebutuhan rakyat yang pada akhirnya memperlambat proses untuk keluar dari krisis yang berkepanjangan.

Tumbuhnya demokrasi, supremasi hukum, dan pemerintahan yang baik akan mengurangi berbagai ketidakpuasan yang akan mengembalikan suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Kembalinya keamanan dan ketertiban merupakan persyaratan untuk memulihkan kepercayaan, baik itu kepercayaan pelaku ekonomi dalam negeri maupun pelaku ekonomi luar negeri. Kepercayaan ini mutlak dibutuhkan untuk memulihkan perekonomian nasional.

Pemulihan ekonomi harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat, baik selaku konsumen, angkatan kerja, maupun pengusaha. Masyarakat pelaku ekonomi kecil merasa ditinggalkan karena perhatian pemerintah dianggap hanya membela kepentingan pelaku ekonomi besar. Sedangkan, masyarakat di daerah merasa ditinggalkan karena pemerintah dianggap tidak peka terhadap prakarsa yang diajukan daerah. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama yang makin lama berakibat pada hilangnya prakarsa dari masyarakat bawah baik dalam merencanakan maupun melaksanakan pembangunan, apalagi dalam mengawasi pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu ditata ulang agar sistem ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh MPR dapat terlaksana.

Dalam sistem ekonomi kerakyatan semua lapisan masyarakat mendapatkan hak untuk memajukan kemampuannya, kesempatan, dan perlindungan dalam rangka aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi. dalam proses globalisasi, yang utama adalah mengurangi berbagai hambatan perdagangan, pembangunan yang mendepankan prakarsa masyarakat secara luas tersebut menjadi semakin penting karena akan meningkatkan daya saing bangsa. Disisi lain upaya peningkatan ketahanan budaya menjadi sangat vital agar masyarakat dapat mengambil manfaat dan mampu mencegah sisi buruk budaya asing.

Upaya meningkatkan ketahanan budaya dan membangun kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dan sekaligus sarana untuk membangun manusia yang sehat, terdidik tanpa membedakan gender, dan hidup dalam budaya yang sesuai dengan dirinya sehingga dapat menikmati kehidupannya. Ini merupakan wujud dari kesejahteraan batiniah. Di samping itu, orang yang sehat, terdidik, dan mempunyai budaya kerja yang tangguh akan mampu meningkatkan kesejahteraan lahiriahnya. Hal ini sekaligus mencerminkan keterkaitan yang erat antara membangun perekonomian dengan membangun kesejahteraan rakyat dan meningkatkan ketahanan budaya.

Langkah-langkah membangun bangsa juga perlu mempertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan pelestariannya akan merugikan karena secara ekonomis berarti berkurangnya sumber daya yang dapat diolah, meningkatkannya biaya menurunnya produktivitas kerja. Disamping itu, fungsi lingkungan hidup sebagai sumber kesejahteraan batiniah juga akan menurun.

Dengan mempertimbangkan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan seperti diuraikan di atas, Propenas merumuskan lima prioritas pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Membangun Sistem Politik yang Demokratis serta Memperpertahankan Persatuan dan Kesatuan

Prioritas pembangunan membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan, dilakukan melalui pembangunan bidang politik serta bidang pertahanan dan keamanan. Arah kebijakan pembangunan bidang politik terdiri dari arah kebijakan untuk pembangunan politik dalam negeri, hubungan luar negeri, penyelenggaraan negara, serta komunikasi, informasi, dan media massa.

Arah kebijakan pembangunan di bidang politik yang terkait dengan prioritas pembangunan pertama, secara garis besar terdiri dari arah kebijakan politik dalam negeri, yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kehidupan demokrasi. Arah kebijakan pengembangan hubungan luar negeri pada intinya adalah untuk menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, proaktif, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Arah kebijakan pembangunan komunikasi, informasi, dan media massa pada dasarnya adalah optimalisasi pemanfaatan peran komunikasi melalui berbagai bentuk media massa dan penyiaran, serta optimalisasi pemanfaatan berbagai jaringan informasi, di dalam dan di luar negeri, untuk mengoptimalkan upaya mnencerdaskan kehidupan bangsa serta memperjuangkan kepentingan nasional.

Arah kebijakan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan secara garis besar adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan dan memelihara integritas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arah kebijakan pembangunan keamanan nasional pada intinya adalah memulihkan ketertiban umu, menjaga keamanan dalam negeri, dan ketertiban masyarakat.

Dalam prioritas membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan secara bersamaan, terdapat dua isu lintas bidang yang penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Persatuan dan Kesatuan. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan upaya-upaya perwujudan diri hampir seluruh bidang pembangunan, seperti pelaksanaan demokrasi yang memadai; peningkatan dan pemberdayaan peran partai politik dan masyarakat; keadilan ekonomi antardaerah; penegakan hukum yang tegas, setara, dan adil; dan peningkatan sumber daya manusia yang profesional di daerah.
- b. Pemulihan Ketertiban dan keamanan. Dalam upaya-upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan diperlukan koordinasi dari banyak pihak dan diperlukan pelaksanaan program dari berbagai bidang, misalnya, penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik (good government) yang dapat menghilangkan segala bentuk penyalahgunaan kewenangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme; keadilan ekonomi antarstrata masyarakat dan antargolongan; penegakan hukum; peningkatan sumber daya aparatur keamanan; pemberdayaan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan; serta peningkatan kualitas kehidupan beragama.

## 2. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Baik

Prioritas pembangunan mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, dilakukan melalui pembangunan di bidang hukum dan subbidang penyelenggaraan negara dalam bidang politik. Untuk itu, 10 (sepuluh) arah kebijakan pembangunan bidang hukum dalam GBHN 1999-2004 akan menjadi pedoman dalam menyusun program-program pembangunan dan diupayakan semaksimal mungkin menetapkan indikator kinerja yang terperinci dan terukur.

Sepuluh arah kebijakan pembangunan di bidang hukum tersebut meliputi : menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Upaya menata sistem hukum nasional juga termasuk upaya melakukan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang. Sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan perkembangan dunia internasional, upaya mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional menjadi sangat penting.

Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia perlu didukung dengan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun, dan upaya menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah, dan terbuka, serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dengan tetap menunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. Selain itu, juga dengan menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Selanjutnya, upaya meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif sangat menentukan keberhasilan dari penegakan hukum.

Selanjutnya, upaya mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum diharapkan akan tercapai jika diikuti dengan upaya meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

Isu lintas bidang yang termasuk dalam prioritas pembangunan mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik meliputi dua hal sebagai berikut :

a. Mewujudkan Supremasi Hukum.

Perwujudan supremasi hukum tidak hanya merupakan lingkup dan dilaksanakan dalam bidang hukum saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Perwujudan supremasi hukum ini dilakukan melalui upaya seperti penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan dan pengembangan budaya hukum, pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, peningkatan etika dan komitmen para penyelenggara negara dalam mematuhi berbagai aturan hukum, pembentukan budaya taat hukum melalui pendidikan dan agama, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

b. Mewujudkan Pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya dari berbagai bidang yang meliputi upaya penegakan hukum dan HAM melalui penuntasan berbagai kasus KKN serta pelanggaran HAM; peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk aparatur pemerintah; peningkatan pengawasan masyarakat; pemberantasan praktik KKN; pembenahan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang mencakup pembaharuan sistem dan struktur pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, serta penyesuaian jumlah PNS; dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara negara yang meliputi peningkatan etos kerja, integritas dan kualitasnya agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

3. Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Landasan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan yang Berdasarkan Sistem Ekonomi Kerakyatan.

Prioritas mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dilakukan melalui pembangunan di bidang ekonomi serta pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan GBHN 1999-2004 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuan pembangunan tersebut dicapai dengan lebih memperdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan serta berbasis sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang produktif dan mandiri.

Adapun sasaran umum ProPenas di bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi, antara lain, ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara bertahap mencapai sekitar 6-7 persen, dan laju inflasi terkendali sekitar 3-5 persen, menurunnya tingkat pengangguran menjadi sekitar 5,1 persen, dan menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 14 persen pada tahun 2004. Sasaran selanjutnya adalah makin kukuhnya ketahanan ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh meningkatnya daya saing dan efisiensi perekonomian, terciptanya struktur perekonomian yang kuat berlandaskan keunggulan kompetitif, serta meningkatnya dan lebih meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, akan dilaksanakan berbagai program pembangunan nasional di bidang ekonomi yang secara terpadu dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok program percepatan pemulihan ekonomi dan penciptaan landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Prioritas jangka pendek (kurun waktu 1-2 tahun mendatang) diberikan pada program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan program-program untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama

krisis. Prioritas pembangunan ekonomi jangka menengah adalah program-program untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketujuh kelompok program adalah sebagai berikut. Pertama, menanggulangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Prioritas dalam jangka pendek adalah melanjutkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak krisis terhadap masyarakat yang kurang mampu, menanggulangi kemiskinan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja, dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Dalam jangka menengah diupayakan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, mengembangkan secara bertahap sistem jaminan sosial, serta mengembangkan pertanian, pangan dan pengairan. Pengembangan pertanian, pangan, dan pengairan untuk peningkatan produktivitas petani, antara lain, dengan pengembangan bibit unggul bagi lahan mereka, mekanisasi sesuai dengan kondisi wilayah dan kondisi masyarakat, penyediaan prasarana pengairan yang memadai sesuai dengan daya dukung sumber-sumber air, dan mendorong industri pertanian. Peningkatan produktivitas petani ini diharapkan akan dapat pula meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan.

Kedua, mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Prioritas jangka pendek diberikan untuk mempercepat penyelesaian utang-usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK), menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UKMK, dan meningkatkan akses UKMK pada permodalan. Dalam jangka menengah langkah yang dilakukan diarahkan untuk meningkatkan akses UKMK pada sumber daya produktif dan mengembangkan kewirausahaan UKMK.

Ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan agar tercipta iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi dan ekspor yang sangat penting bagi percepatan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam jangka pendek diupayakan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dari makro dan mikro, mempercepat restrukturisasi perbankan dan utang swasta, meningkatkan penerimaan negara dan efektivitas pengeluaran negara, dan melaksanakan desentralisasi ekonomi secara bertahap sehingga keseimbangan makro dan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat tetap dipertahankan. Upaya penuntasan rekapitalisasi perbankan dan penyelesaian utang swasta harus dipercepat untuk memulihkan proses intermediasi perbankan dan menggerakkan sektor riil. Dalam jangka menengah antara dilakukan langkah-langkah untuk terus meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan efektivitas pengelolaan utang pemerintah, memperkuat pengelolaan dan pengawasan perbankan, mengembangkan lembaga keuangan lainnya di luar perbankan, dan memperkuat pengawasan terhadap peningkatan utang swasta untuk mencegah terjadinya krisis.

Keempat, memacu peningkatan daya saing terutama untuk meningkatkan ekspor nonmigas, termasuk pariwisata, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Untuk itu dalam jangka pendek dilakukan langkah-langkah untuk memacu pemanfaatan kapasitas industri yang menganggur melalui pengurangan hambatan perdagangan dalam dan luar negeri serta peningkatan pembiayaan perdagangan, serta langkah-langkah promosi dan pengembangan produk ekspor dan pariwisata. Dalam jangka menengah dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing, antara lain, dengan terus memperkuat institusi pasar, serta pengembangan industri berkeunggulan kompetitif didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Kelima, meningkatkan investasi dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, terutama investasi berdasarkan ekuitas daripada berdasarkan pinjaman. Dalam jangka pendek hal ini dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan investasi, mengembangkan dan memperkuat institusi pasar modal, serta mendorong partisipasi swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam jangka menengah adalah melaksanakan restrukturisasi perusahaan negara. Privatisasi perusahaan negara secara selektif ditempuh

dengan melakukan terlebih dulu restrukturisasi bisnis dan finansial agar dapat dicapai nilai jual yang meningkat.

Keenam, menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi (transportasi, pos, telekomunikasi, informatika, listrik, energi dan pertambangan serta pengairan dan irigasi). Mengingat sumber dana yang terbatas, dalam jangka pendek upaya yang dilakukan adalah mempertahankan tingkat jasa pelayanan, terutama melalui upaya pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana umum, agar permintaan terhadap pelayanan jasa tersebut baik dari masyarakat maupun dunia usaha dapat dipenuhi. Dalam jangka menengah, upaya yang dilakukan adalah melanjutkan restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana umum agar efisiensi pelayanan jasa tersebut dapat ditingkatkan dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat dan dunia usaha untuk ikut serta dalam penyediaan jasa pelayanan prasarana serta meningkatkan aksesibilitas (kemudahan) masyarakat terhadap pelayanan jasa sarana dan prasarana agar masyarakat dan dunia usaha terdorong untuk beraktivitas baik dalam kegiatan sosial maupun ekonomi.

Ketujuh, memanfaatkan kekayaan sumber daya alam nasional dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability) dan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang meliputi air, laut, udara, mineral, dan hutan akan diupayakan secara optimal. Pemanfaatan sumber daya alam diupayakan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dengan membuka akses bagi masyarakat lokal dengan membuka akses bagi masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasar kaidah-kaidah kelestarian alam serta pengetahuan dan hak-hak masyarakat lokal. Untuk itu, dalam jangka pendek, antara lain, dilakukan upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan pengawasan dan pengamanan pemanfaatannya, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan penagakannya untuk menjamin kepastian hukum bagi investor dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Dalam jangka menengah dilakukan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, peningkatan informasi dan akses informasi sumber daya alam, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam.

Selanjutnya di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, arah kebijakan GBHN 1999-2004, antara lain, adalah mengelola sumber daya alam dan memelihara sesuai daya dukung agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Selain itu, dalam arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai dengan kompetisi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.

Dengan memperhatikan arahan tersebut, sasaran kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Dalam prioritas pembangunan mempercepat pemulihan ekonomi yang bersumber pada sistem ekonomi kerakyatan serta memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, dapat diidentifikasi isu lintas bidang yang meliputi empat hal sebagai berikut.

a. Penanggulangan Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dengan dalih apa pun. Dalam menjawab isu tersebut, upaya-upaya lintas bidang yang diperlukan meliputi peningkatan keamanan dan ketertiban yang dapat mendukung

kegiatan pelaku usaha kecil, pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi yang dapat menjangkau mayoritas penduduk miskin (pro-poor growth), peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan martabat, pengembangan sistem jaminan sosial, peningkatan akses usaha kecil dan koperasi terhadap sumber pembiayaan, serta pembangunan pertanian dan perdesaan.

**b. Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan.**

Sistem ekonomi kerakyatan yang akan dibangun adalah sistem yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat, baik sebagai konsumen, sebagai pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja, secara indiskriminatif tanpa membedakan suku, agama, dan gender mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dan meningkatkan taraf hidupnya dalam berbagai kegiatan ekonomi. Upaya lintas bidang yang perlu dilakukan meliputi penegakan hukum dan prinsip keadilan, penciptaan iklim usaha yang sehat, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan akses atau sumber daya pembangunan.

**c. Pembangunan Stabilitas Ekonomi Nasional.**

Dalam upaya mengatasi krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi serta untuk meletakkan landasan ekonomi bagi pembangunan selanjutnya diperlukan upaya lintas bidang untuk mewujudkan stabilitas ekonomi nasional yang meliputi, antara lain, upaya untuk menjaga stabilitas politik agar stabilitas ekonomi dapat tercapai, meningkatkan dukungan internasional dalam upaya pembangunan ekonomi, menata kelembagaan pemerintah, meningkatkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); menyempurnakan dan memperbaharui peraturan perundangan, menegakkan hukum dan memberdayakan peradilan, meningkatkan pengawasan masyarakat, dan meningkatkan pembangunan daerah.

**d. Pelestarian Lingkungan.** Untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan, upaya lintas bidang yang perlu dilakukan meliputi pengembangan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penumbuhan tanggung jawab sosial melalui pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, penataan kelembagaan dan penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pembangunan budaya yang berwawasan lingkungan.

**4. Membangun Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, dan Ketahanan Budaya.**

Prioritas pembangunan membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya. Prioritas pembangunan ini dilaksanakan melalui pembangunan bidang agama, bidang pendidikan, serta bidang sosial dan budaya.

Arah kebijakan pembangunan di bidang agama secara garis besar adalah memanfaatkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam bermasyarakat dan bernegara; meningkatkan kualitas pendidikan agama; meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama; meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya; dan meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan.

Arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan secara garis besar adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan kesejahteraan tenaga kependidikan; memberdayakan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan; melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan; meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni; serta mengembangkan sumber daya manusia sedini mungkin.



Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan program penelitian, peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan sumber daya iptek serta program kemandirian dan keunggulan iptek yang bertujuan meningkatkan kemampuan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) publik searah dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat, membentuk iklim yang kondusif bagi terbentuknya sumber daya litbang dalam jumlah dan kualitas yang memadai, serta meningkatkan kemandirian dan kemampuan pelayanan teknologi lembaga litbang.

Secara garis besar arahan kebijakan kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam GBHN 1999-2004 meliputi peningkatan mutu sumber daya manusia dan lingkungan dengan pendekatan paradigma sehat, peningkatan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan, pengembangan sistem jaminan sosial, tenaga kerja, pengembangan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran, peningkatan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial, peningkatan kualitas penduduk, pemberantasan perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat terlarang, dan peningkatan aksesibilitas fisik dan nonfisik bagi penyandang cacat.

Tujuan pembangunan di bidang sosial dan budaya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatkannya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Sasaran umum yang akan dicapai adalah meningkatnya usia harapan hidup menjadi 67,9 tahun, menurunnya laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,39 persen, menurunnya angka kelahiran total menjadi 2,4 per perempuan, menurunnya angka kematian kasar menjadi 6,83 per 1.000 penduduk, meningkatnya ketahanan sosial dan budaya, meningkatnya kedudukan dan peranan perempuan, meningkatnya partisipasi aktif pemuda, serta meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga.

Arahan kebijakan pembangunan kebudayaan, kesenian, dan pariwisata secara garis besar meliputi pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional, perumusan nilai-nilai budaya Indonesia, pengembangan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya, pengembangan kebebasan berkreasi dalam berkesenian, pengembangan dunia perfilman Indonesia, pelestarian apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional, perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai wahana pengembangan pariwisata, dan pengembangan pariwisata dengan pendekatan sistem yang utuh berdasarkan pemberdayaan masyarakat.

Arah kebijakan peningkatan kedudukan dan peranan perempuan secara garis besar adalah peningkatan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan peningkatan kualitas dan kemandirian organisasi perempuan.

Arahan kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga meliputi pertumbuhan budaya olahraga, peningkatan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi, pengembangan iklim kondusif bagi pengembangan generasi muda, pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, dan perlindungan bagi generasi muda dari narkoba.

Dalam kelompok prioritas membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya tercakup isu lintas bidang sebagai berikut.

a. Pembangunan Kependudukan. Dalam pembangunan kependudukan ditempuh strategi kebijakan lintas bidang yang mengarah pada peningkatan kualitas penduduk yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan kualitas keluarga serta penyeimbangan kuantitatif persebaran dan mobilitas penduduk yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.

b. Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek. Strategi pokok lintas bidang yang

dilakukan meliputi pembangunan sumber daya manusia yang bermoral dan berkecakupan melalui pembangunan bidang agama dan pendidikan, mengembangkan interaksi antar lembaga-lembaga penelitian dan masyarakat melalui jasa-jasa pelayanan teknologi, dan peningkatan kesadaran dan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

c. Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming). Untuk memberdayakan perempuan, ditempuh strategi kebijakan berupa pengarusutamaan gender dalam seluruh bidang pembangunan dengan melibatkan institusi pemerintah dan organisasi masyarakat.

#### 5. Meningkatkan Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan meningkatkan pembangunan daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah sesuai dengan GBHN 1999-2004, secara garis besar adalah mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; melakukan pengkajian atas kebijakan tentang berlakunya otonomi daerah bagi propinsi, kabupaten/kota, dan desa; mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya; serta memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan peranannya guna penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Dengan memperhatikan keadaan dewasa ini dan arahan GBHN 1999-2004, tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan adalah (1) memantapkan perwujudan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas daerah agar terselenggara pemerintahan yang baik, kinerja pelayanan umum yang efektif, efisien, serta tumbuhnya prakarsa dan partisipasi masyarakat; (2) meningkatkan pengembangan Potensi wilayah melalui pengembangan ekonomi daerah, pembangunan perdesaan dan perkotaan, pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan, pengembangan permukiman serta pengelolaan penataan ruang dan pertanahan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan landasan pembangunan yang berkelanjutan, dan sekaligus mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah; (3) meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, dan peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik; dan (4) mempercepat penanganan khusus Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya, dan Maluku sesuai dengan aspirasi, kemampuan, dan akar budaya masyarakat setempat, dan asas persatuan dan kesatuan bangsa melalui pemulihan dan pengembangan sosial-ekonomi masyarakat, penyelesaian masalah politik dan pelanggaran hak asasi masyarakat, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah.

Isu-isu lintas bidang dalam peningkatan pembangunan daerah adalah sebagai berikut.

##### a. Percepatan dan Pemantapan Otonomi daerah.

Tuntutan desentralisasi yang semakin tinggi membutuhkan penanganan yang tepat agar keutuhan bangsa secara sosial, ekonomi, politik, dan hukum dapat dipertahankan bersendikan kekayaan dan keragaman budaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan mencakup penyiapan dan pemantapan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui pengembangan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah meliputi organisasi dan manajemen; dan peningkatan kemampuan keuangan pemerintahan daerah melalui perwujudan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara adil dan

proporsional, serta pemberian kewenangan yang lebih luas bagi daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, potensi dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. Pembangunan Lintas Wilayah. Isu ini mencakup upaya pengembangan wilayah untuk mendayagunakan potensi dan kemampuan daerah dengan berbagai alat kebijakan yang mendukung perkembangan perekonomian daerah, berkembangnya permukiman, perkotaan, perdesaan, wilayah cepat tumbuh, perbatasan dan wilayah tertinggal; dan perberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat meningkatkan hidup dan kehidupannya. Isu ini diangkat untuk mempercepat perwujudan pemerataan pembangunan ke seluruh daerah melalui pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, serta keterkaitan dan kerjasama ekonomi antapelaku, antara desa dan kota, antardaerah dan antarwilayah yang saling menguntungkan, dengan mendayagunakan penataan ruang dan pertanahan sebagai alat kebijakan, serta dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

#### C. PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Program-program pembangunan nasional disusun berdasarkan butir-butir arah kebijakan yang tercakup dalam 9 bidang pembangunan seperti tercantum dalam GBHN 1999-2004. pelaksanaan dari program-program tersebut diarahkan untuk dapat memecahkan kelima masalah pokok termasuk masalah-masalah lintas bidang yang telah diuraikan di atas. Pembahasan secara terperinci program-program pembangunan nasional tersebut disampaikan dalam Bab III sampai dengan Bab XI.

### BAB IX PEMBANGUNAN DAERAH

#### A. UMUM

Berbagai kebijakan dan program yang diuraikan dalam bab ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang kelima, yaitu meningkatkan pembangunan daerah.

Sistem pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik lemahnya pengawasan, ketidaktanggapan dalam mengubah pendekatan dan strategi pembangunan, serta ketidakselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan pada berbagai bidang pembangunan dan terjadinya krisis ekonomi telah menyebabkan melemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas secara otonom, tidak terdesentralisasinya kegiatan pelayanan masyarakat, ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, dan ketidakberdayaan masyarakat dalam proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan di berbagai daerah.

Pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan selama ini yang lebih menekankan pada pendekatan sektoral dan cenderung terpusat menyebabkan pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara optimal. Di samping itu, pembangunan sektoral yang terpusat cenderung kurang memperhatikan keragaman kondisi sosial ekonomi daerah mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, lemahnya pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat, dan kurang efektifnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kapasitas pemerintah daerah yang tidak optimal disebabkan oleh kuatnya kendali pemerintah pusat dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang sangat rinci dan kaku. Hal tersebut diperparah oleh adanya keengganan beberapa instansi pemerintah pusat untuk mendelegasikan kewenangan, penyerahan tugas dan fungsi pelayanan, pengaturan perizinan, dan pengelolaan sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah. Kuatnya kendali pemerintah pusat yang semakin tinggi terhadap pemerintah daerah pada waktu yang lalu telah menyebabkan pula hilangnya motivasi, inovasi, dan kreativitas aparat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Berbagai upaya telah dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan otonomi daerah, pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dan alokasi dana pembangunan kepada pemerintah daerah disertai dengan desentralisasi pengaturan dan perizinan.

Ketidakadilan dalam pembagian sumber-sumber keuangan antara pusat dan daerah menyebabkan terjadinya peningkatan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antardaerah, kurangnya kemandirian daerah dan munculnya ketidakpuasan masyarakat di daerah. Di samping itu, krisis ekonomi yang terjadi telah mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah sehingga terjadinya peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan permasalahan sosial lainnya serta memicu berbagai bentuk unjuk rasa di berbagai daerah sebagai wujud ketidakpuasan terhadap pemerintah. Penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah juga menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom.

Dalam upaya mengatasi kesenjangan antarsektor, antardaerah, dan antara kota dan desa, serta dampak krisis ekonomi, pemerintah telah melakukan berbagai kebijaksanaan untuk meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, dan menggerakkan kembali kegiatan ekonomi di berbagai daerah secara merata. Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak akan berjalan secara optimal jika pemerintah tidak dapat memberdayakan kemampuan pelaku ekonomi, khususnya, masyarakat kecil dalam kegiatan ekonomi dan disertai dengan dukungan investasi swasta untuk menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah secara merata. Berbagai upaya peningkatan kemampuan pelaku ekonomi, khususnya masyarakat kecil, telah dilakukan melalui penyediaan akses bagi masyarakat untuk memperoleh sumber daya ekonomi dan kesempatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di daerah.

Sebagian besar masyarakat perdesaan saat ini masih berada pada pola kehidupan dan budaya perdesaan yang mengandalkan sumber kehidupan dari pertanian subsisten atau sebagai buruh tani yang pendapatannya tidak pasti dan rendah. Di samping itu, kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan relatif tertinggal dibanding daerah perkotaan yang disebabkan oleh lapangan kerja dan kegiatan usaha yang tidak kompetitif dan tidak memberikan pendapatan masyarakat yang layak, kondisi pelayanan pendidikan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh kelompok pengusaha besar, serta peraturan-peraturan yang menghambat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut dengan mewujudkan keterkaitan kegiatan sosial ekonomi antara perdesaan dan perkotaan, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya produksi, pengembangan jaringan usaha yang melibatkan petani dan nelayan kecil, dan pengurangan hambatan peraturan pemasaran hasil-hasil pertanian.

Dalam upaya mendukung peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat perdesaan yang sebagian besar dalam kondisi miskin, diperlukan upaya pemberdayaan dan pemihakan kepada masyarakat yang miskin terutama dalam menghadapi berbagai masalah struktural yang tidak dapat dipecahkan oleh masyarakat sendiri.

Kawasan perkotaan merupakan tempat yang sangat menarik bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi. Namun, pertumbuhan penduduk secara alamiah dan arus imigrasi yang tinggi telah menyebabkan tidak terkendalinya perkembangan permukiman, dan lingkungan perumahan, serta meluasnya kawasan hunian kumuh khusus di wilayah sekitar kota besar dan pusat pertumbuhan. Pemerintah dihadapkan pula pada masalah pertumbuhan penduduk perkotaan yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan hunian, pelayanan prasarana dan sarana, meningkatkan kebutuhan lahan untuk berbagai kegiatan, dan tekanan untuk menyediakan lapangan kerja yang semakin meningkat.

Pada saat ini kawasan perkotaan merupakan andalan bagi kehidupan masyarakat dan pusat pelayanan produksi dan jasa maupun koleksi dan distribusi dihadapkan pada terbatasnya kemampuan manajerial dan pembiayaan untuk dapat memberikan pelayanan sosial ekonomi yang memadai dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, dan tuntutan untuk menopang kegiatan ekonomi di sektor industri pengolahan dan jasa. Sementara itu masalah pengangguran, kemiskinan, dan kerawanan sosial tetap menjadi masalah yang belum terpecahkan yang berdampak pada penurunan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan hidup masyarakat, jaminan keamanan berusaha, dan kelancaran aliran investasi oleh sesuai swasta.

Pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial ekonomi menyebabkan pula meningkatnya kebutuhan penyediaan hunian dan lingkungan pendukungnya secara lebih layak, aman, dan nyaman. Meskipun sebagian besar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara swadaya dan didukung oleh pasar penyediaan hunian, masalah ketersediaan hunian bagi kelompok masyarakat berpenghasilan kecil tidak mungkin hanya dipecahkan oleh masyarakat sendiri. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membantu masalah penyediaan hunian dan fasilitas pendukungnya bagi kelompok berpenghasilan rendah dan miskin melalui pemugaran rumah dan lingkungan, perbaikan kampung dan kawasan kumuh, dan pemberian subsidi kredit rumah murah.

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan permukiman dan kebutuhan prasarana dan sarana pendukungnya. sebagian besar pelayanan prasarana dan sarana lingkungan masyarakat dapat ditangani oleh kemampuan swadaya masyarakat dan dunia usaha, namun untuk pelayanan skala kota dan wilayah adalah tugas pemerintah untuk menanganinya. Pada saat ini pemerintah dihadapkan pada terbatasnya kemampuan untuk memenuhi permintaan yang meningkat dalam penyediaan prasarana dan sarana permukiman skala kota dan wilayah. Berbagai upaya telah dilakukan dengan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman termasuk melibatkan dunia usaha, khususnya, penyediaan prasarana perkotaan yang menuntut biaya besar.

Pemerataan pembangunan antardaerah dan percepatan pengembangan wilayah juga dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan sarana yang ada. Selama ini pembangunan prasarana dan sarana diupayakan untuk dapat menjangkau ke berbagai daerah, namun hasilnya belum optimal karena keterbatasan dana pemerintah dan luasnya wilayah yang harus dijangkau. Sebagai akibat dari kondisi ini, masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh kegiatan pembangunan dan pelayanan pemerintah secara memadai khususnya Kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan, dan wilayah tertinggal lainnya, termasuk kawasan transmigrasi.

Sejalan dengan upaya pengembangan wilayah, berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintah selalu terjadi pada suatu ruang. Ketidaktepatan rencana dan ketidaktertiban pemanfaatan ruang dapat mengurangi efisiensi kegiatan sosial ekonomi dan dapat menyebabkan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kualitas kehidupan, produktivitas ekonomi daerah, pendapatan rakyat, dan mengancam keberlanjutan pembangunan. Oleh sebab itu, penataan ruang diperlukan sebagai instrumen pembangunan untuk dapat mengarahkan pemanfaatan pembangunan untuk dapat pembangunan untuk dapat mengarahkan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Penataan ruang itu perlu memperhatikan kaidah teknis, ekonomis, dan kepentingan umum serta kepentingan antargenerasi. Di samping aspek ruang sebagian besar kegiatan masyarakat berkaitan dengan tanah yang merupakan aset bagi perorangan, badan usaha, dan publik yang wajib diakui. Pada saat ini masalah pengelolaan atau administrasi pertanahan dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin ketertiban proses sertifikasi status tanah, penguasaan penggunaan, dan pengalihan pemilikan tanah, penguasaan penggunaan, dan pengalihan pemilikan tanah. Peran pemerintah sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, kelancaran penggunaan tanah oleh semua anggota masyarakat untuk berbagai kepentingan.

Dengan memperhatikan masalah-masalah di atas, pengembangan wilayah di Indonesia pada masa depan akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas, dinamika, dan keanekaragaman persoalan sosial ekonomi, dan politik yang bersifat kontradiktif yang memerlukan perhatian dan seluruh potensi masyarakat di berbagai daerah.

Upaya pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak yang tidak terbatas pada aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial, tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan politik. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat lembaga, dan organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat, atau dari kelompok ekonomi kuat pada kelompok ekonomi lemah.

Selama ini upaya pemberdayaan bagi kelompok masyarakat atau keluarga miskin dilakukan melalui penyediaan akses dan bantuan dari pemerintah dalam bentuk pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemberian bantuan modal, manajemen usaha, pendamping, dan pembangunan prasarana pendukung, namun hal tersebut ternyata belum cukup memadai, sedangkan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan dalam menghadapi masalah sosial ekonomi atau mendapat musibah di luar hendaknya telah dilakukan melalui berbagai skema perlindungan secara informal maupun formal dengan dukungan keluarga, kelompok masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat usaha swasta, dan pemerintah.

Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan kepedulian masyarakat luas dalam memecahkan masalah kemasyarakatan.

Kondisi politik yang terjadi di beberapa daerah terutama di Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya, dan Maluku dipicu oleh kesenjangan sosial dan ekonomi, tuntutan masyarakat terhadap penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan, serta perbedaan yang muncul akibat keragaman suku, budaya, adat, kebiasaan dan agama. Permasalahan tersebut perlu dipecahkan secara serius dan bertahap dengan melibatkan masyarakat secara langsung yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat seperti lembaga adat, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan pemerintah.

## B. ARAH KEBIJAKAN

Amanat GBHN 1999-2004 menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk :

1. mengembangkan otonom daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam

rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi propinsi, kabupaten/kota dan desa;
3. mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya; dan
4. Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pembangunan selama ini selain menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan juga menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan baik antarpelaku, antargolongan, antar desa dan kota, antarkawasan, dan antarwilayah. Oleh sebab itu, GBHN 1999-2004 juga mengamanatkan perlunya upaya untuk :

1. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
2. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam.
3. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah, terutama di Kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.
4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan.
5. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktifitas dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

Sementara itu penanganan daerah khusus ditujukan dalam rangka pengembangan otonomi di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, GBHN 1999-2004 mengamanatkan perlunya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut.

#### 1. Daerah Istimewa Aceh

1. Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat aceh melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonom khusus yang diatur dengan undang-undang.
2. Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan daerah operasi militer maupun pasca pemberlakuan daerah operasi militer.

#### 2. Irian Jaya

1. Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonom khusus yang diatur dengan undang-undang.

2. Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat.

3. Maluku

Menugaskan pemerintah untuk segera melaksanakan penyelesaian konflik sosial yang berkepanjangan secara adil, nyata, dan menyeluruh serta mendorong masyarakat yang bertikai agar pro-aktif melakukan rekonsiliasi untuk mempertahankan integrasi nasional.

Berbagai arah kebijakan pembangunan daerah tersebut akan dilaksanakan melalui pendekatan pokok, yaitu (1) memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat; (2) mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah, pemerataan pembangunan antardaerah, pembangunan perkotaan dan permukiman, pengelolaan tata ruang dan pertanahan, dan peningkatan pembangunan perdesaan, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; (3) meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan hak-hak masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya; dan (4) mempercepat penanganan khusus untuk menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di Daerah Istimew Aceh, Irian Jaya, dan Maluku.

#### C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Berdasarkan arah kebijakan GBHN 1999-2004 dan pendekatan dalam meningkatkan pembangunan daerah program-program pembangunan yang akan dilaksanakan meliputi empat kelompok program, yaitu (1) mengembangkan otonomi daerah; (2) mempercepat pengembangan wilayah; (3) meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan (4) mempercepat penanganan daerah khusus.

1. Mengembangkan Otonomi Daerah

Untuk melaksanakan amanat GBHN 1999-2004, program pembangunan yang perlu diupayakan dalam mengembangkan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

##### 1.1. Program Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan penciptaan pemerintahan daerah yang bersih. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya jumlah dan kualitas tenaga aparat pemerintah daerah yang profesional dengan kualifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas serta wewenang, baik pada tingkat propinsi maupun pada tingkat propinsi maupun pada tingkat kabupaten, kota, dan desa yang didukung oleh kinerja yang tinggi.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) standarisasi kompetensi jabatan aparatur daerah; (2) analisis kebutuhan peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah; (3) perbaikan sistem penghargaan dan penghukum; serta (4) penyediaan pendidikan dan pelatihan.

##### 1.2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah



Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah yang menyangkut mekanisme kerja, struktur organisasi, dan peraturan perundang-undangan yang memadai guna menjamin pelaksanaan otonomi daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya struktur organisasi yang tepat, kinerja kelembagaan yang tinggi, terbangunnya hubungan kerja antarorganisasi di lingkungan pemerintahan daerah, antara organisasi pemerintah dan masyarakat, dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, kabupaten, kota, dan/atau desa termasuk pengkajian tentang pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah otonomi; (2) penataan struktur organisasi dan manajemen pemerintahan daerah yang mengikuti kaidah organisasi yang maju dan norma pemerintahan yang baik; serta (3) pengembangan hubungan kerja antarorganisasi di lingkungan pemerintah secara horizontal dan vertikal, dan antara pemerintah dan masyarakat secara interaktif dan seajar.

### 1.3. Program Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) perluasan dan peningkatan sumber penerimaan daerah; (2) penyederhanaan peraturan dan pembenahan kelembagaan sistem akuntansi, pengembangan sistem informasi keuangan yang transparan dan bertanggung jawab, dan penataan manajemen keuangan daerah.

### 1.4. Program Penguatan Lembaga Non Pemerintah

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, peranan lembaga-lembaga nonpemerintah perlu ditingkatkan kemampuannya. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterlibatan lembaga-lembaga non pemerintah, baik formal maupun informal dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan serta pengawasan jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Lembaga-lembaga non pemerintah yang dimaksud termasuk Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), badan perwakilan desa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, dan lembaga masyarakat lainnya. Sasaran yang hendak dicapai adalah berfungsinya secara baik serta terbangunnya mekanisme partisipasi lembaga non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan terciptanya mekanisme pengawasan sosial secara demokratis.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan kemampuan dalam analisis kebijakan, manajemen publik, manajemen keuangan, dan komunikasi politik; (2) peningkatan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat, lembaga nonpemerintah setempat, dunia usaha, dan pemerintahan daerah; serta (3) peningkatan kegiatan analisis kebijakan dengan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lainnya, dan pengembangan kelembagaan.

## 2. Mempercepat Pengembangan Wilayah

Untuk melaksanakan amanat GBHN 1999-2004, program pembangunan prioritas untuk mempercepat pengembangan wilayah adalah sebagai berikut.

### 2.1. Program Peningkatan Ekonomi Wilayah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memperhatikan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi lokal dalam menunjang proses kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran serta menciptakan iklim yang mendukung bagi investor di daerah yang menjamin berlangsungnya produktivitas dan kegiatan usaha masyarakat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sasaran yang ingin dicapai adalah berkembangnya ekonomi wilayah yang menunjang perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta keterkaitan ekonomi antara desa kota dan antarwilayah yang saling menguntungkan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan jaringan dan pengelolaan prasarana dan sarana ekonomi wilayah; (2) pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi lokal; (3) penyediaan faktor produksi; (4) penyediaan bantuan alih teknologi dan manajemen produksi termasuk pelayanan perbankan yang menjangkau masyarakat; dan (5) pengembangan kemitraan antarpelaku ekonomi dalam kegiatan produksi dan pemasaran.

### 2.2. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh.

Program ini ditujukan untuk mengembangkan wilayah strategis yang sudah ada dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang potensial cepat tumbuh berdasarkan keunggulan geografis dan produk unggulan daerah yang berorientasi pada pasar lokal, regional, dan global, serta mendorong perkembangan fungsinya sebagai andalan pengembangan ekonomi wilayah dan penggerak kegiatan ekonomi kawasan di sekitarnya. Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya kompetensi, dan daya saing kegiatan usaha, serta produktivitas komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan pada wilayah strategis dan cepat tumbuh di berbagai daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, industri dan pariwisata pada sentra-sentra produksi dan kawasan potensial lainnya termasuk kawasan transmigrasi; (2) pengembangan prasarana pendukung pada wilayah strategis dan cepat tumbuh termasuk penyediaan tenaga terampil, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi modern; serta (3) pengembangan jaringan perdagangan dengan pemanfaatan potensi geografis dan kerjasama ekonomi antar dan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta antardaerah dan subregional.

### 2.3. Program Pembangunan Perdesaan.

Tujuan dari program pembangunan perdesaan adalah meningkatkannya kesejahteraan masyarakat perdesaan, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi perdesaan yang berkeadilan, mempercepat industrialisasi perdesaan. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya pendapatan masyarakat perdesaan, terciptanya lapangan kerja, tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi antara perdesaan dan perkotaan, menguatnya pengelolaan ekonomi lokal, dan meningkatnya pasitas lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat perdesaan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pembangunan prasarana dan sarana; (2) pembangunan sistem agribisnis; (3) pengembangan industri kecil dan rumah tangga; (4) penguatan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan produksi dan pemasaran; (6) penguasaan teknologi tepatguna; (7) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan keluarga miskin secara terpadu; serta (8) penyempurnaan terhadap struktur organisasi pemerintahan

desa dan lembaga-lembaga sosial ekonomi.

#### 2.4. Program Pembangunan Perkotaan

Program pembangunan perkotaan ini bertujuan meningkatkan kinerja pengelolaan kota dalam rangka mewujudkan kota layak huni; menanggulangi masalah kemiskinan dan kerawanan sosial; memperkuat fungsi internal dan eksternal kota, serta mengupayakan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan. Sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan pengelola kota dalam penyediaan prasarana sarana dan pelayanan umum, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan, berkurangnya masalah kemiskinan dan kerawanan sosial, serta meningkatnya penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana penghubung perkotaan dan perdesaan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyempurnaan struktur kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengelola; (2) pemantapan sistem dan standar pelayanan umum; (3) peningkatan kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan kota; (4) peningkatan upaya penanggulangan masalah kemiskinan dan kerawanan sosial; (5) peningkatan fungsi kawasan di perkotaan; dan (6) pengembangan sistem jaringan pelayanan perkotaan yang mendukung alur produksi-koleksi-distribusi antarkota, antarwilayah, dan antara perkotaan dan perdesaan.

#### 2.5. Program Pengembangan Perumahan

Perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar bagi peningkatan kualitas hidup manusia sehingga pengembangan perumahan yang sehat dan layak bagi masyarakat Indonesia merupakan wadah untuk pengembangan sumber daya masyarakat.

Program ini bertujuan memantapkan sistem hunian bagi masyarakat melalui upaya menyempurnakan peraturan pembangunan perumahan dan sistem pembiayaan perumahan, mengembangkan pola subsidi yang efisien bagi masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan perumahan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan perumahan serta meningkatkan kualitas pengelolaan BUMN/BUMD yang bergerak dalam penyediaan dan pengelolaan perumahan.

Sasaran program adalah penyediaan rumah sehat dan menghindarkan spekulasi tanah untuk perumahan dan permukiman, meningkatnya ketersediaan dana bagi pembiayaan perumahan yang berasal dari dana masyarakat, terciptanya pasar primer dan pasar hipotik sekunder yang berkualitas, terciptanya mekanisme subsidi perumahan yang efisien dan tepat sasaran sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah, meningkatkan kemudahan bagi masyarakat miskin dan berpendapat rendah dalam mendapatkan hunian yang layak, meningkatnya investasi di bidang perumahan, serta terciptanya BUMN/BUMD yang efisien, efektif, dan akuntabel serta terfokusnya kegiatan BUMN/BUMD pada pembangunan/penyediaan, pengelolaan hunian murah, dan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) deregulasi dan regulasi sistem pembiayaan dan pembangunan perumahan; (2) peningkatan kualitas pasar primer perumahan; (3) pengembangan institusi dan pasar hipotik sekunder; (4) penyempurnaan mekanisme subsidi dalam perumahan bagi masyarakat miskin dan berpendapat rendah; (5) Pengembangan rumah susun sewa sederhana di perkotaan; (6) pengembangan sistem penyediaan perumahan yang bertumpu pada swadaya masyarakat; (7) pengembangan kebijakan insentif fiskal bagi swasta yang berkiprah dalam penyediaan rumah susun sewa sederhana dan (8) restrukturisasi BUMN/BUMD yang bergerak dalam penyediaan dan pengelolaan perumahan agar

penekanan diberikan pada pembangunan, penyediaan, pengelolaan hunian murah, dan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

#### 2.6. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman baik yang berada di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; meningkatkan peranan dunia usaha/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman, meningkatkan penataan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan strategis; meningkatkan pemugaran, dan pelestarian kawasan bersejarah, dan kawasan tradisional; meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan. Sasaran program ini adalah meningkatkan derajat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat; meningkatnya kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman; meningkatnya investasi swasta secara nyata dalam pembiayaan prasarana dan sarana permukiman; meningkatnya peranan kawasan strategis, kawasan bersejarah, dan kawasan tradisional dalam pembangunan ekonomi; tersusunnya pedoman dan standar konstruksi bangunan serta sistem pengawasannya.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman, meliputi air bersih, drainase, air limbah, persampahan, penanggulangan banjir, jalan lokal, terminal, pasar, sekolah, perbaikan kampung, dan sebagainya; (2) peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman; (3) peningkatan kerja sama publik-swasta dan/atau privatisasi BUMN/BUMD dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman; revitalisasi kawasan strategis; (4) pelestarian kawasan bersejarah dan kawasan tradisional; (5) validasi dan penyusunan pedoman serta standar keselamatan konstruksi; dan (6) penguatan lembaga pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan.

#### 2.7. Program Pembangunan Wilayah Tertinggal

Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas wilayah tertinggal terhadap faktor produksi dan prasarana fisik yang mendukung percepatan pembangunan wilayah tertinggal, serta mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan masyarakat termasuk kelembagaan adat beserta kearifan tradisionalnya. Sasaran program ini adalah terwujudnya peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial-budaya wilayah tertinggal sehingga terkait pengembangannya dengan wilayah lain.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan penyediaan prasarana dan sarana; (2) pembangunan permukiman transmigrasi; (3) penataan ruang termasuk pengaturan pemanfaatan potensi wilayah pada kawasan lindung, pesisir, dan pulau atau kepulauan terpencil; (4) pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan tradisional secara berkelanjutan; (5) pendampingan kegiatan ekonomi melalui kerja sama dan kemitraan yang menguntungkan masyarakat setempat; (6) penguatan kelembagaan adat dalam proses pengambilan keputusan publik; dan (7) penyediaan bantuan hukum dan informasi yang adil, terbuka, dan transparan.

#### 2.8. Program Pengembangan daerah Perbatasan

Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain. Sasaran program ini adalah terwujudnya peningkatan kehidupan sosial ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, dan terciptanya

ketertiban dan keamanan kawasan perbatasan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan pusat-pusat permukiman potensial termasuk permukiman transmigrasi di daerah perbatasan; (2) peningkatan pelayanan prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka keterisolasian daerah dan pemasaran produksi; (3) peningkatan pelayanan soisal dasar khususnya pendidikan dan kesehatan; penataan wilayah administratif dan tapal batas; (4) pengembangan partisipasi swasta dalam pemanfaatan potensi wilayah khususnya pertambangan dan kehutanan; serta (5) peningkatan kerja sama dan kesepakatan dengan negara tetangga di bidang keamanan, ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan daerah perbatasan.

#### 2.9. Program penataan Ruang

Program ini bertujuan meningkatkan sistem penyusunan rencana tata ruang, memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang, dan memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung; meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang di daerah, baik aparat pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan yudikatif maupun lembaga-lembaga dalam masyarakat agar rencana tata ruang ditaati oleh semua pihak secara konsisten. Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya rencana tata ruang yang konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang diantaranya mengindahkan kenyamanan lingkungan, keamanan serta budaya dan adat masyarakat setempat; tertibnya pemanfaatan ruang dan meningkatnya kinerja kelembagaan pengelolaan penataan ruang di pusat dan di daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kawasan, khususnya pada wilayah-wilayah metropolitan yang didalamnya terdapat kota-kota yang berkembang pesat serta dengan memberi perhatian pada bagian-bagian kota yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi; (2) penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan disiplin tata ruang dari aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pelayanan informasi tata ruang kepada masyarakat luas; dan (3) pemantapan koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah, kerja sama antardaerah dan konsultasi dengan lembaga dan organisasi masyarakat dalam kegiatan penataan ruang di tingkat nasional dan daerah.

#### 2.10. Program Pengelolaan Pertanahan

Tujuan dari program ini adalah mengembangkan administrasi pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penguasaan tanah secara adil dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hal ulayat masyarakat hukum adat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pertanahan di pusat dan daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah; dan terselenggaranya pelayanan pertanahan bagi masyarakat secara efektif oleh setiap pemerintah daerah dan berdasarkan pada peraturan dan kebijakan pertanahan yang berlaku secara nasional.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan pelayanan pertanahan di daerah yang didukung sistem informasi pertanahan yang andal; (2) penegakan hukum pertanahan secara konsisten; (3) penataan penguasaan tanah agar sesuai dengan rasa keadilan; (4) pengendalian penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah termasuk pemantapan sistem perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang atau penggunaan tanah didaerah; dan (5) pengembangan kapasitas kelembagaan pertanahan di pusat dan daerah.

### 3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mendukung amanat GBHN 1999-2004, program-program pembangunan yang

akan dilaksanakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut.

### 3.1. Program Penguatan Organisasi Masyarakat

Tujuan program ini adalah meningkatkan kapasitas organisasi sosial dan ekonomi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat sebagai wadah bagi pengembangan usaha produktif, pengembangan interaksi sosial, penguatan ketahanan sosial, pengelolaan potensi masyarakat setempat dan sumber daya dari pemerintah, serta wadah partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Sasaran yang ingin yang dicapai adalah berkembangnya organisasi sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang dapat meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penghapusan berbagai peraturan yang menghambat perkembangan organisasi sosial dan ekonomi yang dibentuk oleh masyarakat; (2) penyediaan bantuan pendampingan; (3) penyediaan informasi kepada organisasi sosial dan ekonomi masyarakat; serta (4) pengembangan forum lintas pelaku dalam komunikasi dan konsultasi baik antara pemerintah dan lembaga masyarakat, maupun antar lembaga masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan publik.

### 3.2. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program penanggulangan kemiskinan dalam Bab IV dan bab lainnya. Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan dan keberdayaan keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui penyediaan sumber daya produksi; meningkatkan kegiatan usaha kecil, menengah dan informasi di perdesaan dan perkotaan; mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang rentan sosial dan tidak mampu mengatasi akibat guncangan ekonomi, terkena sakit atau cacat, korban adalah meningkatkan kemampuan dan keberdayaan keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan umum berupa sarana dan prasarana sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penyediaan sumber daya produksi; meningkatkan kegiatan usaha kecil, menengah dan informasi di perdesaan dan perkotaan; mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang rentan sosial dan tidak mampu mengatasi akibat guncangan ekonomi, terkena sakit atau cacat, korban kejahatan, dan berusia lanjut dan berpotensi menjadi miskin. Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya kondisi sosial ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat yang miskin dan berpotensi menjadi miskin.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyediaan bantuan dalam bentuk pelayanan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan, pemberian bantuan biaya hidup dan modal; (2) penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi penyediaan pendampingan miskin untuk mengembangkan kemampuan usaha dan kebiasaan hidup produktif; (3) Pengembangan sistem perlindungan sosial yang sudah ada di masyarakat, usaha swasta, dan pemerintah; (4) penyediaan dukungan politik untuk mengurangi segala bentuk eksploitasi; dan (5) peningkatan kapasitas daerah untuk mengelola bantuan sistem perlindungan sosial.

### 3.3. Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat

Tujuan program ini adalah mengembangkan jaringan kerja keswadayaan dan memperkuat solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan membantu masyarakat miskin dan rentan sosial. Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah

berkembangnya kelembagaan keswadayaan di masyarakat, dan meningkatnya solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat terutama kepada masyarakat miskin dan rentan sosial.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membantu pengembangan jaringan kerja keswadayaan; (2) pengembangan kapasitas lembaga-lembaga keswadayaan; (3) pengembangan forum komunikasi antartokoh penggerak kegiatan keswadayaan; (4) pengembangan kemitraan lintas pelaku dalam kegiatan keswadayaan; dan (5) penghapusan berbagai aturan yang menghambat pengembangan lembaga dan organisasi keswadayaan masyarakat.

#### 4. Mempercepat Penanganan Khusus Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya dan Maluku

Berdasarkan amanat GBHN 1999-2004, program-program pembangunan yang akan ditempuh untuk mempercepat penyelesaian permasalahan di Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya, dan Maluku serta Maluku Utara adalah sebagai berikut.

##### 4.1. Program Penanganan Khusus Daerah Istimewa Aceh

Program ini bertujuan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat Aceh yang damai dan tenang. Sasarannya adalah terwujudnya keadilan, kesejahteraan, kedamaian dan ketenangan masyarakat Aceh, terwujudnya kepastian hukum dan hak asasi manusia, mantapnya rasa cinta bangga dan tanah air serta persatuan dan kesatuan, dan semakin berkembangnya kapasitas masyarakat dalam kerangka otonomi khusus Aceh.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penerapan otonomi khusus melalui upaya perumusan format otonomi khusus; (2) penyusunan perangkat peraturan pendukung otonomi khusus keistimewaan Aceh; (3) penataan mekanisme dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan otonomi khusus; (4) penentuan pembagian keuangan pusat dan daerah yang lebih adil; dan (5) penekanan otonomi daerah pada tingkat kabupaten dan kota. Di samping itu terdapat kegiatan pokok : (1) pemulihan kehidupan masyarakat melalui pembangunan prasarana dan sarana ekonomi dan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan mengoptimalkan pemanfaatannya; serta (2) penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui pelaksanaan peradilan yang jujur, adil, dan cepat terhadap para pelaku tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, maupun pemberian suatu kompensasi material dan spiritual kepada para korban.

##### 4.2. Program Penanganan Khusus Irian jaya

Program ini bertujuan mempercepat keberdayaan masyarakat setempat agar dapat berperan serta aktif dalam proses pembangunan, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah yang demokratis, mempercepat penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, serta mempercepat penerapan otonomi khusus. Sasarannya adalah terwujudnya sumber daya manusia setempat yang berkualitas, terwujudnya fungsi pelayanan pemerintahan daerah yang optimal, terwujudnya kedamaian, kesejahteraan dan keadilan, mantapnya rasa cinta bangsa dan tanah air serta persatuan dan kesatuan dan terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) percepatan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan formal dan informal dengan pendekatan khusus yang memperhatikan budaya masyarakat lokal, peningkatan insentif dan fasilitas khusus dalam pelayanan sosial dasar di bidang, pendidikan, kesehatan, gizi, maupun penyediaan hunian; penerapan otonomi khusus melalui penyusunan perangkat peraturan pendukung otonomi khusus; (2) penyediaan akses bagi

masyarakat lokal dalam memperoleh sumber daya ekonomi; pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat lokal dengan sistem pendampingan yang konsisten; dan (3) peningkatan penyediaan prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan pengembangan wilayah. Di samping itu terdapat kegiatan pokok guna peningkatan kapasitas pemerintahan adalah (1) pengembangan dan penataan kelembagaan pemerintahan daerah; pemberdayaan kecamatan sebagai ujung tombak pembangunan; (2) pemekaran desa, kecamatan, kabupaten dan kota serta peningkatan kapasitas kelembagaannya; (3) penataan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah; (4) peningkatan kapasitas dan akses lembaga adat dan lembaga keagamaan; serta (5) peningkatan komunikasi dan penataan hubungan kelembagaan politik Irian Jaya, baik lembaga legislatif, pemerintah daerah, maupun lembaga masyarakat adat.

Selain itu terdapat kegiatan pokok yang dilakukan guna penyelesaian kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, adalah (1) pelaksanaan peradilan yang jujur, adil dan bermartabat, pengakuan dan penghormatan wilayah hak ulayat masyarakat adat agar dapat mengelola dan menikmati sumber daya alam di wilayah ulayatnya; (2) peninjauan kembali kontrak-kontrak pengelolaan sumber daya alam yang merugikan masyarakat adat; dan (3) peningkatan jaringan komunikasi dan dialog dengan seluruh komponen masyarakat dalam memecahkan permasalahan hak asasi manusia dan pelaksanaan pembangunan daerah.

#### 4.3. Program Penanganan Khusus Maluku dan Maluku Utara

Tujuan program ini adalah mewujudkan rasa aman dan memulihkan kembali suasana dan kondisi masyarakat yang trauma sebagai dampak konflik sosial antarkelompok masyarakat di Maluku dan Maluku Utara secara komprehensif, lintas disiplin, dan lintas sektoral. Sasarannya adalah terwujudnya rasa aman, pulihnya suasana dan kondisi masyarakat yang terganggu oleh kerusuhan yang berkepanjangan, serta terlaksananya pengadilan bagi para pelanggar hak asasi manusia dan tindak kekerasan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) rekonsiliasi dan normalisasi kehidupan masyarakat melalui pendayagunaan nilai-nilai kekerabatan melalui forum-forum gotong-royong, dialog antaragama dan antarkelompok, dan sosialisasi hak asasi manusia; (2) peningkatan ketahanan sosial masyarakat dari unsur-unsur provokasi pihak luar; dan (3) peningkatan penyuluhan kesadaran beragama menyangkut nilai-nilai kemajemukan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Di samping itu kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui pembangunan kembali sarana perekonomian yang rusak; (2) pemberian modal usaha dan lahan baru bagi para pengungsi; (3) perbaikan sarana dan prasarana umum khususnya di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan; (4) pemulihan hak-hak individu dan masyarakat secara adil; (5) pengadaan kembali tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga-tenaga pelayanan umum lainnya; (6) penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia sekolah keluarga pengungsi dan daerah yang mengalami kerusuhan; (7) penyelesaian menyeluruh masalah pengungsi; dan (8) pemulihan kondisi politik dan keamanan daerah. Di samping itu, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penegakan hukum dan hak asasi manusia melalui proses peradilan yang jujur, adil, dan cepat terhadap para pelanggar hak asasi manusia; (2) pemberian suatu kompensasi material dan spritual kepada para korban; (3) peningkatan kapasitas institusi agama dan adat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah; dan (4) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

LAMPIRAN D. MATRIKS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH LIHAT FISIK



## PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

### A. UMUM

Berbagai kebijakan dan program yang diuraikan di dalam bab ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang ketiga, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.

Pembangunan sumber daya adalah dan lingkungan hidup dalam bab ini menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga berkelanjutan pembangunan tetap terjamin.

Pola pemanfaatan sumber daya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada masyarakat adat dan lokal, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu. Dengan demikian pola pemanfaatan sumber daya alam harus memberi kesempatan dan peranserta aktif masyarakat adat dan lokal, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus dioptimalkan karena sumber daya alam sangat penting peranannya terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui mekanisme pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil, serta perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah, pendelegasian secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap terjaganya fungsi lingkungan.

Kontrol masyarakat dan penegakan supremasi hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan hal yang penting, yang menyebabkan hak-hak masyarakat untuk menggunakan dan menikmatinya menjadi terbuka dan mengurangi konflik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Sistem hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam harus memiliki perspektif keberlanjutan. Penghormatan hak-hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, dan pemerintahan yang baik (good governance). Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam harus dapat mengurangi tumpangtindih peraturan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan keselarasan peran antara pusat dan daerah serta antarsektor. selain itu, peran serta aktif masyarakat dalam memanfaatkan akses dan mengendalikan kontrol terhadap penggunaan sumber daya alam harus lebih optimal karena dapat melindungi hak-hak publik dan hak-hak masyarakat adat.

Kemiskinan akibat krisis ekonomi disertai melemahnya wibawa hukum perlu diperhatikan agar kerusakan sumber daya alam tidak makin parah, termasuk penjarahan terhadap hutan, kawasan konservasi alam, dan sebagainya.

Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak daerah, antara lain pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan, dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup dewasa ini, kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya : (1) mengelola sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya

tampungnya; (2) menegakan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan; (3) mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap; (4) memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; (5) menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (6) memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu; (7) mengakibatkan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

Sasaran yang ingin adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan, serta terwujudnya keadilan antargenerasi, antardunia usaha dan masyarakat, dan antarnegara maju dengan negara berkembang dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

#### B. ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, GBHN 1999-2004 mengamankan :

1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
3. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat dibalik.
4. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang.
5. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

#### C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang merupakan cerminan dari prioritas kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dijabarkan ke dalam lima program pembangunan yang direncanakan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang. Kelima program tersebut saling terkait satu sama lain dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan dalam kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dan sehat. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Program pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, valuasi, dan penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berupa infrastruktur data spasial, nilai, dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup baik di darat, laut, maupun udara; (2) valuasi potensi sumber daya hutan, air, laut, udara, dan mineral; dan (3) pengkajian neraca sumber daya alam; dan (4) penyusunan Produk Domestik Bruto Hijau (PDB Hijau) secara bertahap. Selain itu dalam program ini juga dilaksanakan kegiatan pokok lainnya, yaitu : (1) pendataan kawasan ekosistem yang rentan terhadap kerusakan, termasuk wilayah kepulauan; (2) pendataan batas kawasan hutan, pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta (3) peningkatan akses informasi kepada masyarakat.

### 2. Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi, Rehabilitasi Sumber Daya Alam

Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam (hutan, laut, air, udara dan mineral) dan lingkungan hidup. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain dari program ini adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengkajian kembali kebijakan pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam; (2) pengelolaan sumber daya hutan dan sumber daya air dengan pendekatan daerah aliran sungai dalam kerangka penataan ruang; (3) pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, wilayah pesisir, dan lahan bekas pengelolaan sumber daya alam; (4) penerapan sistem disinsentif dalam bentuk tarif yang progresif dan rasional untuk melindungi sumber daya alam; (5) pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati darat dan perairan, baik secara insitu maupun eksitu, serta perekayasaan genetika; (6) pengembangan riset terhadap potensi dan pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam usaha meningkatkan nilai tambah yang optimal di pasar global dan kualitas lingkungan hidup melalui mekanisme pembiayaan yang berasal dari hasil pemanfaatan sumber daya alam; (7) pengembangan teknologi penggunaan sumber daya alam yang ramah lingkungan termasuk teknologi yang terbaik, teknologi lokal, dan teknologi daur ulang yang tersedia; (8) pengembangan industri pemanfaatan flora, fauna, serta biota laut lainnya yang memiliki keunggulan komparatif; (9) rasionalisasi dan restrukturisasi industri berbasis sumber daya alam untuk menjamin keberlanjutan daya dukung sumber alam; dan (10) pengembangan jasa pariwisata yang berwawasan lingkungan di berbagai kawasan yang memiliki ekosistem berciri khusus.

### 3. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan khususnya teknologi tradisional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, sumber daya hutan, dan industri yang ramah lingkungan; (2) penetapan indeks dan baku mutu lingkungan; (3) pengembangan teknologi pengelolaan limbah rumah tangga, industri, dan transportasi; (4) pengintegrasian biaya lingkungan terhadap biaya produksi; (5) pengembangan teknologi produksi bersih; (6) pengembangan kelembagaan pendanaan pengelolaan lingkungan hidup; (7) penjaminan terjadinya alih kapasitas; (8) pengendalian pencemaran air, tanah, udara dan laut; serta (9) pemantauan yang kontinyu, pengawasan dan evaluasi standar mutu lingkungan. Dalam upaya ini termasuk penataan ruang, permukiman dan industri yang konsisten dengan pengendalian pencemaran lingkungan.

#### 4. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan; dan untuk mengembangkan kelembagaan serta menegakan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat, dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksananya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyusunan undang-undang pengelolaan sumber daya alam berikut perangkat peraturannya; (2) penetapan kebijakan yang membuka peluang akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (3) evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (5) pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam khususnya sumber daya laut melalui metode MCS (monitoring, controlling, dan surveillance); (6) pengakuan kelembagaan adat dan lokal dalam kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam; dan (7) penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam lintas wilayah administratif. selain itu juga akan dilaksanakan kegiatan pokok lainnya, yaitu : (1) pengembangan pelaksanaan perjanjian internasional dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan mewaspadaai adanya upaya untuk menggunakan isu lingkungan yang menghambat ekspor dan perkembangan ekonomi negara berkembang; (2) peningkatan sistem pengawasan terhadap pembajakan sumber daya hayati (biopiracy) dan pembajakan teknologi lokal oleh pihak asing; (3) pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta (4) pelaksanaan program-program sukarela seperti sistem manajemen dan kinerja lingkungan (ISO-14000 dan ekolabeling) pada sebanyak mungkin perusahaan industri dan jasa agar di tingkat internasional.

#### 5. Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan dari program ini untuk meningkatkan peranan dan kepedulian

pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersedianya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu mengelola sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; (2) pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan, adat, dan budaya; (3) pengembangan pola kemitraan dengan lembaga masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup; dan (4) perlindungan hak-hak adat dan ulayat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu terdapat kegiatan pokok lain, yaitu : (1) pemyarakatan pembangunan berwawasan lingkungan; (2) pengkajian keadaan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat adat dan lokal; (3) pemanfaatan kearifan tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup; dan (4) perlindungan terhadap teknologi tradisional dan ramah lingkungan; serta (5) peningkatan kepatuhan dunia usaha dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan tata nilai masyarakat lokal yang berwawasan lingkungan hidup.

#### D.MATRIK KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP LIHAT FISIK

#### BAB XII PENUTUP

Naskah Program Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas) ini merupakan lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Undang-Undang Nomor 25 tentang Program Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas).

Program Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas) dalam pelaksanaannya akan dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terukur kinerjanya yang akan ditetapkannya setiap tahunnya oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Propenas menurut sifatnya mencakup program-program pembangunan yang berskala nasional, lintas wilayah, lintas daerah, lintas negara dan yang oleh karena sifat dan cakupannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi nasional.

Propenas harus menjadi acuan bagi lembaga-lembaga tinggi negara, departemen, dan lembaga pemerintah nondepartemen dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) serta bagi pemerintah daerah dalam menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda) yang karena keragamannya harus mampu mengakomodasikan aspirasi dan kekhususan daerah dalam kerangka pembangunan nasional.

Demi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan desentralisasi pembangunan, konsistensi perencanaan dan penyusunan program pembangunan secara vertikal antara Propenas di tingkat nasional dan Propeda di tingkat daerah harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Propenas dan Repeta melalui proses perencanaan pembangunan dan anggaran setiap tahunnya. Demi terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang lebih terintegrasi, menyeluruh, bertanggung-gugat dan terkendali pelaksanaannya, lembaga/badan perencanaan pembangunan nasional melakukan koordinasi perencanaan pembangunan,

anggaran, serta pemantauan dan evaluasi kinerja. Koordinasi perencanaan nasional serta antara perencanaan nasional dan daerah dilakukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan, anggaran, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan yang terintegrasi, menyeluruh, interaktif lintas pelaku, transparan, dan bertanggung-gugat. Hasil perencanaan pembangunan dan anggaran yang diperoleh dari proses ini akan menjadi bahan Pemerintah dalam pembahasan dan penetapan repeta yang memuat APBN bersama Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya.

Pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta masyarakat bersungguh-sungguh melaksanakan program pembangunan yang tertuang dalam Propenas ini dan pada tahap awal memusatkan pada upaya pemulihan keamanan dan ketertiban, penegakan supremasi hukum, pemulihan ekonomi yang mengutamakan penataan infrastruktur perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan cadangan devisa negara, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan sosial, serta penataan lembaga-lembaga pemerintah agar terselenggara fungsi pelayanan masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna.

Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID